BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

KARYA TERPILIH
BRIN
PROGRAM AKUISISI
PENGETAHUAN LOKAL
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Editor:
Deny Yudo Wahyudi, dkk.

Jawa dalam Silang Bahari Nusantara

Jawa dalam Silang Bahari Nusantara

buku ini tidak diperjualbelikan

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id

Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

buku ini tidak diperjualbelikan

Editor:
Deny Yudo Wahyudi
Slamet Sujud P. J.
Daya Negri Wijaya

Jawa dalam Silang Bahari Nusantara

buku ini tidak diperjualbelikan

Penerbit BRIN

© 2025 Editor dan Penulis

Katalog dalam Terbitan (KDT)
Jawa dalam Silang Bahari Nusantara/Deny Yudo Wahyudi dkk. (Ed.)–Jakarta: Penerbit BRIN, 2025.

xx + 179 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-6303-82-0 (*e-book*)

1. Budaya Bahari
2. Sejarah Pesisir
3. Persilangan Budaya
4. Kawasan Pesisir Jawa

900

Editor Akuisisi : Noviastuti Putri Indrasari
Copy editor : Sarah Fairuz
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata isi : Utami Dwi Astuti
Desainer sampul : Utami Dwi Astuti

Edisi pertama : Desember 2025

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
WhatsApp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
PenerbitBRIN
@Penerbit_BRIN
@penerbit.brin

buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Isi

Daftar Gambar ix
Daftar Tabel xi
Pengantar Penerbit xiii
Prakata xv
Kata Pengantar xix
BAB I Jejak Kebudayaan Bahari: Jawa dalam Perkembangan Ekonomi-Politik Kawasan Perairan Nusantara *1*
Deny Yudo Wahyudi, Slamet Sujud Purnawan Jati, & Daya Negri Wijaya *1*

BAGIAN I EKONOMI-POLITIK KAWASAN PESISIRAN NUSANTARA 9

BAB II Anatomi Pranata Ekonomi Majapahit 11
Deny Yudo Wahyudi, Vita Sabrina Azda, & Labuda Shofiya Ananda 11

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB III *Naditira Pradeca*: Jejak Bandar-Bandar di Era Majapahit.....29
Slamet Sujud Purnawan Jati & Vinda Regita Cahyani.....29
BAB IV Bandar Pelabuhan Tuban pada Masa Majapahit.....43
Muhammad 'Afwan Mufti & Deny Yudo Wahyudi.....43
BAB V Bandar-Bandar Dagang Sepanjang Pesisir Utara Jawa Abad XV–XVI Masehi.....55
Isa Al Fadani Ahmad & Anisa Musyaroful Ikhrom.....55
BAB VI Perkembangan Pelabuhan Tuban pada Masa Peralihan (Abad . XV–XVIII Masehi).....65
Vega Andika Kusuma & Labuda Shofiya Ananda.....65
BAB VII Sungai Kalimas Dan Relasinya Dengan Pelabuhan Dan Perdagangan Di Surabaya Tahun 1800–1940.....83
Nenci Aprilia Nabela & Deny Yudo Wahyudi.....83

BAGIAN II JEJAK-JEJAK KEBUDAYAAN BAHARI.....95

BAB VIII Jawa dalam Catatan Odorico De Pordenone.....97
Daya Negri Wijaya.....97
BAB IX Makam Troloyo: Kebudayaan Masa Peralihan di Mojokerto.....107
Anis Fitri Rachmawati & Deny Yudo Wahyudi.....107
BAB X Pasuruan Dalam Pusaran Peradaban.....121
Erza Sahrul Gunawan.....121
BAB XI Jejak Bangunan Indis Pasuruan Sebagai Simbol Kejayaan Perekonomian Abad XVIII–XIX.....137
Alfan Fikril Hakim.....137
BAB XII Jawa Dalam Persilangan Budaya dan Potensi Membangun Kebudayaan Bahari Nusantara.....157
Deny Yudo Wahyudi, Slamet Sujud Purnawan Jati, & Daya Negri Wijaya.....157

buku ini tidak diperjualbelikan

Glosarium 163
Daftar Singkatan 165
Indeks 167
Tentang Editor 171
Tentang Penulis 173

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Relief Menanam Padi dan Menanak Nasi 15
Gambar 2.2 Relief Membajak Sawah 16
Gambar 2.3 Adegan Perburuan pada Bejana *Terracotta* 16
Gambar 2.4 Relief Perempuan Berdagang 17
Gambar 2.5 Prasasti Pamintihan 18
Gambar 2.6 Prasasti Balawi 18
Gambar 2.7 Saluran Air Nglinguk 19
Gambar 2.8 Situs Kanal dan Petirtaan Desa Kesamben 20
Gambar 2.9 Relief Sawah 21
Gambar 2.10 Relief Pasar di Candi Panataran 22
Gambar 2.11 Relief kereta berkuda dan Relief Perahu Majapahit 23
Gambar 2.12 Uang Ma dan Uang Gobog 24
Gambar 3.1 Lingkungan Geografis Majapahit 32

buku ini tidak diperjualbelikan

Gambar 3.2 Jalur Aliran Sungai dan *Naditira Pradeca* *37*
Gambar 4.1 Peta Geografis Tuban 46
Gambar 4.2 Peta Jalur Perdagangan Nusantara 47
Gambar 4.3 Diagram Pola Interaksi Masyarakat di Kawasan Pelabuhan Laut Jawa 49
Gambar 5.1 Kota-Kota di Pesisir Utara Jawa 57
Gambar 5.2 Peta Posisi Kota Pesisir Demak Abad ke-15-16 Masehi ..59
Gambar 6.1 Kalpataru Sunan Bonang 75
Gambar 7.1 Sungai Kalimas Surabaya Masa Kolonial 86
Gambar 9.1 Letak Makam Troloyo 111
Gambar 9.2 Tarikh Nisan Makam Troloyo 112
Gambar 11.1 Patung *Omah* Singa 146
Gambar 11.2 Atap *Omah* Singa 147
Gambar 11.3 Panil Kaca *Omah* Singa 148
Gambar 11.4 Kamar *Omah* Singa 148
Gambar 11.5 Interior Bernuansa Cina *Omah* Singa 149
Gambar 11.6 Altar di *Omah* Singa 149
Gambar 11.7 *Karbil* pada Bagian Depan *Omah* Singa 151
Gambar 11.8 Porselin dan Panil Kaca pada Pintu 151
Gambar 11.9 Kwee Sik Poo 152
Gambar 11.10 Bagian Depan Bangunan Hotel Daarussalam 153
Gambar 11.11 Atap dan *Karbil* Hotel Daarussalam 154

buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Toponim *Naditira Pradeca*.....*37*

Tabel 11.1 Perkembangan Jumlah Pabrik Gula di Pasuruan Tahun 1830–1870..... 143

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku Jawa dalam Silang Bahari Nusantara membahas persilangan kebudayaan di kawasan pesisir dan pengaruhnya pada daerah pedalaman, terkhusus di wilayah Pulau Jawa. Unsur kebudayaan yang akan dibahas buku ini meliputi sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup (teknologi), sistem ekonomi (mata pencaharian), sistem politik, bahasa, kesenian, dan religi. Tidak hanya itu, pembahasan dalam buku ini juga diperluas lewat ulasan tradisi bahari berupa teknologi pelayaran, sistem ekonomi politik di kawasan pesisiran, dan jejak-jejak persilangan bahari Nusantara.

buku ini tidak diperjualbelikan

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

buku ini tidak diperjualbelikan

Prakata

Nusantara, komunitas pesisir, dan kebudayaan bahari adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kausalitas antara ketiganya pada akhirnya melahirkan persilangan-persilangan budaya, baik di kawasan pesisir maupun berdampak ke pedalaman. Buku yang mulanya menyorot persilangan budaya di kawasan pesisir Nusantara ini kemudian disintesis kembali sehingga menghasilkan tulisan mengenai persilangan bahari di wilayah Jawa dengan tajuk *Jawa dalam Silang Bahari Nusantara.* Buku ini merupakan karya yang berusaha merekonstruksi sistem kebudayaan yang terbentuk di wilayah pesisir dan pedalaman Jawa, yang merupakan bagian dari pembentukan identitas kebaharian di Indonesia. Masing-masing bagian, bab, dan pembahasan dalam buku ini menawarkan cara pandang dalam mengkaji jaringan bahari Nusantara yang secara umum mengajak kita untuk menilik kembali pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan pengaruhnya terhadap pembentukan kebudayaan, mulai dari zaman Hindu-Buddha hingga era kolonial.

buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini memberikan kita pemahaman tentang kebudayaan bahari dalam lintas sejarah dengan paparan yang runtut dan mendalam. Kebudayaan bahari di Nusantara memiliki kekayaan yang tercipta dari adanya kontak dan interaksi sosial antarbangsa. Meskipun banyak kajian yang memiliki bahasan serupa, buku ini memiliki keunikan tersendiri, khususnya dalam menghadirkan jejak-jejak dan sumber sejarah yang sebelumnya tidak banyak dibahas oleh sejarawan. Buku ini terbagi dalam dua bagian utama: (1) bentuk kebudayaan universal, yakni ekonomi-politik kawasan pesisiran Jawa; dan (2) jejak-jejak kebudayaan bahari Nusantara.

Dua bagian yang terhimpun dalam buku ini ditulis oleh para kontributor yang memiliki kepedulian dan minat besar terhadap sejarah pesisiran, persilangan budaya, dan kebudayaan bahari Nusantara. Para penulis telah memanfaatkan berbagai tinggalan kebentukan yang ada guna menghadirkan narasi rekonstruksi sejarah yang utuh mengenai budaya bahari di kawasan pesisisr maupun pedalaman Jawa dari periode ke periode.

Penyusunan hingga penerbitan buku ini merupakan rangkaian proses yang dinilai tidak mudah bagi kami. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bahu-membahu dalam penyelesaian buku ini. Kami berterima kasih kepada semua penulis dan kontributor yang telah berkontribusi dalam menuangkan hasil interpretasi dan historiografinya ke dalam buku ini. Secara khusus, kami juga berterima kasih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) serta para pimpinan organisasi riset dan pusat riset BRIN yang telah memberikan ruang dan dukungan kepada kami.

Semoga buku ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi para pembaca, baik para akademisi maupun masyarakat pada umumnya, khususnya dalam menambah dan memperkuat memori kolektif kebudayaan bahari melalui rekam jejak kebudayaan pesisir Nusantara yang lebih segar, kaya, dan kronologis. Penerbitan ulang buku *Jawa dalam Silang Bahari Nusantara* melalui Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Penerbit BRIN ini diharapkan dapat memperluas jangkauan penyebarluasan wawasan mengenai kebaharian Nusantara,

buku ini tidak diperjualbelikan

terutama di Jawa, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pewaris kebudayaan bahari Nusantara.

Editor

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

Kata Pengantar

Saya merasa sangat berbahagia dapat menulis pengantar bagi buku bunga rampai bertajuk *Jawa Dalam Silang Bahari Nusantara*. Buku ini merupakan sebuah karya yang menyelami kedalaman sejarah maritim Nusantara dengan begitu cermat dan mendalam. Sebagai seorang peneliti dan sejarawan yang telah lama berkecimpung dalam studi maritim, saya melihat buku ini sebagai kontribusi yang signifikan dalam memahami warisan bahari yang kaya dan beragam di kepulauan Nusantara. Sejarah maritim Nusantara adalah kisah tentang keberanian, inovasi, dan ketahanan. Dari zaman kerajaan kuno hingga era kolonial, laut telah menjadi jalur kehidupan dan sumber kekayaan bagi masyarakat Nusantara. Melalui buku ini, penulis berhasil menyusun narasi yang komprehensif tentang bagaimana laut memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan perkembangan budaya Nusantara. Buku ini tidak hanya mengungkapkan fakta-fakta sejarah yang menarik, tetapi juga menawarkan analisis yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan aktivitas maritim. Penulis dengan cermat menggabungkan kekayaan

buku ini tidak diperjualbelikan

literatur sejarah dengan perspektif terbaru, memberikan perspektif baru yang segar tentang peran maritim dalam sejarah kita.

Sebagai ahli di bidang ini, saya sangat menghargai upaya penulis dalam menggali dan menyusun informasi yang sering kali tersebar dan terfragmentasi. Buku ini menjadi jembatan penting bagi para pembaca, baik akademisi maupun masyarakat umum, untuk memahami betapa luas dan kompleksnya sejarah maritim Nusantara. Dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap kaya akan detail, buku ini menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademis dan kesadaran publik akan pentingnya laut dalam sejarah bangsa kita. Saya yakin bahwa buku ini dapat menjadi referensi utama bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah maritim dan budaya Nusantara. Buku ini tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai warisan bahari kita. Semoga buku ini menjadi langkah awal untuk lebih banyak karya serupa yang mengeksplorasi dan merayakan kekayaan sejarah maritim.

Dr. Ari Sapto

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB I

JEJAK KEBUDAYAAN BAHARI: JAWA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI-POLITIK KAWASAN PERAIRAN NUSANTARA

Deny Yudo Wahyudi, Slamet Sujud Purnawan Jati, & Daya Negri Wijaya

Istilah bahari selalu digunakan dan dipertukarkan dengan maritim. Keduanya merujuk pada makna laut. Akan tetapi, seharusnya istilah tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Istilah bahari biasanya berhubungan dengan kebudayaan pesisir, sedangkan konsep maritim dapat dipahami sebagai segala hal yang identik dengan laut, namun lebih spesifik pada aktivitas perdagangan dan pelayaran. Indonesia pada dasarnya merupakan satu dari sekian negara yang lekat dengan kebudayaan bahari, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara dengan garis terpanjang kedua di dunia. Secara geografis, pulau-pulau di Indonesia juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkoneksi satu sama lain. Keadaan itu memungkinkan adanya interaksi sosial, terutama aktivitas perdagangan yang bermuara pada persilangan budaya. Bunga rampai ini membahas persilangan kebu-

D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: deny.yudo.fis@um.ac.id
© 2025 Editor & Penulis
Wahyudi, D. Y., Jati, S. S. P., & Wijaya, D. N. (2025). Jejak Kebudayaan Bahari: Jawa dalam Perkembangan Ekonomi-Politik Kawasan Perairan Nusantara. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (1–8). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c9171
E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

dayaan di kawasan pesisir dan pengaruhnya pada daerah pedalaman. Kebudayaan pesisir lekat dengan tradisi bahari berupa pengetahuan dan teknologi pelayaran serta perkapalan (Zuhdi, 2020). Kebudayaan sendiri secara umum memiliki tujuh unsur yang universal, seperti sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup (teknologi), sistem ekonomi (mata pencaharian), sistem politik, bahasa, kesenian, dan religi (Koentjaraningrat, 2015). Oleh karena itu, pembahasan buku ini selain mengulas salah satu unsur yang universal yakni sistem ekonomi politik di kawasan pesisiran, juga menjelaskan tentang jejak-jejak persilangan bahari Nusantara.

Sistem ekonomi pesisiran tentu terpusat pada kota pelabuhan. Pelabuhan, secara sederhana, dapat dipahami sebagai tempat berlabuh kapal untuk bongkar-muat kargo dan naik-turunnya penumpang. Pelabuhan biasanya dibangun di dekat pesisir pantai atau muara sungai. Idealnya, muara sungai dipilih karena airnya yang lebih tenang. Jika pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk gudang, maka banyak kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga ramai apabila terhubung dengan daerah pedalaman, baik melalui sungai, kanal, maupun jalan darat (Rodrigues & Santos, 2019). Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan juga menarik orang dari pedalaman atau daerah sekitarnya untuk mencari peluang kerja. Istilah bahari selalu digunakan dan dipertukarkan dengan maritim. Keduanya merujuk pada makna laut. Akan tetapi, seharusnya istilah tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Istilah bahari biasanya berhubungan dengan kebudayaan pesisir, sedangkan konsep maritim dapat dipahami sebagai segala hal yang identik dengan laut, namun lebih spesifik pada aktivitas perdagangan dan pelayaran. Indonesia pada dasarnya merupakan satu dari sekian negara yang lekat dengan kebudayaan bahari, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara dengan garis terpanjang kedua di dunia. Secara geografis, pulau-pulau di Indonesia juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkoneksi satu sama lain. Keadaan itu memungkinkan adanya interaksi sosial, terutama aktivitas perdagangan yang bermuara pada persilangan budaya. Bunga rampai ini membahas persilangan kebudayaan di kawasan pesisir

buku ini tidak diperjualbelikan

dan pengaruhnya pada daerah pedalaman. Kebudayaan pesisir lekat dengan tradisi bahari berupa pengetahuan dan teknologi pelayaran serta perkapalan (Zuhdi, 2020). Kebudayaan sendiri secara umum memiliki tujuh unsur yang universal, seperti sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup (teknologi), sistem ekonomi (mata pencaharian), sistem politik, bahasa, kesenian, dan religi (Koentjaraningrat, 2015). Oleh karena itu, pembahasan buku ini selain mengulas salah satu unsur yang universal yakni sistem ekonomi politik di kawasan pesisiran, juga menjelaskan tentang jejak-jejak persilangan bahari Nusantara.

Sistem ekonomi pesisiran tentu terpusat pada kota pelabuhan. Pelabuhan, secara sederhana, dapat dipahami sebagai tempat berlabuh kapal untuk bongkar-muat kargo dan naik-turunnya penumpang. Pelabuhan biasanya dibangun di dekat pesisir pantai atau muara sungai. Idealnya, muara sungai dipilih karena airnya yang lebih tenang. Jika pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk gudang, maka banyak kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga ramai apabila terhubung dengan daerah pedalaman, baik melalui sungai, kanal, maupun jalan darat (Rodrigues & Santos, 2019). Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan juga menarik orang dari pedalaman atau daerah sekitarnya untuk mencari peluang kerja. Pertumbuhan populasi akan mengubah pelabuhan menjadi kota pelabuhan, tempat orang dari berbagai bangsa dan budaya berinteraksi sehingga membentuk budaya kota (Rodrigues & Santos, 2019). Semakin ramainya suatu pelabuhan maka membutuhkan suatu organisasi politik untuk mengelolanya. Jika kota pelabuhan dapat menjaga dan mengembangkan kegiatan perdagangannya, bukan tidak mungkin pelabuhan ini berkembang menjadi kota metropolitan sebagaimana yang kita lihat sekarang (Polonia, 2006; Tull, 2014).

Terlihat mudah menganalisis pelabuhan sebagai suatu objek penelitian dengan menempatkannya pada suatu sistem. Sistem pelabuhan sebagai sebuah konsep dapat menolong para sejarawan maritim untuk menjelaskan eksistensi pelabuhan. Pelabuhan dibangun, dikembangkan, dan ditinggalkan berdasarkan konteks geo-ekonomi,

buku ini tidak diperjualbelikan

politik, dan logistik. Sistem ini berpengaruh pada level pelabuhan di setiap area (Polonia, 2006). Jackson (2001) melakukan kategori pada hierarki pelabuhan, yakni pelabuhan besar, medium, kecil, dan tak penting berdasarkan kegiatan perdagangan. Akan tetapi, pelabuhan besar pada kenyataannya tidak bisa mempertahankan posisinya tanpa adanya dukungan dari pelabuhan lainnya yang lebih rendah. Hal ini mengarahkannya pada konsep pelabuhan pendukung, di mana pelabuhan kecil dan pelabuhan tak penting melayani kebutuhan pelabuhan besar, terutama dalam melayani kapal dagang yang datang dan pergi (Polonia *et al*., 2014).

Analisis jejaring sosial biasanya sering digunakan dalam mengkaji jaringan perdagangan (Polonia *et al*., 2014). Bandar akan dilihat sebagai pasar dan ditempatkan dalam suatu titik dalam jejaring perdagangan (Polanyi, 1957). Hubungan antara satu pasar dan pasar lainnya dapat dilihat sebagai sistem pasar. Stabilitas sistem ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor politik, geo-ekonomi, dan logistik (Pinto, 2016). Jika dilihat dari aspek lokal, perdagangan di suatu bandar terhubung dengan jaringan perdagangan di wilayah yang lebih luas, sementara jika dilihat dari aspek global, pelabuhan kecil sering kali berada dalam sistem global dimana partner perdagangan mereka berasal dari lintas budaya dan bangsa (Wallerstein, 1974).

Menurut Hans Dieter Evers (1988), jaringan perdagangan dapat dipahami dalam tiga hal. Pertama, adanya jaringan perdagangan antarsuatu kelompok etnis yang dibentuk dari aktivitas perdagangan antar-wilayah atau antar-kelompok agama yang sama, bukan karena perdagangan yang didorong oleh munculnya persekutuan dagang. Kedua, jaringan perdagangan yang berasal dari persekutuan dagang yang terus-menerus berlangsung, yang dapat membentuk suatu rute jaringan perdagangan yang ada. Ketiga, jaringan perdagangan akibat perubahan-perubahan jaringan perdagangan yang lama yang dipengaruhi sistem produksi, pasar, maupun karena munculnya pengangkutan-pengangkutan yang baru.

buku ini tidak diperjualbelikan

Bagian pertama dalam buku ini secara khusus diperluas untuk membahas salah satu unsur universal dalam kebudayaan, yakni aktivitas ekonomi politik di kawasan pesisiran, dimulai dengan konstelasi maritim Nusantara yang tecermin dalam perjalanan ekonomi politik Majapahit. Majapahit berhasil menyatukan daerah pedalaman dan pesisiran, atau dalam arti sektor maritim dan agraris memiliki hubungan yang cukup erat. Deny Yudo Wahyudi, Vita Sabrina Azda, dan Labuda Shofiya Ananda mencoba memetakan pranata ekonomi Majapahit. Dengan berpedoman pada sumber arkeologi, aktivitas ekonomi agraris dan maritim Majapahit dapat direkonstruksi kembali, baik pelaku ekonomi, aktivitas ekonomi, maupun sarana fisik penunjang perekonomian masa Majapahit. Secara lebih mendalam, Slamet Sujud Purnawan Jati dan Vinda Regita Cahyani mengidentifikasi jejak-jejak bandar masa Majapahit. Majapahit beribu kota di Trowulan dan dikelilingi aliran sungai-sungai besar. Aliran sungai itu bukan hanya berfungsi sebagai sarana irigasi pertanian, melainkan juga sebagai sarana mobilitas perdagangan dari hulu ke hilir dan sebaliknya. Oleh karena itu, jalur transportasi sungai menjadi ramai dan muncul desa-desa penyeberangan di pinggiran sungai yang disebut sebagai *naditira pradeca*. Keberadaan *naditira pradeca* menjadi faktor penting dalam menyumbang perekonomian Majapahit. Beberapa *naditira pradeca* pada era Majapahit masih dapat dilacak jejaknya berdasarkan analisis toponim, seperti beberapa daerah di Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo.

Muhammad 'Afwan Mufti dan Deny Yudo Wahyudi mengkaji Pelabuhan Tuban (Kambang Putih) pada Majapahit. Bandar-bandar utama Majapahit, pada masa kejayaannya, juga menjadi pusat perdagangan rempah. Para pedagang Jawa menjadi pedagang perantara yang menghubungkan kepulauan penghasil rempah di Maluku Utara dan Kepulauan Banda ke bandar-bandar di Selat Malaka. Selat Malaka sejak abad XIV telah ramai oleh pelancong dan pedagang dari Samudra Hindia dan Lautan Cina. Ketika Majapahit menemui kemunduranya, geopolitik Nusantara terbagi dalam dua spektrum antara jaringan Islam dan Eropa (Portugis dan Belanda). Pada periode ini eksistensi

buku ini tidak diperjualbelikan

beberapa bandar dagang dalam spektrum jaringan perdagangan Islam yang posisinya berada di sepanjang pesisir utara Jawa diulas lebih mendalam oleh Isa Al Fadani dan Anisa Musyaroful dengan menggunakan pendekatan geografi kesejarahan atau geohistori. Kemudian dilanjutkan secara lebih mendalam pada pembahasan mengenai bandar dagang Tuban pada periode peralihan oleh Vega Andika dan Labuda Shofiya serta Surabaya dengan Pelabuhan Tanjung Perak oleh Nenci Aprilia Nabela.

Sementara itu, pada bagian kedua berfokus untuk menilik kembali jejak-jejak persilangan budaya baik kawasan pesisir maupun pedalaman. Jejak-jejak persilangan dan jaringan bahari juga terekam dalam kronik perjalanan dan nisan-nisan pelancong dan pedagang mancanegara (Lapian, 2011). Catatan Odorico (Mathiuzzi) de Pordonone menjadi salah satu kronik perjalanan yang dapat ditemui kini. Sebagaimana para pelancong asing lainnya, Odorico juga mencatat apa yang dia lihat dan alami selama berada di Jawa. Dia diperkirakan berdiam di Jawa pada medio 1321–1322, pada waktu itu Jawa dikuasai oleh Majapahit. Odorico mencatat beberapa hal, seperti (1) Jawa dikuasai oleh raja yang membawahi tujuh raja bawahan; (2) Komoditas dagang utama Jawa; (3) Istana raja; (4) Jawa berhasil memukul mundur lagi serangan Kaisar Mongol. Daya Negri Wijaya ingin melakukan verifikasi informasi Odorico dengan data sejarah lainnya, seperti prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Majapahit, berita Cina, dan kronik Ibnu Battuta. Dengan adanya kritik (internal) sumber, diharapkan khalayak dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait kondisi Jawa abad ke-14. Selain itu, keberadaan berita asing dapat menguatkan para epigraf dan sejarawan dalam melakukan analisis data prasasti sekaligus mengguratkan tulisan dalam historiografi yang lebih akurat.

Tidak berbeda jauh, Anis Fitri Rachmawati dan Deny Yudo Wahyudi menggunakan nisan-nisan Islam di Troloyo untuk menunjukkan kemajemukan sosial di Majapahit. Keberadaan nisan-nisan tersebut menjadi bukti adanya komunitas Islam di Majapahit. Kronik Cina juga mengabarkan hal yang sama. Ada tiga komunitas yang

buku ini tidak diperjualbelikan

bermukim di Jawa pada masa Majapahit. Pertama, orang-orang Cina yang menetap di sana untuk sementara waktu. Kedua, para pedagang dari negeri lain yang tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama (ada kemungkinan terdapat komunitas pedagang Muslim dan India). Ketiga, tentu penduduk lokal.

Terakhir, kehadiran dan pengaruh Eropa terutama Belanda di Pasuruan dijelaskan oleh Erza Sahrul Mubarok. Pasuruan terletak di pesisir utara Jawa yang memungkinkan para pedagang dari berbagai daerah untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Pasuruan menjadi tempat persemaian budaya kolonial. Identitas Pasuruan dapat dilihat dari keberadaan bangunan Indis. Alfan Fikril Hakim menguraikan perkembangan kota kolonial Pasuruan. Perkembangan itu tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik dan ekonomi di wilayah koloni. Selain itu, perubahan Pasuruan menjadi kota kolonial tidak dapat dilepaskan dari kemajuan industri gula di wilayah tersebut. Selain itu, artikel itu juga ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan relasi industri gula dengan keberadaan arsitektur bangunan Indis dan gaya hidup masyarakat.

A. REFERENSI

Evers, H.-D. (1988). Traditional trading networks of Southeast Asia. *Asian Trade Routes*, *35*, 89–100.

Groeneveldt, W. P. (2009). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.

Jackson, G. (2001). The significance of unimportant ports. *International Journal of Maritime History*, *13*(2), 1–17.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

Lapian, A. (2011). *The significance of uniportanr ports*. KPG.

Pinto, S. (2016). Seaports as nodes in a 16th century trade network, The Simon Ruiz Business Company. In *A. Polonia & C. Antunes. 2016. Seaports in the First Global Age: Portuguese Agents, Networks, and Interactions 1500-1800*. U. Porto Edicoes.

Polanyi, K. (1957). The economy as instituted process. In *K. Polanyi, C. M. Arensberg, H. W. Pearson (Eds). Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*. Free Press.

buku ini tidak diperjualbelikan

Polonia, A. (2006). Northwest Portuguese seaport system in the early modern age: Results of a research project. *XIV International Economic History Congress, Helsinki 2006, Session 58*, 1–27.

Polonia, A., Pinto, S., & Ribero, A. S. (2014). Trade networks in the first global age. The case study of Simóm Ruiz Company: Visualization methods and spatial projections. In *A. C. Solana (Ed). Spatio-Temporal Narratives: Historical GIS and the Study of Global Trading Networks (1500-1800)*. Cambridge Scholars Publishing.

Rodrigues, J., & Santos, F. G. dos. (2019). Maritime and port history: A review. *Almanack*, *21*, 1–7.

Tull, M. (2014). Port history in the International Journal of Maritime History (1989–2012). *The International Journal of Maritime History*, *26*(1), 123–129.

Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I. Capitalist agriculture and the origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Zuhdi, S. (2020). Budaya bahari sebagai modal membangun negara maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, *8*(2), 127–142.

buku ini tidak diperjualbelikan

BAGIAN I

EKONOMI-POLITIK KAWASAN PESISIRAN NUSANTARA

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB II

ANATOMI PRANATA EKONOMI MAJAPAHIT

Deny Yudo Wahyudi, Vita Sabrina Azda, & Labuda Shofiya Ananda

A. Majapahit dari Pedalaman Menuju Kota Pelabuhan

Sebagai kerajaan yang memiliki hegemoni atas kekuasaan wilayah yang luas, khususnya di Asia Tenggara, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit sangat kompleks dan terstruktur (Wahyudi, 2015). Lokasi pusat Majapahit yang berada di sekitar Sungai Brantas menjadi kekuatan untuk berkembang hingga mampu menguasai wilayah pesisir pantai yang kemudian berkembang menjadi kota-kota pelabuhan (Christie, 1992). Selain faktor alam, kemajuan dan perluasan hegemoni Majapahit juga didukung faktor lain seperti kemampuan adaptasi masyarakat dan kebijaksanaan berlandaskan pada aspek religius-magis (Dwiyanto, 1984). Selanjutnya kebijaksanaan tersebut kemudian memengaruhi kelancaran arus dagang dan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan Majapahit.

D. Y. Wahyudi, V. S. Azda, & L. S. Ananda
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: deny.yudo.fis@um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis

Wahyudi, D. Y., Azda, V. S., & Ananda, L. S. (2025). Anatomi Pranata Ekonomi Majapahit. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (11–28). Penerbit BRIN
DOI: 10.55981/brin.1031.c918, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

Pentingnya kelancaran arus dagang bagi perkembangan suatu kota atau kerajaan di masa kuno (Dwiyanto, 1984) memperlihatkan bahwa aspek ekonomi memegang peranan penting terhadap ketahanan dan perkembangan Majapahit. Oleh karena itu, diseminasi informasi mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menjadi penting untuk dilaksanakan. Guna mendapatkan informasi mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit terdapat beberapa aspek dari anatomi pranata ekonomi (Majapahit), yakni berupa pelaku ekonomi, aktivitas ekonomi, dan sarana fisik pranata ekonomi (Rahardjo, 2011), sehingga kemudian akan didapatkan informasi mengenai sisa-sisa aktivitas ekonomi yang dilaksanakan masyarakat Majapahit.

Fokus pembahasan pada bagian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah arkeologis sejarah yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat masa lampau melalui fitur, artefak, dan ekofak yang dihasilkan masyarakat masa lampau pada masa sejarah (Pusat Penelitian Arkeologi, 1999). Data yang dipergunakan adalah prasasti, relief candi, fragmen, temuan lepas, serta pula kesusastraan yang sezaman. Dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pengumpulan data lapangan, tahap analisis data, dan tahap rekonstruksi, yakni upaya rekonstruksi kehidupan ekonomi Majapahit berdasarkan hasil analisis data-data arkeologis.

B. Para Pelaku Ekonomi Majapahit

Tidak jauh berbeda dengan sistem birokrasi (politik), pola perekonomian Majapahit juga memperlihatkan adanya keberlanjutan dari pranata ekonomi yang terbentuk pada periode sebelumnya (Rahardjo, 2011; Wahyudi, 2015). Baik pranata yang telah terbentuk pada masa Kerajaan *Mdang,* Kadiri, hingga Singhasari. Anatomi pertama menunjukkan adanya keberlanjutan tersebut adalah keberadaan para pelaku ekonomi, utamanya para pelaku ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi.

Pelaku ekonomi pertama yang banyak disebut dalam prasasti maupun kesusastraan adalah petugas pemungut pajak yang berkaitan

buku ini tidak diperjualbelikan

dengan pengaturan hak milik raja atau *drawya haji* (Kulke, 1991). Mereka bertugas memungut pajak (hak milik raja) atau *mangilala drawya haji* dari warga keraton (pada masa Kerajaan *Mdang* disebut sebagai *watak i jro*) yang memiliki kewajiban membayar pajak (Rahardjo, 2011). Jabatan petugas pemungut pajak tersebut kiranya dapat ditemui pada beberapa prasasti, terutama prasasti perihal perpajakan, penetapan *sima,* dan pembebasan pajak bagi tanah *sima.*

Pada periode yang lebih tua, jabatan petugas pemungut pajak telah disinggung pada Prasasti Kalasan (700 Saka atau 778 M) yang dibuat sebagai penanda pendirian *sima* dan pembebasan pajak bagi Desa Kalasa (Trigangga *et al*., 2015). Prasasti tersebut kiranya menyebut tiga jabatan petugas pemungut pajak, yakni *pangkura, tavana,* dan *tiriva* (Santiko, 2015) atau yang dikenal sebagai *pankur, tawan,* dan *tirip* (Rahardjo, 2011). Pada era Majapahit, ketiga jabatan ini biasanya disebut secara bersamaan dengan istilah *sang mana katrini* atau *manak katrini* (Pigeaud, 1962), misalnya pada beberapa lempeng Prasasti Balawi (1305 M) dan Pamintihan (1473 M).

Para petugas pemungut pajak juga tergolongan pejabat di lingkungan pusat yang secara hierarki bekerja di bawah pengawasan seorang *rakai,* biasanya *rakai kanuruhan* (Setiawan, 2022), sedangkan dalam pelaksanaannya pejabat pemungut pajak tidak dapat dilepaskan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menarik pajak dari daerah bawahannya (*watek, wanua,* atau *thani*). Meliputi pajak perdagangan dan pajak hasil bumi (Lutfillah *et al*., 2015), serta pajak tanah dan pajak hasil usaha (Wardana, 2017).

Selain pejabat pemungut pajak, pelaku ekonomi lain yang juga berkaitan dengan *drawya haji* (hak milik raja) adalah pihak-pihak yang memiliki dibebankan membayar pajak maupun upeti. Biasanya meliputi warga keraton (*watak i jro*) dan pihak asing yang berada di lingkungan kerajaan, di antaranya kelompok perajin dan pekerja seni yang berkewajiban membayar pajak hasil usaha baik barang maupun jasa (Wardana, 2017). Dalam Prasasti Balawi (1305 M) yang merupakan prasasti Raden Wijaya (Trigangga *et al*., 2015), beberapa profesi yang tergolong sebagai perajin dan pekerja seni disebut secara eksplisit

buku ini tidak diperjualbelikan

dengan sebutan *wargga kilalan* (Maziyah, 2019), misalnya *manapus* (pembuat benang), *mandyun* (pembuat tempayan), dan *magawe kisi* (pembuat kayu) yang tergolong sebagai perajin maupun *awayang* (pemain wayang) yang tergolong sebagai pekerja seni (Boechari, 1985).

Data arkeologis mengenai pemungutan pajak juga memberikan informasi terkait keberadaan pelaku ekonomi lainnya, yakni para pedagang, misalnya keberadaan pedagang lokal yang berkaitan dengan penyebutan beberapa jenis barang dagang dan aktivitas perniagaan, yakni pada Prasasti Katiden (1317 M) tentang pajak bagi penjualan beras (Lutfillah *et al*., 2015); Prasasti Biluluk (1366 M) mengenai penetapan pembayaran komoditas garam (Kurnianingtyas & Hayati, 2022); dan Prasasti Karang Bogem (1387 M) tentang pajak tambak garam di wilayah Gresik (Groneveldt *et al*., 2009; Lutfillah *et al*., 2015). Terdapat pula kelompok pedagang regional (dari wilayah Nusantara) dan pedagang dari tanah asing yang terekam pada Prasasti Balawi (1305 M) dan Prasasti Warunggahan (1305 M) sebagai orang-orang *khmer* yang singgah di wilayah pesisir dan beberapa melakukan perniagaan dengan pedagang lokal (Alnoza, 2021).

Pelaku ekonomi berikutnya adalah petani dan pejabat pertanian (Christie, 1992). Dalam beberapa sumber (khususnya prasasti), keberadaan profesi petani selalu dikaitkan dengan lahan yang digarap, seperti *sawah* (sawah), *gaga* (ladang), *kbuan* (kebun), dan *renek* (rawa) (Rahardjo, 2011), misalnya pada Prasasti Tuhanaru (1323 M) yang menyebut lahan sawah di Desa Tuhanaru dan Prasasti Palungan atau Padlengan III (1330 M) yang menyebutkan lahan pertanian, seperti *tegalan, sawah,* lembah, dan bukit di Desa Padlengan (Trigangga *et al*., 2015). Terdapat pula beberapa petugas pertanian seperti petugas pengawas dan pengontrol bendungan (*matamwak*), petugas pengawas jembatan (*hulu wuattan* atau *hulu wwatan*), petugas pengatur air (*hulu wras*), petugas irigasi (*hulu air* atau disebut pula *huler*), dan petugas perhitungan musim yang berperan dalan perhitungan masa tanam hingga panen yang disebut sebagai *wariga* (Anwari, 2015).

buku ini tidak diperjualbelikan

C. Aktivitas Ekonomi Masyarakat Majapahit

Pada aktivitas produksi, sektor pertanian dan perkebunan menjadi bagian dari kegiatan produksi yang berlangsung di tengah masyarakat Majapahit yang agraris. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan relief umpak batu yang menggambarkan kegiatan *tandur* atau menanam padi di sawah serta salah satu relief pada dinding Candi Panataran yang merekam kegiatan membajak sawah menggunakan dua ekor sapi/kerbau (Siswanto, 2014). Aktivitas produksi yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga juga tergambar pada relief umpak batu di Museum Trowulan, yakni dalam bentuk seseorang yang sedang menanak nasi di dapur (lihat Gambar 2.1).

Keterangan: Relief umpak batu bergambar kegiatan produksi masyarakat Majapahit, yakni menanam padi (kiri) dan menanak nasi (kanan), yang kini tersimpan di Museum Trowulan, Mojokerto.
Sumber: Siswanto (2014)

Gambar 2.1 Relief Menanam Padi dan Menanak Nasi

Dalam bidang perburuan, salah satu adegan menjerat binatang buruan digambarkan pada bejana *terracotta* yang kini disimpan di Museum Pusat Informasi Majapahit di Trowulan (Siswanto, 2014; lihat

buku ini tidak diperjualbelikan

Gambar 2.3). Aktivitas produksi dalam bidang berburuan juga disinggung dalam naskah Kakawin Desawarnanan (Kitab Negarakertagama) pupuh L (1) Bahwa raja Majapahit melakukan perburuan di hutan Nandawa dengan membawa senjata yang lengkap, menaiki kuda dan kereta (Pigeud, 2013).

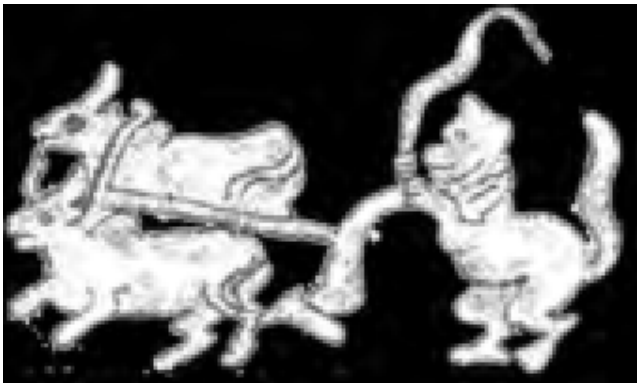

Keterangan: Ilustrasi dari relief bergambar kegiatan membajak sawah yang terpahat di dinding Candi Panataran.
Sumber: Siswanto (2014)

Gambar 2.2 Relief Membajak Sawah

Keterangan: Pahatan bergambar adegan perburuan pada bejana *teraccota* Majapahit yang tersimpan di Museum Trowulan.
Sumber: Siswanto (2014)

Gambar 2.3 Adegan Perburuan pada Bejana *Terracotta*

buku ini tidak diperjualbelikan

Selain melangsungkan kegiatan produksi, masyarakat Majapahit juga tergolong masyarakat yang memiliki aktivitas distribusi yang dinamis. Berupa kegiatan perdagangan, perpajakan dan upeti, serta upacara saling memberi (Rahardjo, 2011). Dalam bidang perdagangan aktivitas pendistribusian barang biasanya berlangsung di pasar atau yang disebut sebagai *pken*. Situasi perniagaan tersebut kiranya terekam pada relief koleksi Museum Trowulan yang menggambarkan beberapa perempuan yang sedang duduk di bawah pohon sambal menjajakan dagangannya (Siswanto, 2014; lihat Gambar 2.4).

Keterangan: Relief perempuan yang sedang melakukan jual beli (berdagang) di bawah pohon.
Sumber: Siswanto (2014)

Gambar 2.4 Relief Perempuan Berdagang

Aktivitas distribusi juga berlangsung melalui kegiatan pemungutan pajak atau *drawya haji* dan kegiatan upacara saling memberi. Beberapa prasasti, seperti Prasasti Pamintihan, Prasasti Canggu, dan Prasasti Balawi, memberikan informasi perihal tata-kelola pemungutan pajak, pembebasan pajak, dan juga penetapan *sima* di suatu *wanua* atau *trhani*, sedangkan aktivitas distribusi dalam bentuk upacara saling memberi dilakukan dengan memberikan hadiah, baik dalam wujud *sima* maupun barang-barang berharga (*pasek-pasek*).

buku ini tidak diperjualbelikan

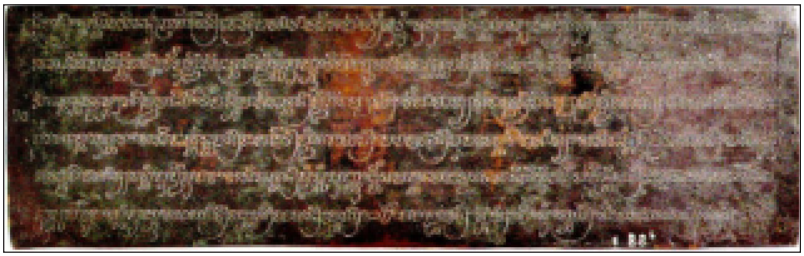

Keterangan: Prasasti Pamintihan berangka tahun 1395 Saka atau 14 Mei 1473 Masehi.
Sumber: Trigangga (2015)

Gambar 2.5 Prasasti Pamintihan

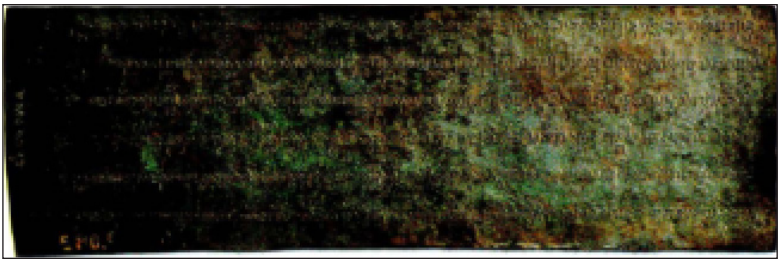

Keterangan: Prasasti Balawi berangka tahun 1227 Saka atau 24 Mei 1305 Masehi yang ditemukan di sekitar Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
Sumber: Trigangga (2015)

Gambar 2.6 Prasasti Balawi

Masyarakat Majapahit juga melakukan aktivitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meliputi kegiatan (1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana umum, (2) Pembiayaan pegawai kerajaan, (3) Melangsungkan upacara kerajaan, (4) Biaya peperangan dan ekspedisi, dan (5) kegiatan konsumsi untuk pemenuhan gaya hidup (Rahardjo, 2011). Kegiatan pertama terwujud dalam pembangunan candi sebagai tempat peribadatan; pembangunan sarana pertanian seperti jembatan, bendungan dan saluran air; serta pembangunan keraton sebagai pusat kerajaan. Berkaitan dengan gaya hidup, masyarakat Majapahit membeli barang-barang yang bersifat mewah seperti pakain dan perhiasan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kedudukan seseorang, khususnya dalam hal politik.

buku ini tidak diperjualbelikan

D. Sarana Fisik Pranata Ekonomi Majapahit

Eksistensi sarana fisik dalam pranata ekonomi Majapahit tentunya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas ekonomi secara kompleks, yakni produksi, distribusi, serta konsumsi. Keberadaan sarana fisik pranata ekonomi (Majapahit) yang dapat ditemui hingga saat ini juga memberikan banyak informasi mengenai kehidupan ekonomi (masyarakat Majapahit) sekaligus memperkuat argumen bahwa masyarakat Majapahit mampu bertahan dan berkembang melalui ekonomi agraris yang kokoh di pedalaman hingga kemudian mampu mendominasi wilayah pesisir (Christie, 1992). Tidak cukup pada wilayah regional, hubungan politik maupun perdagangan Majapahit juga terjalin dengan beberapa negara (di wilayah Asia Tenggara) yang disebut sebagai *mitra satata* (Utomo, 2009a).

Salah satu bangunan pertanian yang merupakan salah satu jenis sarana fisik dalam aktivitas ekonomi yakni produksi yang dilaksanakan masyarakat Majapahit pada abad ke 13–14 Masehi dapat ditemui di Dusun Nglinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Temuan saluran air (Nglinguk) sepanjang 56,92 meter yang terletak di tengah area persawahan ini merupakan salah sarana fisik yang juga mengindikasikan keberadaan waduk atau saluran kuno di sekitar pusat Kerajaan Majapahit (Trowulan) (lihat Gambar 2.7).

Keterangan: Jejak salah satu sarana fisik ekonomi Majapahit dalam berupa saluran air di Dusun Nglinguk, Desa Trowulan, Mojokerto.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (2017)

Gambar 2.7 Saluran Air Nglinguk

buku ini tidak diperjualbelikan

Pembangunan kanal dan waduk di masa Majapahit, khususnya di wilayah sekitar Trowulan merupakan upaya adaptasi masyarakat Majapahit. Lokasi Trowulan yang berada pada bentang kipas aluvial menjadikan sungai-sungai di sekitarnya dengan mudah dan cepat mengalami pendangkalan, sehingga kanal maupun waduk kemudian dibangun sebagai pengendali banjir untuk menyelamatkan kota dan lahan pertanian (Riyanto, 2004). Selain berada di area pusat kerajaan yakni Trowulan (Mojokerto), pembangunan kanal dan banguna pengendali air juga ditemui di wilayah lain di sekitar Mojokerto yakni Jombang.

Temuan kanal di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Jombang sedalam 1,5 m dari permukaan tanah ternyata terhubung dengan bekas bangunan petirtaan. Dugaan bahwa petirtaan dan kanal di Desa Kesamben tersebut merupakan tinggalan masyarakat era Majapahit didasarkan pada tipologi dimensi bata penyusun yang digunakan, serta temuan tembikar bergaya Majapahit, *fragmen porcelain* serta mata-uang dari dinasti Yuan yang memperkuat perkiraan bahwa petirtaan ini berasal dari masa Majapahit (abad 13–15 Masehi) (lihat Gambar 2.8).

Keterangan: Saluran air berupa kanal dan petirtaan di Desa Kesamben, Ngoro, Jombang, yang memiliki tipologi dimensi penyusun bata mirip dengan bangunan Majapahit.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (2019)

Gambar 2.8 Situs Kanal dan Petirtaan Desa Kesamben

buku ini tidak diperjualbelikan

Selain bangunan pengendali air, lahan pertanian juga merupakan sarana fisik dalam aktivitas produksi masyarakat Majapahit, meliputi *sawah* (sawah), *gaga* (ladang), *kabuan* (kebun), maupun *renek* (rawa). Keberadaan lahan pertanian sebagai sarana pertanian era Majapahit disinggung pada beberapa prasasti perihal penetapan tanah *sima, m*isalnya Prasasti Tuhanaru (1323 M) yang memuat keberadaan *sawah* di Desa Tuhanaru dan Prasasti Palungan (1330 M) yang menyinggung adanya ladang kosong untuk pertanian berupa sawah, lembah, dan bukit di Desa Padlengan (Trigangga *et al*., 2015). Penggambaran sawah pada masa Majapahit juga terdapat pada relief koleksi Museum Trowulan (Gambar 2.9).

Keterangan: Salah satu sarana fisik aktivitas produksi yakni bentang lahan pertanian berupa sawah yang ditanami beberapa tanaman tergambar pada relief umpak batu Koleksi Museum Trowulan.
Sumber: Siswanto (2014)

Gambar 2.9 Relief Sawah

Selanjutnya dalam aktivitas distribusi, masyarakat Majapahit menggunakan sarana fisik berupa *pken* dan tentunya Pelabuhan. Keberadaan *pken* atau pasar di era Majapahit terekam dalam Naga-

buku ini tidak diperjualbelikan

rakrtagama pupuh 12(3) bahwa posisi *pken* berdekatan dengan lokasi penting lain (Pasangrahan Wengker dan Narapati) di lingkungan sekitar Keraton Majapahit (Alit *et al*., 2022) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daerah sekitarnya (Muljana, 1979). Tentunya tidak hanya di wilayah sekitar Trowulan yang merupakan pusat kerajaan, informasi mengenai keberadaan *pken* di masa Majapahit juga terekam dalam pahatan relief di kompleks Candi Penataran di Blitar (lihat Gambar 2.10).

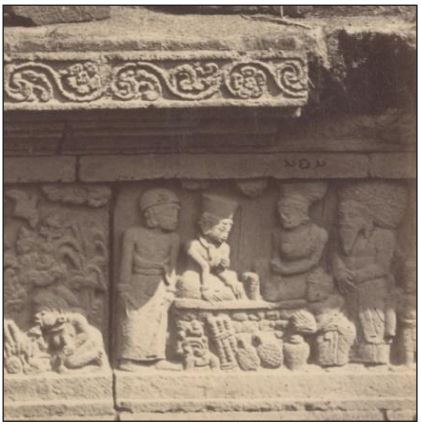

Keterangan: Gambaran suasana *pken* atau pasar pada relief dinding Candi Panataran.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (2019)

Gambar 2.10 Relief Pasar di Candi Panataran

Sebagai kerajaan yang berperan aktif dalam jaringan perdagangan skala internasional tentu berkaitan dengan pengadaan pelabuhan sebagai sarana penunjang aktivitas perekonomian. Pelabuhan dagang era Majapahit sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yakni pelabuhan pantai dan sungai (pedalaman). Salah satu prasasti dengan periode lebih tua yakni Prasasti Kambang Putih, yang dikeluarkan pada masa Raja Mapanji Garasakan (abad ke-11 Masehi), menyebutkan eksistensi salah satu pelabuhan pantai yakni Pelabuhan Kambang Putih yang

buku ini tidak diperjualbelikan

difungsikan sebagai *collecting center,* atau tempat menampung berbagai jenis komoditas dari wilayah pedalaman atau *feeder port/ feeder points* (Khasanah, 2017a). Pelabuhan ini kemudian berkembang menjadi *entrepot* yang berfungsi sebagai tempat singgah pedagang lokal, regional, dan pedagang asing.

Keberadaan pelabuhan sebagai sarana perdagangan juga dapat ditemui di pedalaman Majapahit. Dalam Prasasti Canggu (1358 M) menyebutkan keberadaan Pelabuhan Canggu yang letaknya diperkirakan di antara desa-desa sepanjang delta Sungai Brantas (Sanjoyo, 2019). Pelabuhan yang letaknya di pedalaman ini berperan sebagai jalan penyeberangan desa-desa dari hulu hingga hilir sungai, sekaligus sebagai *collecting center.*

Berkaitan dengan lalu lintas perdagangan, baik di pesisir maupun pedalaman maka sarana fisik berupa alat angkut juga menjadi hal cukup penting peranannya. Salah satu relief pada dinding Candi Panataran memberikan gambaran alat angkut yang digunakan di wilayah pedalaman (daratan) berupa kereta beroda yang ditarik oleh kuda, beberapa juga sapi, gajah, ataupun kerbau (Siswanto, 2014). Sementara di wilayah pesisir alat angkut yang digunakan adalah kapal atau perahu. Perkembangan teknologi perkapalan tersebut kiranya terekam pada salah satu relief pada Teras Candi Panataran (lihat gambar 11).

Keterangan: Ilustrasi salah satu relief Candi Panataran yang memperlihatkan bentuk transportasi darat dan air yang diperkirakan digunakan pada masa Majapahit, yakni berupa kereta berkuda sebagai transportasi darat dan relief perahu sebagai transportasi perairan.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (2019)

Gambar 2.11 Relief kereta berkuda dan Relief Perahu Majapahit

buku ini tidak diperjualbelikan

Proses dagang di pelabuhan Majapahit tentunya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan mata-uang tertentu. Hal tersebut kemudian menjadikan uang merupakan sarana fisik dalam pranata ekonomi (Majapahit). Selain sebagai alat tukar, uang memiliki fungsi yang kompleks, yakni sebagai penyimpan kekayaan, standar pembayaran, dan kesatuan hitung. Kompleksitas fungsi tersebut juga berlaku di masa Majapahit. Jenis uang yang beredar di Majapahit pada abad ke-14 Masehi cenderung beragam, meski didominasi mata uang tembaga, kuningan, serta timah yang kemudian disebut sebagai mata uang pisis atau gobog (Trigangga *et al*., 2003). Beberapa jenis uang lain juga ditemukan berbahan logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu (lihat Gambar 2.12).

Keterangan: Bentuk Uang Ma berbahan emas ataupun perak dan Uang Gobog yang memiliki bentuk lobang pada bagian tengah.
Sumber: Trigangga *et al*. (2003)

Gambar 2.12 Uang Ma dan Uang Gobog

E. Penutup

Analisis mengenai anatomi pranata ekonomi Majapahit meliputi para pelaku ekonomi masa Majapahit, aktivitas ekonomi masyarakat Majapahit, dan sarana fisik yang dipergunakan dalam kegiatan perekonomian memberikan informasi penting mengenai kehidupan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah Pulau Jawa bagian timur. Aktivitas ekonomi yang kompleks hingga pembangunan sarana yang memadai dan terintegrasi merupakan representasi dari kecerdasan dan kebijaksanaan masyarakat yang kemudian mengantarkan Majapahit dapat secara stabil memperluas hegemoninya, baik pada skala regional maupun internasional. Kemampuan masyarakatnya

buku ini tidak diperjualbelikan

untuk bertahan di wilayah pedalaman hingga mampu memenuhi *demand* pasar global ketika itu merupakan faktor yang signifikan memengaruhi perkembangan pesat Majapahit dari abad ke-14–15 Masehi. Keberagaman profesi mulai dari sektor perpajakan, industri, pertanian, hingga perdagangan yang diimbangi dengan aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang dinamis dan stabil turut mengantarkan perekonomian Majapahit sebagai perekonomian yang maju pada masanya.

Eksistensi sarana fisik ekonomi yang hingga saat ini dapat ditemui dan terus dikaji juga merupakan bukti bahwa Majapahit merupakan kerajaan besar dengan perekonomian berbasis agraris sekaligus maritim yang kuat pada periode klasik Hindu-Buddha di Nusantara. Keberadaaan bandar-bandar atau dapat dipahami pula sebagai pelabuhan dagang pada era Majapahit juga menunjukkan adanya keberlangsungan sejak periode sebelumnya. Dibuktikan dengan eksistensi beberapa bandar dagang seperti Kambang Putih yang terekam dalam Prasasti Canggu dari era Raja Mapanji Garasakan (abad ke 11 Masehi). Konsep mengenai hierarki (tingkatan) bandar dagang berdasarkan perannya juga sudah dikenal oleh masyarakat maritim Majapahit, meliputi bandar dagang yang berperan sebagai *feeder port* (pelabuhan dalam), *collecting center* (pelabuhan pengumpul), hingga *entreport* (pelabuhan pantai) yang berperan sebagai pelabuhan utama yang menjadi *plotting* penting bertemunya pedagang lokal, regional, dan asing (mancanegara). Hierarki tersebut memiliki kesamaan dengan hierarki bandar-bandar dagang pada masa Sriwijaya, di mana *feeder port* Sriwijaya juga diperkirakan berada di daerah aliran sungai (DAS) pedalaman, seperti DAS Ogan Komering Ilir, Musi, Rawas, Muara Enim, dan Lahat (Purwanti, 2018). Sementara di Majapahit, *feederport* tumbuh dari desa-desa di sepanjang DAS Brantas dan Bengawan Solo yang kemudian dikenal sebagai *naditira pradeca.*

Kemudian bandar dagang Sriwijaya dengan tipe *collecting centres* berada di daerah vasal atau daerah di bawah kepemimpinan Sriwijaya, seperti Bangka, Lampung, Jambi, Kedah, dan Barus (Wade, 2009), yang kemudian terhubung dengan Palembang sebagai *entreport* atau

buku ini tidak diperjualbelikan

bandar dagang utama. Pola jaringan bandar dagang yang membentuk hierarki ini menunjukkan bahwa perkembangan mengenai sistem bandar dagang atau pelabuhan selayaknya pelabuhan modern di Eropa telah dikenal oleh masyarakat maritim di Nusantara, utamanya di Sriwijaya yang terpusat di Semenanjung Malaya dan Majapahit sebagai kerajaan maritim dan agraris di Jawa.

F. Referensi

Alit, D. M., Pramartha, I. N. B., Lewa, G. S. S., Darmada. I Made, & Udiyani, I. A. P. S. (2022). Negarakertagama: Kisah keagungan Kerajaan Majapahit. *Jurnal Nirwarsita*, *3*(1), 31–42.

Alnoza, M. (2021). Orang Khmer di Jawa pada masa Hindu-Buddha (abad ke-9-15 masehi): Eksistensinya dipandang dari teori diaspora. *Naditira Widya*, *15*(1), 1–14.

Anwari, I. R. M. (2015). Sistem perekonomian Kerajaan Majapahit. *VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan*, *3*(2), 104–115.

Boechari. (1985). *Prasasti koleksi Museum Nasional: Jilid I*. Museum Nasional.

Christie, J. W. (1992). Trade and value in pre-Majapahit Java. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, *21*(59–60), 3–17.

Dwiyanto, D. (1984). Peranan jaringan air pada kota - kota Kuna di Asia Tenggara. *Berkala Arkeologi*, *5*(2), 17–35.

Groneveldt, W. P., Triwira, G., & Kwa, D. (2009). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.

Khasanah, L. I. (2017). Pelabuhan Kambang Putih pada masa Majapahit tahun 1350-1389. *Journal Pendidikan Sejarah*, *5*(2), 402–417.

Kulke, H. (1991). Epigraphical references to the "city" and the "state" in early Indonesia. *INDONESIA*, *52*, 3–22.

Kurnianingtyas, W., & Hayati, C. (2022). Telisik pola perdagangan Desa Trowulan abad XII-XV sebagai landasan pembangunan di Mojokerto. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, *24*(2), 107.

Lutfillah, N. Q., Sukoharsono, E. G., Mulawarman, A. D., & Prihatiningtias, Y. W. (2015). The existence of accounting on local trade activity in the Majapahit Kingdom (1293 AD -1478 AD). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *211*, 783–789.

buku ini tidak diperjualbelikan

Maziyah, S. (2019). Penetrasi budaya wargee Dalem dan warga Kilalan dalam konstruksi masyarakat Jawa Kuna. *ENDOGAMI: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, *2*(2).

Muljana, S. (1979). *Tafsir sejarah Negarakertagama*. LKiS.

Pigeud, T. (1962). The royal progresses of 1360 and 1361 to Tirib, Sompur and Blitar. In *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History: Vol. IV* (pp. 161–168). Springer Science & Business Media.

Pigeud, T. G. (2013). *Java in the 14th Century: A study in cultural history*. Springer Science & Business Media.

Purwanti, R. (2018). Damar dalam jaringan perdagangan masa Kerajaan Sriwijaya. *Balai Arkeologi Sumatera Selatan*, 1–10.

Pusat Penelitian Arkeologi. (1999). *Metode penelitian arkeologi*. Pusat Penelitian Arkeologi.

Rahardjo, S. (2011). *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir.* Komunitas Bambu.

Riyanto, S. (2004). Trowulan sebagai historic city: Mengkonstruksi citra melalui pengelolaan informasi. *Berkala Arkeologi*, *24*(1), 87–100.

Sanjoyo, M. P. (2019). Canggu: Pelabuhan Sungai masa Majapahit Abad XIV-XVI. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, *10*(2), 402–417.

Santiko, H. (2015). Dua dinasti Kerajaan Mataram Kuna: Tinjauan prasasti kalasan. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, *7*(2), 1–7.

Setiawan, Y. (2022). Pajak (upeti) Majapahit (Wilwatikta) dalam meningkatkan ekonomi di era otonomi. *Journal Kompilasi Hukum*, *7*(2).

Siswanto. (2014). Potret-potret kearifan lingkungan masa lalu dalam relief dan sastra tertulis. In *Majapahit: Batas Kota dan Kejayaan di Luar Kota*. Kepel Press.

Trigangga, Satriana, R., Istiqomah, Retno, D., Hidayat, O. R., Daromi, M., Widodo, Rozali, A., & Sutrisno. (2003). Mata uang sebagai sumber sejarah Indonesia. In *Museum Nasional*.

Trigangga, Wardhani, F., & Retno W, D. (2015). *Prasasti dan raja-raja Nusantara*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Utomo, B. B. (2009). Majapahit dalam lintas pelayaran dan perdagangan Nusantara. *Berkala Arkeologi*, *29*(2), 1–14.

Wade, G. (2009). An early age of commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE. *Journal of Southeast Asian Studies*, *40*(2), 221–265. https://doi.org/10.1017/S0022463409000149

buku ini tidak diperjualbelikan

Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: Dinamika dalam sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, *7*(1), 88–95.

Wardana, I. G. W. W. (2017). Birokrasi tradisonal Kerajaan Majapahit. *Social Studies*, *5*(2), 1–12.

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB III

NADITIRA PRADECA: JEJAK BANDAR-BANDAR DI ERA MAJAPAHIT

Slamet Sujud Purnawan Jati & Vinda Regita Cahyani

A. Kejayaan Sektor Agraris dan Maritim Majapahit

Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 M setelah runtuhnya Singhasari akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kerajaan Kadiri. Terdapat temuan bahwa Raden Wijaya membangun kerajaannya di kawasan hutan di sekitar daerah aliran Sungai Brantas, yaitu di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan begitu, Majapahit menguasai wilayah di antara lembah Sungai Brantas hingga daerah Bengawan Solo dan menjadikan aliran sungai sebagai sumber penghidupan masyarakatnya (Rahmawati *et al*., 2019; Kurnianingtyas & Hayati, 2022).

Majapahit mencapai puncak kejayaanya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dari tahun 1350 M sampai 1389 M. Pada masa tersebut

S. S. P. Jati & V. R. Cahyani
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: slamet.sujud.fis@um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis

Jati, S. S. P. & Cahyani, V. R. (2025). Anatomi Pranata Ekonomi Majapahit. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Naditira Pradeca: Jejak Bandar-Bandar di Era Majapahit (29–42). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1514, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada dalam mewujudkan cita-cita mempersatukan wilayah-wilayah yang berada di Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Berdasarkan Kakawin Nagarakrtagama pupuh XIII–XV, wilayah kekuasaan Majapahit saat itu sangatlah luas meliputi hampir seluruh wilayah di Nusantara termasuk beberapa wilayah di Asia Tenggara. Selain itu, Majapahit juga memiliki hubungan baik dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam (Setiawan, 2022).

Puncak Kejayaan Majapahit, khususnya pada sektor agraris maupun maritim, tidak terlepas dari dukungan lingkungan geografisnya. Ibu kota Majapahit terletak di daerah Trowulan yang dikelilingi dengan aliran sungai dan beberapa gunung berapi, menjadikan lingkungan alam Majapahit sangat subur dan mendukung perolehan komoditas alam yang melimpah (Anwari, 2015). Namun, lingkungan alam tersebut juga menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan masyarakat Majapahit. Bencana banjir akibat luapan Sungai Brantas sering kali terjadi dan berdampak pada aktivitas pertanian, perdagangan, bahkan kegiatan religi, sehingga Pemerintah Majapahit melakukan tata kelola air seperti pembuatan waduk, kolam, kanal-kanal, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi banjir sekaligus pengelolaan irigasi untuk kegiatan pertanian (Adrisijanti, 2014). Pemanfaatan dan penataan kekayaan alam berdampak pada melimpahnya komoditas dagang. Komoditas tersebut didistribusikan ke berbagai tempat dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai jalur perdagangan. Lambat laun jalur perdagangan semakin ramai dan muncul pelabuhan sungai atau desa di tepian sungai yang dikenal sebagai *naditira pradeca* (Sanjoyo, 2020).

Oleh karena itu, fokus bahasan ini mencoba untuk menganalisis *naditira pradeca* sebagai jejak bandar-bandar dagang di era Majapahit. Pembahasan mengenai Majapahit sejauh ini lebih didominasi pada letak ibu kota, tinggalan-tinggalan kerajaan seperti candi dan bangunan irigasi, serta birokrasi politik Majapahit. Adapun pembahasan mengenai jejak keberadaan bandar-bandar dagang di era Majapahit masih terbatas dan belum menampilkan keberadaan *naditira pradeca*

buku ini tidak diperjualbelikan

yang saat itu menjadi salah satu faktor penting penunjang kemajuan Majapahit. Potensi *naditira pradeca* dalam menyumbang kekayaan Majapahit, membuatnya memiliki berbagai hak istimewa yang dimuat pada Prasasti Canggu (Prasasti Trowulan I) (Fitrotin, 2014), sehingga pada bagian ini berusaha membahas apa yang disebut sebagai *naditira pradeca* dan bagaimana perannya dalam menunjang kegiatan maritim di era Majapahit, khususnya meliputi lingkungan geografis pusat Kerajaan Majapahit dan *naditira pradeca* sebagai jejak bandar-bandar dagang di era Majapahit.

B. Lingkungan Geografis Pusat Kerajaan Majapahit

Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M sampai 1500 M dan mencapai puncak kejayaanya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 M sampai 1389 M. Sebagai kerajaan yang besar, kekuasaan Majapahit terbentang mulai dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan (Safitri, 2015). Terlepas dari wilayah kekuasaan yang luas, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah kekuasaan tersebut tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat dari Kerajaan Majapahit, melainkan terhubung satu sama lain melalui monopoli perdagangan oleh raja yang berkuasa (Setiawan, 2022).

Secara geografis, lokasi pusat Majapahit ada di dekat Trowulan sekitar kurang lebih 10 km dari baratdaya Kota Mojokerto. Asumsi ini berdasar pada banyaknya temuan-temuan seperti adanya pondasi bangunan, candi, gapura, *reservoir* air, dan umpak-umpak rumah. Selain itu juga ditemukan barang-barang pakai, perhiasan, dan patung-patung yang saat ini masih dapat dilihat di Museum Arkeologi Trowulan (Daldjoeni, 1992). Lokasi pusat Majapahit terletak pada kawasan yang strategis, yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Sungai Brantas, di bagian barat berbatasan dengan Sungai Gunting, kemudian di bagian timur berbatasan dengan Sungai Brangkal, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Gunung Anjasmoro, Gunung Welirang, dan Gunung Arjuna (Anwari, 2015; lihat Gambar 3.1). Hal

buku ini tidak diperjualbelikan

tersebut menjadikan daerah pusat Majapahit berada pada lembah yang subur, namun juga rawan akan dampak bencana alam.

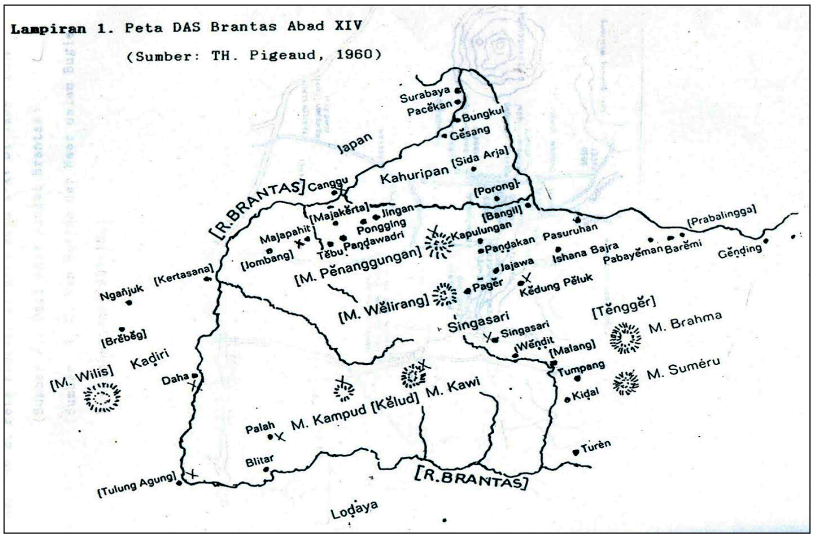

Keterangan: Peta kawasan strategis Majapahit yang dikelilingi Sungai Gunting, Sungai Brangkal, dan Sungai Brantas serta Gunung Welirang, Gunung Anjasmoro, dan Gunung Arjuna.
Sumber: Pigeud (1962)

Gambar 3.1 Lingkungan Geografis Majapahit

Bencana alam berupa banjir sering kali terjadi karena adanya luapan air dari sungai-sungai besar di sekitar Majapahit. Bencana banjir berdampak pada rusaknya lahan pertanian karena segala jenis tanaman akan mati sehingga merugikan para petani. Selain itu, banjir juga sering kali berdampak pada aktivitas perdagangan, aktivitas religi, bahkan juga berpengaruh pada pendapatan kerajaan dari sektor pajak. Bencana banjir di Sungai Brantas pernah tercatat pada Prasasti Kamalagyan 1307 M yang isinya menyebutkan bahwa adanya pembangunan sebuah bendungan di Wringin Sapta oleh Raja Airlangga bersama dengan rakyatnya karena Sungai Brantas selalu terdampak banjir sehingga airnya meluap ke beberapa desa dan tanah *perdikan* (Sandi, 2015). Kemudian beberapa prasasti seperti Prasasti Harinjing, Wuling, Kandangan, dan Trailokyapuri juga menyebutkan

buku ini tidak diperjualbelikan

adanya usaha pengendalian Sungai Brantas terutama di musim penghujan agar tidak terjadi bencana banjir yang berakibat pada kerusakan lahan pertanian (Anwari, 2015).

Lingkungan geografis yang sedemikian rupa menjadikan Majapahit mengelola lingkungan alamnya. Untuk mengatasi bencana banjir, dibangun waduk-waduk yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok barat laut dan kelompok timur. Pada kelompok barat-laut, pembangunan waduk berfungsi sebagai jalur transportasi air, sedangkan waduk-waduk yang berada pada kelompok timur digunakan untuk penyeimbang debit air sehingga pada saat musim penghujan tidak terjadi banjir dan pada musim kemarau daerah Majapahit tidak dilanda kekeringan. Kemudian, usaha-usaha pemerintahan Majapahit juga dapat dilihat melalui pembuatan kanal-kanal, tanggul sungai, dam, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi banjir sekaligus pengelolaan irigasi untuk kegiatan pertanian (Adrisijanti, 2014). Hal tersebut membuktikan kesadaran membangun sanitasi dan tata kelola air yang cukup maju pada zamannya (Safitri, 2015).

Beberapa tinggalan tata kelola air Majapahit masih dapat dijumpai hingga saat ini. Berdasarkan foto udara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 1973 sampai dengan tahun 1980-an menunjukkan adanya jaringan kanal di Trowulan, Mojokerto. Kanal ini membentuk jalur yang lurus memanjang dan bersilangan membentuk kisi-kisi. Kanal sendiri diperkirakan berfungsi sebagai pengendali banjir (drainase kota), penyedia air, sarana irigasi, dan sarana transportasi. Kemudian, terdapat tinggalan berupa Kolam Segaran seluas 6,6 hektare di Trowulan yang berfungsi sebagai penampung air. Selanjutnya terdapat waduk yang masih tersisa, yaitu Waduk Balong Bunder dan Balong Dowo, yang berfungsi sebagai penangkap air dari sumber yang berasal dari gunung-gunung di bagian selatan Trowulan. Tinggalan lain kolam penampung air dengan ukuran 1–2 hektare juga masih dapat dilihat di Dukuh Botak Paluh, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, yang dikenal masyarakat sebagai waduk milik Dinas Pengairan Mojokerto. Adapun tata kelola air yang lain seperti Candi Tikus yang diyakini sebagai pengukur debit air dan temuan

buku ini tidak diperjualbelikan

bangunan dari susunan batu bata yang menyerupai bak kontrol di Dukuh Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan (Susilo & Rinaldi, 2010).

Selain keberhasilan dalam mengelola bencana banjir, Majapahit juga berhasil mengelola kondisi alam sehingga menjadi wilayah agraris semi komersial (Sanjoyo, 2021). Lingkungan geografis Majapahit terletak pada dataran rendah yang luas, dekat dengan beberapa aliran sungai, dan dekat dengan gunung berapi mendukung perkembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Anwari (2015) menyebutkan, pertanian menjadi sektor utama pemasukan Majapahit. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah berupa pengelolaan sistem irigasi dan pengembangan teknologi pertanian sehingga menjadikan sektor pertanian Majapahit berkembang dengan pesat dan memperoleh hasil alam yang berlimpah. Ma Huan (1433) dalam Sanjoyo (2020) memberitakan Majapahit merupakan kerajaan penghasil komoditas beras dengan masa panen padi dua kali dalam setahun. Selain beras, komoditas lain berupa buah pisang, semangka, manggis, dan kelapa. Hasil pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai komoditas ekspor kerajaan (Khasanah, 2017; Kurnianingtyas & Hayati, 2022).

Melimpahnya hasil komoditas pertanian memberi peluang keikutsertaan Majapahit dalam perdagangan Nusantara. Mengingat letak geografis Majapahit yang jauh dari laut, kegiatan distribusi komoditas perdagangan dilakukan melalui pelayaran melewati Sungai Brantas yang bermuara di Laut Jawa. Pemanfaatan aliran sungai sebagai jalur transportasi perdagangan berdampak pada kegiatan ekonomi yang bertumbuh dengan pesat dan lalu lintas pelayaran semakin ramai. Sehingga kemudian muncul desa-desa penyeberangan di pinggiran sungai di sepanjang Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang kemudian dikenal sebagai *naditira pradeca* (Sanjoyo, 2020).

buku ini tidak diperjualbelikan

C. *Naditira Pradeca* sebagai Jejak Bandar-Bandar Dagang di Era Majapahit

Majapahit merupakan kerajaan yang maju dalam sektor agraris maupun maritim. Meskipun ibu kota Majapahit berada di Trowulan yang terletak di pedalaman Pulau Jawa, namun puncak kejayaan dan kekuasaan Majapahit sebagian besar di lautan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Majapahit kala itu sudah memiliki peradaban maritim yang maju (Anwari, 2015). Kecanggihan maritim Majapahit saat itu dapat diakui sebagai salah satu yang termaju pada zamannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui pelabuhan-pelabuhan laut maupun sungai yang memperlihatkan jaringan perdagangan global yang cukup maju (Wahyudi, 2013). Pelabuhan yang dibangun di sepanjang aliran Sungai Brantas berfungsi sebagai tempat mengumpulkan dan menjual hasil bumi, rempah-rempah, dan komoditas dagang yang lain. Selain membangun pelabuhan, pemerintah juga menetapkan aturan-aturan dalam perdagangan, persinggahan para pedagang, dan sebagainya, sehingga aktivitas perdagangan tersebut menjadi penyumbang pajak terbesar dalam perekonomian Majapahit (Rahmawati *et al*., 2019).

Aktivitas perdagangan dilakukan dengan mengangkut komoditas dari pedalaman ke berbagai tempat dengan menggunakan sarana transportasi darat maupun air. Keberadaan sungai di Majapahit menjadi faktor pendukung mobilitas perdagangan dari hulu ke hilir atau sebaliknya sehingga jalur sungai menjadi ramai dan muncul desa-desa penyeberangan di pinggiran sungai yang disebut sebagai *naditira pradeca* (lihat Gambar 3.2). Di sisi lain aktivitas perdagangan di daerah pesisir utara Jawa juga semakin ramai dengan maraknya perdagangan di Asia Tenggara sehingga menarik keikutsertaan Majapahit dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada pertumbuhan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa.

Heng (1990) menyebutkan jaringan perdagangan di wilayah semenanjung Melayu diatur secara estafet, yaitu dimulai dari *feeder points* atau pengepul kecil di wilayah pedalaman yang dekat dengan anak sungai, kemudian dibawa menuju *colleting centres* atau pengepul

buku ini tidak diperjualbelikan

skala sedang yang biasanya terletak di induk sungai, dan dilanjutkan menuju pengepul skala besar atau *entrepot* yang juga dikenal sebagai pelabuhan antara. Setidaknya terdapat tiga pelabuhan sungai penting di sepanjang Sungai Brantas seperti Pelabuhan Trung, Canggu, dan Bubat. Trung dan Canggu merupakan pelabuhan penumpang, sementara Bubat digunakan sebagai pelabuhan barang. Sedangkan, pelabuhan di pesisir utara Jawa yang memiliki posisi penting bagi Majapahit yaitu Pelabuhan Tuban, Gresik, Jaratan, Sedayu, dan Lamongan (Anwari, 2015).

Naditira pradeca berarti desa-desa di tepian sungai (Safitri, 2015). Nama *naditira pradeca* dicatat dalam Prasasti Canggu yang ditemukan di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Trowulan. *Naditira pradeca* berfungsi untuk melayani transportasi air dan penyeberangan di pedalaman Majapahit. Munculnya *naditira pradeca* di sepanjang aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo kemudian menarik perhatian Raja Hayam Wuruk untuk melakukan perjalanan ke daerah tersebut dengan tujuan mencatat nama-nama desa dan menata pengelolaanya. Melihat potensi bandar atau pelabuhan-pelabuhan di sepanjang aliran sungai dalam menyumbang perekonomian kerajaan, membuat Raja Hayam Wuruk mengeluarkan Prasasti Canggu (Prasati Trowulan I) pada tahun 1358 M yang digunakan untuk memperkuat dan memberikan hak istimewa pada pelabuhan sungai. Dalam Prasasti Canggu disebutkan bahwa ada 44 buah desa penyeberangan di tepi Bengawan Solo dan anak cabangnya, sedangkan di tepian Sungai Brantas terdapat 34 buah desa penyeberangan. Desa-desa tersebut dikenal dengan nama *naditira pradeca* (Fitrotin, 2014).

Keberadaan *naditira pradeca* yang ada dalam Prasasti Canggu untuk saat ini memang sulit diketahui letaknya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya perubahan alur sungai karena adanya proses sedimentasi akibat banjir yang sering terjadi sehingga memungkinkan desa tersebut bergeser atau berpindah. Selain itu juga disebabkan oleh perubahan pengucapan nama, pergantian nama, dan munculnya desa-desa baru. Meskipun demikian, pelacakan terkait *naditira pradeca* masih dapat dilakukan dengan melacak toponim dan melacak ting-

buku ini tidak diperjualbelikan

galan arkeologis di tempat-tempat tersebut (Lelono, 2010). Kajian toponimi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi jika tidak ada peninggalan-peninggalan penyerta. Toponim *naditira pradeca* yang masih bisa ditemui saat ini antara lain terdapat di beberapa daerah, seperti Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo (lihat Tabel 3.1).

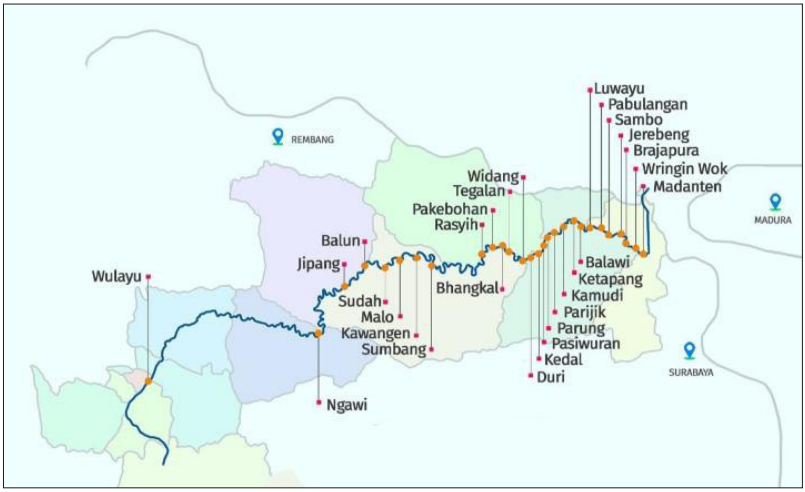

Keterangan: Posisi desa-desa pelabuhan atau yang dikenal sebagai *naditira pradeca* sepanjang aliran Sungai Brantas.
Sumber: Seno (2022)

Gambar 3.2 Jalur Aliran Sungai dan *Naditira Pradeca*

Tabel 3.1 Toponim *Naditira Pradeca*

Daerah	Toponim	Daerah	Toponim
Lamongan	Sambo → Sambopinggir Balawi → Blawi Katapang → Ketapangtelu Parijik → Prijek Pagaran → Jagran Parung → Parengan Pasiwuran → Siwuran Kedal → Kendal Bangkal → Kebalan Besur	**Surabaya**	Gsang → Pagesangan Bukul → Bungkul Curabhaya → Surabaya

buku ini tidak diperjualbelikan

Daerah	Toponim	Daerah	Toponim
Gresik	Medanten → Bedanten Wringin Wok → Dusun di Sidorejo Brajapura → Mojopuro Jerebeng → Jrebeng Pabulangan → Bulangan Luwayu → Lowayu Kamudi → Kemudi	**Sidoarjo**	Sarbo → Serbo Waringin Pitu → Wringin Pitu Panumbang → Panambangan Tda → Tado Singkalan Jruk → Jeruk Legi Trung → Terung Wetan/ Kulon Pamotan → Pamotan Kambang Cri → Bangsri

Keterangan: Analisis toponimi daerah-daerah sepanjang Sungai Brantas yang diperkirakan merupakan desa kuno dari era Majapahit

Sumber: Dikembangkan dari Lelono (2010) dan Seno (2022)

Selain menyebutkan desa-desa penyeberangan, Prasasti Canggu juga berisi tentang peningkatan status desa-desa penyeberangan di seluruh Mandala Jawa dan beberapa aturan yang ditetapkan untuk mengatur aktivitas penyeberangan. Raja Hayam Wuruk memberikan hak swatantra atas jasa pengelola naditira pradeca. Hak atas swatantra tersebut diberikan kepada Panji Margabhaya (pengelola pelabuhan sungai yang bertempat tinggal di Canggu) dan Panji Angraksaji (pengelola pelabuhan sungai yang bertempat tinggal di Trung). Keduanya merupakan pegawai rendah yang diperintah oleh Raja Hayam Wuruk untuk mengelola pelabuhan Canggu dan Trung. Selain itu, dalam Prasasti Canggu juga mengatur hak dan kewajiban dari para penambang perahu dimana tukang perahu mendapatkan hak istimewa sehingga dapat melayani penumpang dengan baik dan melaksanakan kewajibannya. Para penambang tidak dikenai pajak dalam kegiatannya, bahkan mereka diperbolehkan untuk mengadu ayam dan berjudi tanpa adanya denda dari pihak kerajaan (Sanjoyo, 2020).

buku ini tidak diperjualbelikan

D. Penutup

Majapahit merupakan kerajaan yang berkembang pada masa periode kuno yang mendapat pengaruh besar dari kepercayaan Hindu-Buddha.. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M sampai 1500 M dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 M sampai 1389 M. Secara geografis, lokasi pusat Majapahit ada di dekat Trowulan sekitar kurang lebih 10 km dari baratdaya Kota Mojokerto. Trowulan merupakan daerah yang strategis (pada masanya) karena dikelilingi oleh aliran sungai dan beberapa gunung berapi. Hal tersebut menjadikan daerah pusat Majapahit berada pada lembah yang subur, namun juga rawan terjadinya dampak bencana alam. Bencana Banjir sering kali terjadi sehingga merusak lahan pertanian dan juga berpengaruh pada kegiatan perdagangan, aktivitas religi, bahkan berdampak pada penurunan hasil pajak kerajaan. Berbagai tata kelola air dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir sekaligus sebagai pembangunan sarana irigasi pertanian. Hasilnya, komoditas dagang di kerajaan menjadi melimpah dan memberi peluang keikutsertaan Majapahit dalam perdagangan Nusantara.

Keberadaan sungai di Majapahit menjadi faktor pendukung mobilitas perdagangan dari hulu ke hilir atau sebaliknya sehingga jalur sungai menjadi ramai dan muncul penyeberangan antardesa di pinggiran sungai yang disebut sebagai *naditira pradeca*. Melihat potensi *naditira pradeca* dalam menyumbang perekonomian kerajaan membuat Raja Hayam Wuruk mengeluarkan Prasasti Canggu yang berisi tentang peningkatan status desa-desa penyeberangan di seluruh Mandala Jawa, menetapkan aturan terkait aktivitas penyeberangan, dan pemberian hak istimewa pada pengelola pelabuhan sungai.

buku ini tidak diperjualbelikan

E. Referensi

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Adrisijanti, I. (2014). *Majapahit: Batas kota dan jejak kekayaan di luar kota*. Kepel Press.

Anwari, I. R. M. (2015). Sistem perekonomian Kerajaan Majapahit. *Verleden: Jurnal Kesejarahan*, *3*(1), 104–115.

Daldjoeni, N. (1992). *Geografi kesejarahan II: Indonesia*. Alumni.

Fitrotin, N. F. (2014). Kedudukan daerah Terung (Krian-Sidoarjo) pada masa menjelang akhir Majapahit (1478-1526). *Jurnal Avatara*, *2*(1), 149–160.

Heng, Leong Sau. (1990). Collecting Centers, Feeder Points and Entrepots in the Malay Peninsula 1000 B.C. – A.D. 1400, dalam Kathirithamby-Wells & John Villiers. In *National University of Singapore*. Retrieved from https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989

Khasanah, L. I. (2017). Pelabuhan Kambang Putih pada masa Majapahit tahun 1350-1389. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *5*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/19364

Kurnianingtyas, W., & Hayati, C. (2022). Telisik pola perdagangan Desa Trowulan abad XII-XV sebagai landasan pembangunan di Mojokerto. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, *24*(2), 107–122. https://doi.org/10.33370/jpw.v24i2.698

Lelono, H. (2010). Mojopura Wetan, desa penyeberangan di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo pada masa Majapahit. *Berkala Arkeologi*, *30*(1), 72–80. https://doi.org/10.30883/jba.v30i1.392

Pigeaud, T. G. Th. (1960). *Jawa abad Ke-14: Kajian sejarah kebudayaan: Nāgara-Kĕrtāgama oleh Rakawi Prapañca dari Majapahit*. Martinus Nijhoff.

Rahmawati, M., Riyadi, M. I., Rizaldy, R. J., & Korespondensi, P. (2019). Sungai Bengawan Solo: Tinjauan sejarah maritim dan perdagangan di Laut Jawa. *Jurnal Candrasangkala*, *5*(2), 24–39.

Safitri, S. (2015). Telaah geomorfologi Kerajaan Majapahit. *Jurnal Criksetra*, *4*(7), 57–61.

buku ini tidak diperjualbelikan

Sandi, A. D. (2015). Banjir Sungai Brantas masa Raja Airlangga abad XI berdasarkan Prasasti Kamalagyan 1037 M. *Jurnal Avatara*, *3*(1), 50–57.

Sanjoyo, M. P. (2020). Canggu: Pelabuhan sungai masa Majapahit abad XIV– XVI. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, *10*(2). https://doi.org/10.21831/moz.v10i2.32456

Sanjoyo, M. P. (2021). The utilization of Brantas River in the era of Kediri until Majapahit Kingdom. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, *5*(2), 138–146.

Seno. (2022, 9 Juli). Memakai Prasasti Canggu (1358) yang berusia 664 tahun. *Optika.id*. https://www.optika.id/netizen/memakai-prasasti-canggu-1358-yang-berusia-664-tahun

Setiawan, Z. (2022). Sejarah sosial politik Kerajaan Majapahit. *Jurnal Lanskap Politik*, *1*(1), 106–115.

Susilo, N., & Rinaldi, I. (2010). Trowulan: Instalasi air untuk rakyat Majapahit. https://nasional.kompas.com/read/2010/06/03/09424373/~Tanah%20Air

Wahyudi, D. Y. (2013). Kerajaan Majapahit: Dinamika dalam Sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, *7*(1), 88–95.

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB IV

BANDAR PELABUHAN TUBAN PADA MASA MAJAPAHIT

Muhammad 'Afwan Mufti & Deny Yudo Wahyudi

A. Bandar Pelabuhan dalam Sektor Maritim

Berdasarkan catatan sejarah yang telah ditemukan, kerajaan yang memiliki bandar pelabuhan dan pasukan maritim yang besar maka kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang besar pula, seperti halnya Kerajaan Sriwijaya, Medang, Majapahit, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari catatan peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan saat ini. Pada abad ke 1416 Masehi, di Jawa terdapat Kerajaan Majapahit yang memiliki kekuatan maritim untuk melakukan ekspansi dan jaringan dagang. Dalam Prasasti Canggu disebutkan bagaimana sistem pajak dan pelayaran Majapahit mulai dari pelabuhan luar hingga pelabuhan pinggiran sungai (Sanjoyo, 2019).

M. A. Mufti & D. Y. Wahyudi
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: afwanmufti66@gmail.com

© 2025 Editor & Penulis

M. A. Mufti & Wahyudi, D. Y. (2025). Bandar Pelabuhan Tuban pada Masa Majapahit. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (43–54). Penerbit BRIN.
DOI: 10.55981/brin.1031.c1515, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

Sebagai kerajaan maritim sekaligus agraris, sektor perdagangan Majapahit juga ditunjang oleh komoditas pertanian. Bahkan, dalam Prasasti Balawi, Biluluk, dan Waringin Pitu mencatat hasil sawah dan peternakan sebagai komoditas dagang di Majapahit (Surjandari, 2004). Kondisi geografis Majapahit yang terletak di daerah pedalaman jauh dari laut, pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan pelayaran melalui Sungai Brantas yang berhubungan dengan Laut Jawa. Pemanfaatan sungai sebagai jalur perdagangan ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi Majapahit. Aktivitas perdagangan yang sibuk antara Majapahit dan daerah sekitarnya membuat lalu lintas pelayaran sungai semakin padat. Dalam catatan Cina yang ditulis pada Ma Huan dalam bukunya *Ying-yai Sheng-lan*, dituliskan bahwa sebelum memasuki Majapahit, terdapat beberapa pelabuhan yang harus dilewati, seperti di Tuban, Gresik, Surabaya, kemudian Majapahit (Feng, 1970). Tidak hanya itu, Majapahit juga mempunyai pelabuhan yang berguna untuk menghubungkan lautan dengan daerah pedalaman yang disebut dengan *Naditira Pradeca* (Fitrotin, 2014; Tedjowasono, 2019). Dengan adanya bandar-bandar pelabuhan yang dimiliki, Majapahit menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang maju pada saat itu.

Keberadaan desa-desa di pedalaman yang tumbuh menjadi bandar dagang pelabuhan (*naditira pradeca)* juga terhubung dengan bandar-bandar dagang di pesisir Tuban (masa Majapahit), seperti Kambang Putih. Hubungan bandar dagang ini berperan sebagai penghubung perniagaan di Majapahit dengan perdagangan internasional. Hal ini menandakan bahwa pelabuhan memiliki peran penting bagi kemajuan dalam bidang politik dan perdagangan. Salah satu pelabuhan yang tercatat sebagai benteng bagi Majapahit adalah Pelabuhan Kambang Putih Tuban. Secara geografis, Tuban merupakan wilayah yang menghubungkan antara lautan dan daratan sehingga jika dilihat dari berbagai aspek bahwa Tuban memiliki peran penting, baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Bab ini membahas mengenai Tuban pada masa Kerajaan Majapahit dengan pembahasan sebagai berikut; 1) Sejarah pelabuhan Tuban pada masa Kerajaan

buku ini tidak diperjualbelikan

Majapahit, 2) Tinjauan peran pelabuhan Tuban bagi Majapahit dari segi ekonomi, politik dan sosial budaya.

Seperti umumnya, pokok bahasan pada topik ini mengkaji suatu fenomena masa lampau dengan menggunakan sumber data masa lampau melalui media, seperti prasasti, catatan, dan sebagainya (Wasino & Hartatik, 2018). Untuk mengungkap suatu fakta sejarah diperlukan beberapa langkah, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, verifikasi data, interpretasi, hingga historiografi (Kuntowijoto, 2005). Sumber primer yang digunakan dalam bab ini adalah Prasasti Biluluk (1366, 1383, 1385 M), dan Prasasti Balawi (1305), serta Prasasti Kambang Putih (1050 M) sebagai informasi tambahan mengenai keberadaan pelabuhan kuno pada periode sebelum Majapahit. Fokus bahasan ini juga didukung oleh sumber lain yang relevan dengan kajian yang dibahas yaitu buku-buku serta catatan yang membahas mengenai Pelabuhan Tuban dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13–15 Masehi.

B. Sejarah Pelabuhan Tuban pada Masa Kerajaan Majapahit

Kabupaten Tuban merupakan satu dari kota paling tua di daerah pesisir laut utara Jawa yang terletak pada titik koordinat 111° 30'–112° 35' BT dan 6° 40'–7° 18' LS, dan secara administratif, Kabupaten Tuban terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ditinjau dari segi geografisnya, Kabupaten Tuban terletak di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Bojonegoro, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Rozi (2018) mengatakan, sejak abad XI pada masa pemerintahan Raja Airlangga, dari Kerajaan Kahuripan hingga abad XVI pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, Tuban dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan utama Pulau Jawa (Rozi, 2018). Tuban sebagai pelabuhan utama kerajaan-kerajaan Jawa ini dapat dibuktikan dengan disebutnya Tuban dalam berbagai macam prasasti dari lintas masa, salah satunya pada masa Kerajaan Majapahit.

buku ini tidak diperjualbelikan

Letak Tuban sebagai titik hubung antara daratan dan lautan menjadi wilayah yang strategis sebagai bandar pelabuhan. Bahkan, Tuban sebagai pelabuhan sejak masa pemerintahan Airlangga hingga pada masa kolonialisme. Hal ini membuktikan bahwa Tuban memiliki sumbangsih besar dari masa ke masa. Setelah pembagian Kerajaan Kahuripan, wilayah Tuban berada di bawah pemerintahan Kerajaan Jenggala, yang merupakan bagian dari kerajaan timur. Nama Jenggala diyakini berasal dari kata *Hujung Galuh* atau Jung-ya-lu berdasarkan catatan Cina (Lihat Gambar 4.1).

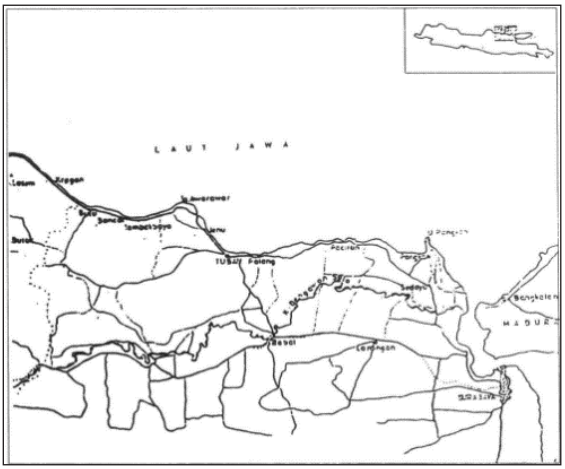

Keterangan: Letak Tuban di tepian pantai utara Jawa yang berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
Sumber: Manus *et al*. (1997)

Gambar 4.1 Peta Geografis Tuban

Kemudian ditemukan Prasasti Kambang Putih yang tercatat memiliki angka tahun 1050 M menjelaskan bahwa wilayah Tuban memang terdapat aktivitas perdagangan melalui pesisir (Casparis, 1958). Temuan ini menjadi bukti bahwa pelabuhan Tuban sudah ada sejak abad XI M. Kemudian saat kekuasaan Majapahit, Tuban dijadikan sebagai wilayah bawahan (*vassal*). Pelabuhan Tuban yang menjadi pusat perdagangan pada saat itu telah berkembang menjadi pusat

buku ini tidak diperjualbelikan

pengumpulan barang (*entrepot*). Selain menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai negara, pelabuhan ini juga melakukan impor dan ekspor barang-barang dari berbagai negara (Khasanah, 2017).

Jaringan dagang pada pelabuhan Tuban tidak hanya meliputi perdagangan lokal, Pelabuhan Tuban pada masa Majapahit sering kali dipadati oleh pedagang Jawa yang menjalin perdagangan dengan wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Kepulauan Filipina (Casparis, 1958; lihat Gambar 4.2).

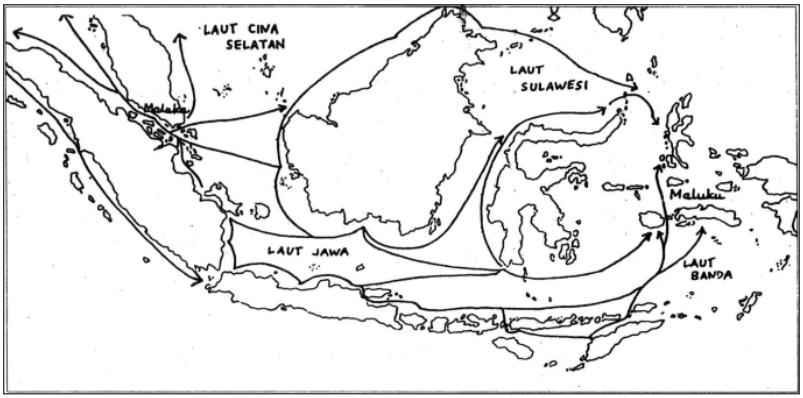

Keterangan: Peta jalur perdagangan Nusantara yang menunjukkan hubungan bandar-bandar pelabuhan Nusantara dengan jaringan perdagangan lokal, regional, menuju global.
Sumber: Tjiptoatmodjo (1983)

Gambar 4.2 Peta Jalur Perdagangan Nusantara

Namun, sumber lain menyebutkan bahwa pedagang Cina juga memiliki peran penting dan membuat kota tersebut menjadi pusat perdagangan (Feng, 1970). Sebagai komunitas, mereka bahkan menetap di Tuban. Pada waktu tertentu, kota ini juga menjadi saksi transaksi perdagangan antara orang-orang Cina, Eropa, Arab, India, Asia Tengah, dan penduduk pribumi. Meskipun Tuban tidak terletak di jalur utama perdagangan sutera, perkembangan kota dan wilayah tersebut yang melibatkan hubungan antarbangsa ini memiliki dampak besar di Nusantara pada babak selanjutnya.

Pelabuhan Tuban tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi tempat keberangkatan kapal-kapal yang

buku ini tidak diperjualbelikan

melakukan ekspansi ke wilayah Maluku (Manus *et al*., 1997). Selain itu, Tuban juga berperan sebagai jalur transportasi untuk mengirim upeti dari wilayah bawahan ke Kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan oleh pelabuhan Tuban yang menjadi pelabuhan transit utama Majapahit, baik untuk mengalirkan upeti kerajaan maupun untuk negara-negara lain yang ingin mengunjungi Kerajaan Majapahit maupun melakukan perdagangan di Maluku (Cortesao & Rodrigues, 1944). Keadaan ini tentu saja berdampak pada perkembangan ekonomi dan kemakmuran Tuban serta penguasanya pada masa tersebut. Menurut catatan Tome Pires dalam Rozi (2018), saat Kerajaan Majapahit berperang, Tuban bahkan mampu mengirimkan 6.000–7.000 tentara untuk memenuhi kebutuhan kerajaan.

C. Tinjauan Peran Pelabuhan Tuban bagi Majapahit dari Segi Ekonomi, Politik, dan Sosial-Budaya

Pelabuhan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan Kerajaan Majapahit. Tuban merupakan pintu masuk utama bagi Kerajaan Majapahit sehingga pelabuhan ini memiliki peran penting dalam jalur perdagangan kerajaan tersebut. Dalam catatan Ma Huan dalam bukunya *Ying-Yai Sheng-lan* disebutkan bahwa Jawa memiliki empat kota besar, dan biasanya kapal asing pertama kali mendarat di *Tu-pan* (Tuban), kemudian menuju *New Village* (Gresik), *Su-lu-ma-i* (Surabaya), dan terakhir sampai di *Man-the-po-i* (Majapahit) (Feng, 1970). Keempat kota tersebut merupakan pelabuhan besar yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit pada masa itu, yaitu Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit itu sendiri. Kehadiran pelabuhan-pelabuhan besar ini menandakan kebesaran dan kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa tersebut. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi kekuatan maritim yang diakui oleh bangsa-bangsa asing sebagai pertahanan dan pusat perdagangan (Nugroho, 2011).

Selain dalam sektor maritim, Kerajaan Majapahit juga mencapai kemajuan dalam sektor agraris dengan memanfaatkan lingkungan yang dikelilingi oleh sungai besar di Jawa bagian timur, terutama Sungai Brantas. Majapahit memanfaatkan sungai-sungai di sekitarnya

buku ini tidak diperjualbelikan

untuk kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi pengairan yang canggih untuk masa itu, seperti parit-parit (Muljana, 2005). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran pelabuhan bagi Kerajaan Majapahit tidak hanya terpaut dari kegiatan perdagangan (perekonomian) melainkan memiliki pengaruh bagi perkembangan politik dan sosial-budaya. Bahkan menurut Houben (1992), sejarah Laut Jawa sangat dikenal dengan interaksi perdagangan, politik, dan budaya (Houben *et al*., 1992). Karena itu, pada pembahasan ini akan dikaji mengenai peran pelabuhan Tuban bagi Kerajaan Majapahit, baik dari segi perekonomian, politik, maupun sosial-budaya (Lihat gambar 4.3).

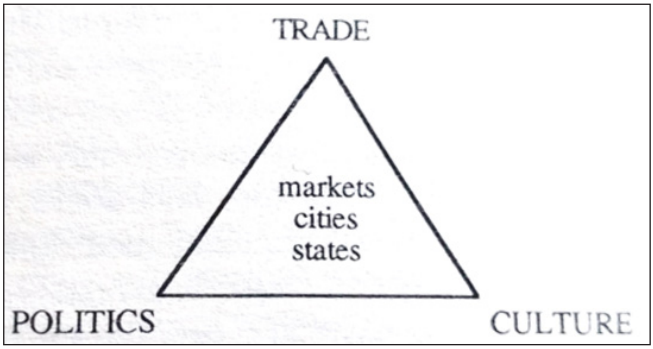

Keterangan: Kecenderungan pola interaksi perdagangan, politik, dan budaya yang terbentuk di tengah masyarakat yang bermukim di tepian Laut Jawa.
Sumber: Houben *et al.* (1992)

Gambar 4.3 Diagram Pola Interaksi Masyarakat di Kawasan Pelabuhan Laut Jawa

1. Ekonomi

Perkembangan ekonomi Majapahit memiliki warna tersendiri dalam perkembangan sejarah di Nusantara. Pasalnya, Majapahit merupakan salah satu kerajaan pada zaman Hindu-Buddha yang tercatat memiliki peradaban yang sangat maju, baik dari segi agraris maupun maritim. Sebagai kerajaan yang maju pada masa itu, Majapahit memiliki sistem birokrasi pemerintahan yang menarik. Sistem birokrasi di Majapahit membagi pemerintahannya ke dalam dua tingkatan, yakni tingkat

buku ini tidak diperjualbelikan

pusat yang mencangkup kehidupan politik sekitar istana dan tingkat daerah yang mencangkup wilayah *watek, wanua,* maupun *thani* (desa) (Wahyudi, 2015). Adanya pembagian birokrasi ini untuk mengatur berbagai jenis pekerjaan yang ada di daerah-daerah kekuasaan Majapahit.

Dalam prasasti Balawi, Biluluk, dan Tuhanaru terdapat berbagai macam jenis mata pencaharian masyarakat di Majapahit, seperti perajin pakaian, warna, tukang potong ayam, perajin benang, perajin tanah liat, pembuat alat berburu hewan, pedagang, pertanian, peternakan, dan sebagainya (Surjandari, 2004). Adanya berbagai macam pekerjaan masyarakat Majapahit pada saat itu dapat memunculkan peran penting Pelabuhan Tuban bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

Tuban merupakan pelabuhan sekaligus benteng bagi Kerajaan Majapahit dan tempat singgah pertama bagi kapal-kapal asing. Hal ini tentu berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat pada masa Majapahit. Pelabuhan Tuban sebagai bandar perdagangan Kerajaan Majapahit menjadi salah satu penunjang kemajuan Kerajaan Majapahit dari segi perekonomian. Dalam aspek ekonomi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan surplus barang dari wilayah pedalaman guna didistribusikan ke pusat-pusat lain yang membutuhkannya. Selain itu, pelabuhan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan barang di wilayah itu sendiri. Sebaliknya, pelabuhan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan wilayah penyangga yang memerlukan pasokan dari pusat-pusat lain yang tidak dapat diproduksi sendiri.

Pada zaman dahulu, pelabuhan kuno memiliki sarana yang tidak sekompleks pelabuhan modern saat ini. Sebagai contoh, kantor dagang di pelabuhan kuno masih belum memiliki bangunan permanen, dan dermaga yang digunakan masih sederhana dengan perahu sebagai jenis transportasi yang umum digunakan (Khasanah, 2017).

2. Politik

Kemunculan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara memiliki warna tersendiri bagi kajian Sejarah Indonesia. Sebagai salah satu

buku ini tidak diperjualbelikan

pelaku ekonomi global dalam tingkat regional, Majapahit merupakan kerajaan yang memegang peran penting dalam sistem perdagangan global. Dengan demikian, Majapahit mendapati pendatang asing dari berbagai wilayah sehingga terjadi interaksi baik dalam segi politik maupun ekonomi. Hal ini sangat masuk akal karena pada saat itu Laut Jawa sebagai pemegang peran penting dalam kemajuan ekonomi politik menjadi sarana bagi pelancong asing di berbagai dunia berkumpul dan melakukan kontak sosial (Dijk, 1990). Pelabuhan Tuban sebagai salah satu bandar pelabuhan Majapahit memiliki peran penting bagi pergerakan politik Majapahit. Selain perdagangan, pelabuhan juga digunakan sebagai basis militer maritim dan pengawas bagi kegiatan perdagangan internasional.

Sistem pemerintahan yang terjadi pada masa kuno dibagi menjadi dua, yaitu *hard power* dan *soft power* (Tedjowasono, 2019). Sistem pemerintahan *soft power* suatu kerajaan dapat dilihat dari kebijakan hegemoni melalui empat bagian, yaitu politik ekonomi, politik budaya, politik agama, dan politik sosial. Dalam hal ini, peran pelabuhan Tuban sangat berpengaruh bagi keempat hal tersebut. Politik ekonomi, dilihat dari prasasti yang menyebutkan komoditas dagang Majapahit yang dijual di bandar-bandar pelabuhan serta pemberlakukan pajak dagang bagi pedagang asing seperti yang terdapat pada Prasasti Canggu (Sanjoyo, 2019). Politik budaya, kebudayaan Majapahit sedikit besarnya terpengaruh dengan kondisi lingkungan Majapahit yang terletak di sekitar aliran sungai dan perairan Laut Jawa, sehingga peninggalan kebudayaan yang dihasilkan juga erat dengan perairan. Kemajuan dalam bidang budaya tercermin dalam beragamnya penemuan artefak, catatan tertulis, dan tradisi yang diwariskan. Kehidupan dalam sistem perkotaan dapat terlihat secara detail melalui situs Trowulan dan catatan tertulis yang ada. Selain itu, perkembangan sistem kanal yang canggih juga mengungkapkan tantangan tidak hanya dalam hal fungsionalitas, tetapi juga dalam mempertimbangkan estetika dalam membangun kota (Muljana, 2005; D. Y. Wahyudi, 2015). Politik agama dan sosial merupakan dua hal yang selalu berdampingan. Dalam hal ini peran pelabuhan dalam agama

buku ini tidak diperjualbelikan

dan sosial adalah sebagai sarana interaksi sosial antara masyarakat lokal dengan pendatang. Hal ini dibuktikan dengan catatan Kakawin Nagarakretagama yang mencatatkan bahwa adanya tingkatan lapisan sosial yang ada di Kerajaan Majapahit dengan penguasa-penguasa daerah dengan sebutan (*Bhre*).

Tidak hanya *soft power,* pelabuhan juga memiliki peran dalam sistem politik *hard power* yaitu melalui kekerasan atau peperangan terhadap musuhnya. Tradisi-tradisi yang memperkuat posisi Majapahit sebagai kerajaan maritim tercermin dalam hubungan perdagangan yang luas dan misi diplomatik yang melibatkan berbagai negara. Sarana transportasi dan pelabuhan berperan penting sebagai pendukung sistem perdagangan maritim ini. Selain itu, ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan untuk memperluas wilayah juga merupakan contoh upaya Majapahit dalam kemajuan di bidang kelautan.

3. Sosial-Budaya

Samudra Hindia sebagai jalur perdagangan Asia lama menjadi sarana kontak sosial bagi masyarakat yang ada di berbagai penjuru dunia. Utamanya sebagai penghubung pusat perdagangan kuni dari Arab, India, Cina, termasuk menuju Indonesia (Houben *et al*., 1992). Laut jawa sebagai salah satu jalur perdagangan pelayaran asing pada saat itu juga mengalami kontak sosial antara masyarakat lokal dan internasional. Pada abad ke 13–15 Masehi, hampir seluruh bagian Laut Jawa dikuasai oleh Kerajaan Majapahit dengan Pelabuhan Tuban sebagai pusat maritim utama Kerajaan Majapahit. Pelabuhan utama sebagai pusat Kerajaan Majapahit memiliki jaringan dagang yang luas dari berbagai negara seperti Cina, Eropa, Arab, India, dan Asia Tengah (Feng, 1970).

Dilihat dari segi sosial-budaya, kota pelabuhan menjadi pusat interaksi bagi masyarakat dari berbagai kelompok sosial, baik dari perbedaaan bangsa, ras, etnik, dan bahasa, sehingga kota pelabuhan dapat dikatakan sebagai sarana tukar kebudayaan dan informasi bagi masyarakat lokal dan pendatang. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di daerah kota pelabuhan memiliki perilaku yang lebih adaptif

buku ini tidak diperjualbelikan

dengan dunia luar dibandingkan dengan masyarakat pedalaman (Syam, 2005). Hal ini terlihat dari tradisi dan budaya masyarakat pesisir yang terdapat pembaruan melalui proses akulturasi dari budaya luar.

D. Penutup

Pelabuhan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan Kerajaan Majapahit. Pelabuhan Tuban menjadi *entreport* bagi Kerajaan Majapahit yang berperan sebagai pelabuhan penghubung pedangan kerajaan dengan para pedagang asing. Keempat pelabuhan besar yang dimiliki oleh Majapahit, yaitu Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit sendiri, menandakan kebesaran dan kekuasaan kerajaan pada masa itu. Pelabuhan-pelabuhan ini berperan sebagai pusat perdagangan, pertahanan, dan interaksi politik dengan bangsa-bangsa asing. Selain itu, Majapahit juga mencapai kemajuan dalam sektor agraris dengan memanfaatkan lingkungan yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar di Jawa Timur, terutama Sungai Brantas. Pelabuhan Tuban juga memiliki pengaruh yang meluas pada perkembangan politik dan sosial-budaya.

Peran pelabuhan dalam sektor ekonomi terlihat dari fungsi sebagai tempat penyimpanan surplus barang dan pemenuhan kebutuhan wilayah. Dalam sektor politik, pelabuhan Tuban digunakan sebagai basis militer maritim dan pengawas kegiatan perdagangan internasional. Sementara dalam aspek sosial-budaya, pelabuhan Tuban menjadi pusat interaksi dan pertukaran kebudayaan antara masyarakat lokal dan pendatang. Secara keseluruhan, pelabuhan Tuban memiliki peran yang kompleks dan beragam dalam perekonomian, politik, dan sosial-budaya Kerajaan Majapahit. Pelabuhan tersebut menjadi representasi kebesaran dan kekuasaan kerajaan, serta menjadi pusat interaksi dengan bangsa-bangsa asing dan pertukaran budaya.

E. Referensi

Casparis, J. G. de. (1958). *Airlangga*. Universitas Airlangga.

Cortesao, A., & Rodrigues, F. (1944). *The suma oriental of Tome Pires*. Hakluyt.

buku ini tidak diperjualbelikan

Cornelis, D. (1990). *Java, Indonesia and Southeast Asia: How Important is the Java Sea?*. Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie.

Feng, C. (1970). *Ying-Yai Sheng-Lan:'The overall survey of the ocean's shores' (1433)*. Cambridge University Press.

Fitrotin, N. F. (2014). Kedudukan daerah Terung (Krian-Sidoarjo) pada masa menjelang akhir Majapahit. *Avantara*, *2*(1), 1478–1526.

Houben, V. J. H., Maier, H. M., & Molen, W. van der. (1992). *Looking in odd mirrors: The Java Sea*. Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië.

Khasanah, L. I. (2017). Pelabuhan Kambang Putih Pasa Masa Majapahit Tahun 1350-1389. *Avantara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, *5*(2), 402–417.

Kuntowijoto. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pusaka.

Manus, M. P. B., Sedyawati, E., & Rahardjo, S. (1997). *Tuban: Kota pelabuhan di jalan sutra*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Muljana, S. (2005). *Menuju puncak kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. LKiS Pelangi Aksara.

Nugroho, I. D. (2011). *Majapahit peradaban maritim: Ketika Nusantara menjadi pengendali pelabuhan dunia*. Suluh Nuswantara Bakti.

Rozi, T. F. (2018). *Peranan pelabuhan Tuban dalam proses Islamisasi di Jawa abad XV-XVI*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sanjoyo, M. P. (2019). Canggu: Pelabuhan Sungai Masa Majapahit Abad XIV-XVI. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, *10*(2), 402–417.

Surjandari, R. (2004). *Perdagangan lokal di Kerajaan Majapahit abad XII-XV*. Universitas Indonesia.

Syam, N. (2005). *Islam pesisir*. LKis Pelangi Aksara.

Tedjowasono, N. S. (2019). Relasi kuasa pada masa Jawa kuno (abad ke-8–5). *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, 25–35.

Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: Dinamika dalam sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, *7*(1), 88–95.

Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode penelitian sejarah: Dari riset hingga penulisan*. Magnum Pustaka Utama.

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB V

BANDAR-BANDAR DAGANG SEPANJANG
PESISIR UTARA JAWA ABAD ke-15–16 MASEHI

Isa Al Fadani Ahmad & Anisa Musyaroful Ikhrom

A. Selayang Pandang Pulau Jawa

Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km2, dan menjadi salah satu pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa memiliki beberapa batas geografis berupa wilayah perairan. Di sebelah selatan, Jawa berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda yang menjadi penyekat dengan pulau Sumatra. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan di sebelah utara dengan Laut Jawa yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km² di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Laut Jawa terletak hanya 220 mil dari Kalimantan dan

I. A. Ahmad & A. M. Ikhrom
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: isa.alfadanii54@gmail.com

© 2025 Editor & Penulis

Ahmad, I. A. & Ikhrom, A. M. (2025). Bandar-Bandar Dagang Sepanjang Pesisir Utara Jawa Abad XV–XVI Masehi. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (55–64). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1516, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

perairan pantai utara Jawa yang meliputi laut teritorial kepulauan. Laut Jawa terkadang disamakan sebagai Mediterania atau Laut Tengah-nya Indonesia (Nabila *et al*., 2020). Adanya wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, baik itu di selatan maupun di utara, memunculkan adanya beberapa kota tepi laut yang kemudian dikenal dengan wilayah pesisir atau kota pesisir.

Pesisir dapat dipahami pula sebagai wilayah transisi atau peralihan antara darat dan lautan (Lautetu, Kumurur, & Warouw, 2019). Di sepanjang wilayah pulau Jawa sebelah utara yang berbatasan dengan laut Jawa, dikenal beberapa kota pesisir, seperti Cirebon, Pekalongan, Demak, Kudus, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, dan kota-kota pesisir lainnya. Masing-masing kota tersebut memiliki kondisi geografis yang berbeda, namun memiliki persamaan yang identik yaitu dekat dengan pantai atau wilayah perairan, khususnya dari segi iklim, di mana setiap kota pesisir mempunyai iklim tropis dengan karakteristik cuaca yang relatif sama. Iklim tropis mengakibatkan suhu menjadi lebih hangat (bahkan cenderung panas) daripada di pedalaman karena tekanan udara yang rendah sehingga secara tidak langsung berdampak juga pada kegiatan sosial dan ekonomi dari masyarakat bagian pesisir.

Selain itu, wilayah utara Pulau Jawa adalah tanah yang tidak subur karena berasal dari tanah terrarosa pelapukan batuan kapur yang sangat basa dan sedikit sumber air. Air dipermukaan di daerah yang berlitologi kapur sangat sulit dijumpai, air yang didapatkan adalah air bawah tanah yang berusia lanjut dapat membentuk sungai bawah tanah dan goa-goa (Prasetya, 2018).

Meskipun kondisi lingkungan yang kurang mendukung, namun kawasan utara Jawa menjadi pusat peradaban karena pengaruh adaptasi manusia dalam mengolah lingkungan (posibilisme). Posibilisme dalam geografi yaitu teori yang menggagas bahwa lingkungan tidak mutlak menentukan kendala atau batasan tertentu, namun teknologi melalui budaya menentukan tindakan manusia (Prasetya, 2018). Hal ini juga berkorelasi jika dilihat dari sudut pandang ekologi, di mana faktor interaksi manusia di daerah pesisir mempunyai dampak yang

buku ini tidak diperjualbelikan

relatif besar untuk kemajuan dan perkembangan sebuah fenomena sosial, ekonomi, maupun budaya.

Keterangan: Terdapat kota-kota dagang di sepanjang pesisir Utara Jawa yang ramai dikunjungi pedagang lokal, regional, maupun asing. Terutama ketika periode perdagangan rempah yang menghubungkan bandar-bandar di pesisir Jawa dengan bandar dagang di Malaka.
Sumber: Daldjoeni (1992)

Gambar 5.1 Kota-Kota di Pesisir Utara Jawa

Masyarakat pesisir secara struktur dihuni oleh masyarakat yang heterogen, yaitu beragam suku, etnis, agama, dan budaya. Hal ini didasarkan pada struktur masyarakat pesisir yang cukup beragam sehingga keadaan tersebut mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang lebih bervariatif. Berbeda dengan wilayah pedalaman yang struktur masyarakatnya cenderung homogen, yaitu tunggal atau asli masyarakat setempat. Keadaan ini membentuk sistem dan nilai budaya yang pakem atau tidak begitu bervariatif. Wilayah pesisir yang lebih dekat ke perairan umumnya juga memiliki beberapa bandar atau pelabuhan yang ada di sekitarnya yang mana hal ini mendorong terjadinya sebuah interaksi dengan kultur sosial yang bermacam-macam. Oleh karena itu, masyarakat pesisir pantai pada umumnya lebih bersifat terbuka dengan pengaruh budaya luar. Berbeda dengan masyarakat di wilayah pedalaman yang mana pada umumnya lebih bersifat tertutup dan tidak suka menerima tamu luar. Dengan kata lain

buku ini tidak diperjualbelikan

masyarakat pesisir lebih menunjukkan modernitasnya (Kurniawan, 2016).

B. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Utara Jawa Abad ke 15–16 Masehi

Sebelum Islam datang dan menyebar di Pulau Jawa, peradaban Hindu-Buddha sudah membangun kekuasaannya lewat beberapa kerajaan, salah satunya Majapahit sebagai kerajaan terbesar pengaruhnya yang pernah berdiri. Namun, pada sekitar abad ke-15 M, hegemoni Majapahit mulai runtuh seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah pesisir Jawa. Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Gresik, dan Surabaya tampil sebagai pusat-pusat perdagangan strategis, kegiatan agama, dan politik sehingga menyebabkan Islam menyebar secara masif dan relatif cepat (Taufik, 2015). Adanya kegiatan perdagangan dan perniagaan kemudian memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Islam Jawa, khususnya di daerah pesisir. Pada akhir abad ke-15 M terjadi pemusatan gerak niaga bangsa-bangsa di Asia Tenggara di Malaka sehingga mengakibatkan beberapa pelabuhan yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa, seperti Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Rembang, Juwana, dan Jepara, memiliki fungsi sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia timur dengan pusat niaga di daerah Malaka (Cahyani, 2022).

Adanya fenomena perniagaan tersebut, banyak kota-kota pesisir yang memanfaatkannya untuk menunjang kegiatan ekonomi. Beberapa kota pesisir yang terkenal menjadi wilayah perniagaan pada rentang abad 15–16 M, antara lain Demak, Gresik, Jepara, dan Banten. Demak dikenal sebagai kota pesisir yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dengan wilayahnya strategis karena dilewati oleh beberapa sungai sehingga selain sektor maritim yang kuat, sektor agraris dari demak juga sangat baik. Sekitar abad ke-16 M, Demak mengalami kesuksesan sehingga berkembang menjadi wilayah pengekspor tunggal beras di wilayah Nusantara. Sementara itu, komoditas ekspor lainnya yang juga tidak kalah laku adalah kain tenun Jawa yang nilai jualnya sangat tinggi dan mampu menandingi produksi tekstil dari wilayah Cina

buku ini tidak diperjualbelikan

maupun India yang sudah terkenal sebelumnya (Putri & Hudaidah, 2021).

Bergeser ke arah timur terdapat Jepara sebagai kota transit para pedagang menjadi salah satu pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Demak. Letaknya berada di teluk sehingga menarik perhatian pedagang yang lalu lalang dari Jawa dan Maluku, terlebih teluknya bisa dilalui kapal dengan ukuran yang besar. Pires menjelaskan bahwa Jepara berada di bawah kaki Gunung Muria dengan teluk dan memiliki pelabuhan yang indah. Jepara dulunya punya banyak jung/kapal yang dimanfaatkan untuk kegiatan maritim (Cortesao, 1944).

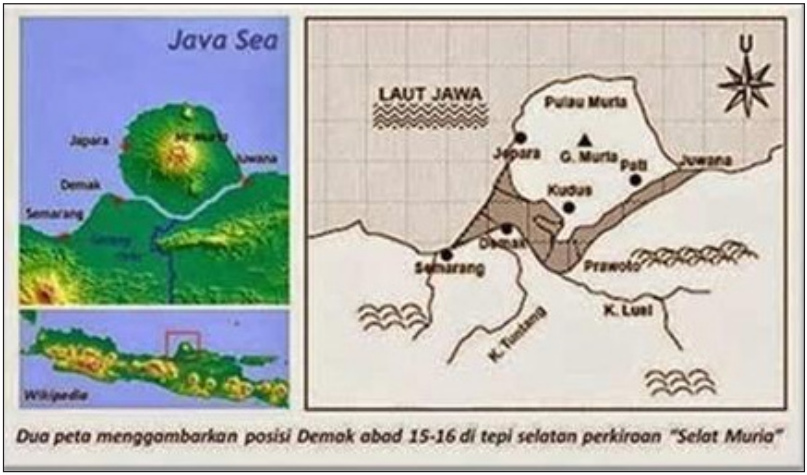

Dua peta menggambarkan posisi Demak abad 15-16 di tepi selatan perkiraan "Selat Muria"

Keterangan: Peta posisi Demak menunjukkan bahwa posisi Demak sebagai kota pesisir terletak di bagian tengah pantai Utara Jawa dan berdekatan dengan kota pelabuhan Jepara.
Sumber: Fatimah *et al*. (2021)

Gambar 5.2 Peta Posisi Kota Pesisir Demak Abad ke-15–16 Masehi

Terdapat pula pelabuhan Gresik —dahulu disebut dengan pengucapan *Grisse, Ki-li-sik, Gresik,* atau *Agracij*— yang ramai dikunjungi oleh para saudagar. Pelabuhan ini juga berdekatan dengan pelabuhan atau kota pesisir Surabaya, yang dahulu dikenal dengan nama Arosbaya. Gresik sendiri menjadi ramai dikunjungi pedagang asing, salah satu faktornya adanya beberapa kebijakan yang diterapkan terhadap

buku ini tidak diperjualbelikan

pedagang asing, misalnya tidak adanya cukai (pajak) serta tidak ada paksaan untuk berlabuh.

Namun, terdapat pula faktor lain yang memengaruhi ramainya aktivitas dagang Gresik di antaranya letak pelabuhan Gresik yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan dari Malaka-Maluku sehingga pedagang Gresik dapat berfungsi sebagai penyalur barang dagangan dari kedua daerah ini (Muhadi, 2018). Terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan di masa kurun niaga yang terjadi di sepanjang abad ke-15 dan 16 M, antara lain rempah dari Maluku, beras, kapas, dan kacang-kacangan dari pedalaman Jawa, lada, gula, ikan, ternak, kuda dari Madura, garam dari kawasan pesisir Gresik, serta kayu-kayu aromatik yang juga berasal dari perkebunan di pedalaman Jawa. Selain itu, terdapat juga beberapa komoditas, seperti porselen, kain sutra, kain halus asal India, kesturi, logam dan logam mulia, serta koin-koin tembaga, gong, dan gading.

Selain kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur dan bagian tengah yang telah eksis, berdiri juga kerajaan Islam lain, di Jawa bagian barat berdiri kerajaan di wilayah Banten sekitar abad ke-16 (Maftuh, 2015). Kegiatan ekonomi Banten didukung sektor maritim di pesisir utara Jawa akibat perpindahan besar-besaran para pedagang Islam di kawasan Melayu. Banten, yang terletak di tepi laut Jawa, menjadi daerah pusat perdagangan baru yang banyak disinggahi para pedagang internasional. Wilayah Banten sangat strategis sebagai jalan masuk menuju kawasan timur Nusantara yang terkenal menghasilkan lada dan rempah-rempah, khususnya Maluku. Sejarawan mencatat kehadiran para pedagang Turki, Arab, Parsi, dan Gujarat, selain orang Cina yang sudah lama menetap dan kemudian sebagian menjadi bagian dari masyarakat dan kerajaan Banten. Mereka melakukan kegiatan jual-beli atau transaksi bisnis dalam skala besar di kerajaan. Lebih dari itu, kehadiran para pedagang internasional tersebut juga didukung kenyataan bahwa di Banten seperti halnya Aceh di Sumatra adalah daerah penghasil komoditas yang memang tengah laku di pasaran internasional, khususnya lada.

buku ini tidak diperjualbelikan

Setiap kota pesisir di utara Jawa memiliki aktivitas perniagaan dan perdagangan guna mendorong sektor ekonominya. Demak, Jepara, Gresik, dan lain-lain mendapatkan julukan Permata Jawa di pelabuhan perdagangan. Hal tersebut karena letaknya yang cukup berdekatan dan menangani perdagangan rempah. Penduduknya lalu lalang dengan membawa logam timah dan emas yang tidak dilebur, tetapi dipipihkan (mirip koin). Majunya sektor ekonomi lewat aktivitas perdagangan tersebut selain dipengaruhi oleh faktor manusianya, juga terdapat faktor lain yaitu kondisi alam yang mendukung terjadinya perdagangan dengan bangsa asing.

C. Pengaruh Kondisi Geografis Wilayah Pesisir Utara Jawa terhadap Perkembangan Bandar-Bandar Dagang dan Perekonomian Abad 15–16 Masehi

Menurut Soekmono (Cahyani, 2022), perubahan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan sebagai hasil dari gagasan dan tindakan manusia. Hal tersebut meliputi tujuh unsur kebudayaan, yaitu bahasa, ilmu pengetahuan, kekerabatan dan organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, religi, serta kesenian. Seiring waktu, kebudayaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam perkembangannya sehingga masyarakat di dalamnya pun juga mengikuti adanya perubahan bersamaan dengan perubahan kondisi lingkungannya sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara manusia dan lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada kebudayaan yang dihasilkan. Salah satu sistem yang memuat adanya hubungan erat antara manusia dan lingkungan dan sulit untuk dipisahkan adalah sistem ekonomi.

Secara umum kegiatan ekonomi atau aktivitas mata pencaharian tidak terlepas dari kondisi alam atau lingkungan sekitarnya. Logika dasarnya bahkan bisa diamati dengan cukup mudah, misalkan orang yang tinggal di pedalaman akan melakukan kegiatan ekonomi seperti berburu, orang yang tinggal di dataran tinggi akan memilih untuk bertani atau berkebun karena tanah yang subur, sedangkan orang

buku ini tidak diperjualbelikan

daerah pesisir yang dekat dengan perairan akan memulai aktivitas ekonominya dengan menjadi nelayan dan mencari ikan bahkan berdagang. Kondisi yang sama juga berlaku di wilayah pesisir utara Jawa. Wilayah pesisir yang umumnya berdekatan dengan laut atau samudra menjadikan berdagang dan berniaga menjadi sektor utama dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat islam Jawa saat itu.

Adapun karakteristik umum wilayah pesisir sehingga bisa dikatakan membantu aktivitas ekonomi masyarakatnya (menurut Yonvitner *et al*., 2016) adalah:

1) Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan sekaligus memiliki akses yang sangat baik dengan memanfaatkan perairan atau laut sebagai sarana akomodasi.
2) Pesisir merupakan kawasan yang melimpah akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pada abad ke-15 hingga 16 M, jalur pesisir baik di Malaka maupun di Jawa mengalami lonjakan pada aktivitas perniagaan atau perdagangan sehingga hal ini memengaruhi sektor ekonomi masyarakat pesisir. Pantai utara Jawa dimanfaatkan untuk berlabuhnya para kapal karena laut Jawa mengalami pasang surut campuran yang bersifat *diurnal* (aktif ketika siang dan relatif tenang ketika malam). Kondisi arus air laut di Laut Jawa relatif tenang dan Suhu permukaan air laut di Laut Jawa berkisar antara 27–29^{o}C (Gaol & Sadhotomo, 2017). Selain pantai, terdapat juga estuaria yang merupakan perairan semi-tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan (Amalia & Pin, 2015). Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Peran ekologis dari estuaria adalah sebagai berikut,

1) Sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut,
2) Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan, dan

buku ini tidak diperjualbelikan

3) Tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan dan udang.

Secara umum, estuaria dimanfaatkan manusia sebagai tempat pemukiman, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, jalur transportasi, dan lokasi pelabuhan atau perniagaan (Yonvitner *et al*., 2016). Di wilayah pesisir utara Jawa sendiri, estuaria dapat ditemukan di kawasan Demak, Gresik, dan kota pesisir lainnya.

D. Penutup

Meredupnya hegemoni Majapahit telah mewarnai dinamika perniagaan di Nusantara, terlebih di Pulau Jawa. Ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah pesisir Jawa sebagai bagian dari hasil interaksi masyarakat dengan pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, Gujarat, maupun Arab. Pada periode ini, beberapa kota di pesisir utara Jawa juga kian berperan penting dalam aktivitas perniagaan, baik lokal, regional, maupun sebagai penghubung perdagangan global yang lebih luas, misalnya Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Gresik, dan Surabaya tampil sebagai pusat-pusat perdagangan strategis. Dalam hal ini, faktor manusia sangat berperan penting dalam kemajuan perdagangan dan perkembangan kota-kota dagang di pesisir utara Jawa.

Kondisi sosial masyarakat pesisir yang lebih terbuka menyebabkan mudahnya penyebaran informasi dan budaya yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing yang singgah. Faktor lain yang juga berperan penting dalam faktor geografis atau kondisi, di mana wilayah pesisir Jawa memiliki kondisi alam yang mendukung terjadinya perdagangan dengan bangsa asing, utamanya kondisi perairan yang relatif tenang dan adanya estuaria di beberapa titik pantai Utara Jawa, seperti Demak dan Gresik.

E. Referensi

Amalia, N., & Pin, T. G. (2015). Zonasi estuaria Muaragembong berdasarkan salinitas permukaan perairan menggunakan penginderaan jauh. *Jurnal*

buku ini tidak diperjualbelikan

Geosains Terapan, *1*(1), 29–35. http://103.41.207.198/index.php/id/article/view/5

Amarseto, B. (2015). *Ensiklopedia kerajaan Islam di Indonesia*. Istana Media.

Cahyani, V. (2022). Pengaruh pesisir utara Jawa terhadap aktivitas perniagaan Kerajaan Demak abad ke-15 hingga ke-17 M. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, *5*(2), 101–110. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/5774

Cortesao, A. Z. (1944). *The suma oriental of Tome Pires and the book of Francisco Rodrigues*. The Hakluyt Society, 367.

Gaol, J. L., & Sadhotomo, B. (2017). Karakteristik dan variabilitas parameter parameter oseanografi Laut Jawa hubungannya dengan distribusi hasil tangkapan ikan. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *13*(3), 201. https://doi.org/10.15578/jppi.13.3.2007.201-211

Kurniawan, A. (2016). Sejarah pendidikan masyarakat pesisir Nusantara. *Tamaddun*, *4*(2), 93–110.

Lautetu, L. M., Kumurur, V. A., & Warouw, F. (2019). Karakteristik permukiman masyarakat pada kawasan pesisir Kecamatan Bunaken. *Spasial*, *6*(1), 126–136.

Maftuh, M. (2015). Islam pada masa Kesultanan Banten. *Alqalam*, *32*, 83. https://doi.org/10.32678/alqalam.v32i1.1385

Muhadi. (2018). Gresik sebagai bandar dagang di jalur sutra akhir abad XV hingga awal abad XVI (1513 M). *E-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(2), 143–154.

Nabila, N. M., Sasmito, B., & Sukmono, A. (2020). Studi karakteristik gelombang perairan Laut Jawa menggunakan satelit altimetri tahun 2016-2018 (Studi kasus: Perairan laut utara Jawa). *Jurnal Geodesi Undip*, *9*(1), 67–76.

Prasetya, S. P. (2018). Telaah integratif geografi kesejarahan. *Jurnal UNESA*, (July), 1–11.

Pratama, N. (2017). *Pengaruh Hindu pada atap Masjid Agung Demak*. Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia. https://doi.org/10.32315/SEM.1.A203

Yonvitner, Susanto, H. A., & Yuliana, E. (2016). Pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*, 1–39.

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB VI

PERKEMBANGAN PELABUHAN TUBAN
PADA MASA PERALIHAN (ABAD KE-15–18 MASEHI)

Vega Andika Kusuma & Labuda Shofiya Ananda

A. Perkembangan Pelabuhan Tuban Abad ke 13–14 Masehi

Selama abad ke-13 dan ke-14 Masehi, Pelabuhan Tuban merupakan salah satu pelabuhan penting dalam sejarah maritim Nusantara. Pelabuhan ini terletak di pantai utara Pulau Jawa dan memiliki akses langsung ke Samudra Hindia. Tuban menjadi pusat perdagangan yang vital, menghubungkan wilayah pedalaman Jawa dengan pelabuhan-pelabuhan di luar Nusantara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, Tuban berperan sebagai tempat pengumpulan komoditas dari wilayah pedalaman. Sejumlah barang berharga dan

V. A. Kusuma & L. S. Ananda
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: vega.andika.22073316@students.um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis
Kusuma, V. A. & Ananda, L. S. (2025). Perkembangan Pelabuhan Tuban pada Masa Peralihan (Abad XV–XVIII Masehi). Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (65–81). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1517, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

komoditas penting dikumpulkan di Tuban sebelum didistribusikan lebih lanjut. Ini mencerminkan peran Tuban sebagai *collecting center* yang berperan mengumpulkan berbagai jenis komoditas, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penelitian arkeologis di wilayah tersebut.

Jika merujuk ke prasasti dari era Kadiri, tampaknya Pelabuhan Kembang Putih yang terletak di Kota Tuban adalah sebuah indikasi bahwa kota ini telah memiliki peran penting dalam perdagangan sejak awal. Lebih dari sekadar menjadi tempat penyediaan barang dari berbagai daerah, Tuban berperan sebagai pusat pengumpulan, menerima berbagai jenis komoditas dari berbagai lokasi di pedalaman. Pada abad ke-13, Tuban sepertinya semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan yang signifikan selama masa Majapahit. Pada saat ini Pelabuhan Tuban berkembang menjadi *entrepot* yang tidak hanya menjadi pusat pertemuan pedagang dari berbagai negeri, tetapi juga mengimpor dan mengekspor barang-barang yang berasal dari berbagai negeri (Leong, 1990).

Dalam masyarakat pra-industri, pengangkutan barang jarak jauh memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, komoditas perdagangan yang mencapai daerah-daerah terpencil umumnya berupa barang berharga yang tahan lama, seperti batu mulia, sutra, dan produk-produk khusus yang hanya diproduksi di lokasi tertentu. Barang-barang tersebut biasanya lebih berhubungan dengan kepentingan elite kerajaan daripada menjadi barang konsumsi umum. Dalam konteks ini, peran Tuban sebagai bagian dari Kerajaan Kadiri adalah untuk mendukung golongan elite. Melalui perdagangan barang-barang mewah ini, Tuban melayani kaum elite dalam upaya menciptakan dan meningkatkan status sosial bangsawan di daerah pedalaman. Peran ini tampaknya berlanjut hingga masa Majapahit. Tuban juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Penelitian sejarah mencatat bahwa perdagangan kain dari Benggala merupakan komoditas yang penting dan berlanjut hingga abad ke-16 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Tuban adalah pusat perdagangan yang berhubungan dengan wilayah-wilayah luar Nusantara seperti Benggala.

buku ini tidak diperjualbelikan

Seperti yang diketahui, Tuban adalah salah satu dari empat kota penting selama periode Majapahit. Kota-kota lain yang memiliki peran serupa meliputi Gresik, Surabaya, dan ibukota Kerajaan Majapahit sendiri. Selain itu, terdapat juga pelabuhan yang terletak lebih ke dalam daratan yang diakui sebagai pelabuhan kedua yang sangat signifikan, yaitu Canggu (Mills, 1970). Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuban merupakan tempat yang penting pada waktu itu, hal ini menyebabkan banyaknya orang-orang asing yang datang ke Tuban sehingga terjadilah proses akulturasi budaya. Proses datangnya orang asing ke Tuban ialah menggunakan jalur laut sehingga pelabuhan Tuban memiliki peran yang sangat penting terhadap masuknya budaya asing, salah satunya dengan datangnya para pedagang dari India, Arab, Persia, dan Eropa. Lewat jalur tersebut, Islam bisa masuk ke Nusantara.

B. Kedatangan Para Ulama dan Peran Pelabuhan Tuban dalam Islamisasi

Dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, wilayah pesisir memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pintu masuk agama Islam. Hal tersebut mengakibatkan penyebaran agama Islam di Nusantara bisa sampai ke pedalaman. Ada tiga wilayah penting yang dianggap sebagai pintu masuk utama penyebaran Islam, yaitu Gresik, Surabaya, dan Tuban. Perdagangan lewat pesisir menjadi faktor penting masuknya Islam di Nusantara, hal tersebut terjadi karena para orang-orang yang hidup di wilayah pesisir, khususnya di kota-kota pelabuhan, berinteraksi langsung dengan para pedagang-pedagang dari India, Persia, Eropa, dan Arab. Mereka yang hidup di wilayah pesisir kota pelabuhan, menunjukan sosial budaya yang lebih berkembang yang disebabkan dari percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar (Djakariah, 2014).

Pada abad ke-8 dan ke-9, Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara melalui proses yang lumayan panjang. Proses Islamisasi di Nusantara melalui para saudagar Arab dan Persia yang berlayar untuk mencari barang dagangan, disertai oleh para *mubaligh* yang akan

buku ini tidak diperjualbelikan

menyebarkan Islam ke Nusantara (Hadi, 2016). Dalam penyebaran Islam di Tuban terdapat tiga tokoh yang berperan penting, yaitu Syekh Ibrahim Asmoroqondi, Sunan Bonang, dan Syekh Abdullah Asy'ari (Sunan Bejagung).

Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi merupakan putra dari seorang Syekh Jumaluddin Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada abad ke-14. Ayah dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi merupakan seorang ulama *ahlusunnah* yang bermazhab Syafi'i. Syekh Malik Ibrahim Asmoroqondi mendapatkan tugas dari ayahnya untuk berdakwah di wilayah Asia (Mahmudah, 2015). Pada saat Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi sedang melaksanakan dakwah, beliau dinikahkan dengan putri raja Campa, di mana Campa adalah tempat yang sedang ia dakwahi, putri raja Campa tersebut bernama Dewi Candrawulan. Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Ali Rahmatullah dan Raden Ali Murtadlo dari pernikahannya dengan Dewi Candrawulan (Rahimsyah, 1998).

Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi meninggalkan Campa dan pergi berlayar menuju Jawa. Namun, Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi singgah terlebih dahulu di Palembang sebelum ke Jawa. Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi mengikuti jejak dakwah Syekh Jumadil Kubro sekaligus untuk memenuhi amanah dari ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah Asia, hal tersebut dinyatakan dalam *Babad Walisongo.* Dalam perjalanan Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi berlayar menggunakan perahu untuk menyusuri pesisir pantai Sumatra sampai ia beserta rombongannya singgah di Palembang (Purwadi, 2005). Kedatangan rombongan Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi disambut baik oleh Adipati Arya Damar, yang merupakan pangeran dari Majapahit yang diutus dan diangkat menjadi penguasa Palembang. Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi yang memiliki ilmu spiritual Islam yang tinggi berhasil membawa Arya Damar untuk memeluk agama Islam (Purwadi, 2005).

Adapun hal berbeda yang diutarakan oleh Wawan Susetya di dalam bukunya, *Senyum Manis WaliSongo,* yang menyatakan bahwa kedatangan dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi ke Jawa adalah

buku ini tidak diperjualbelikan

untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menemani sang putra Ali Rahmatullah yang diundang oleh bibinya, yang merupakan istri dari Prabu Kertabumi. Wilayah Majapahit mengalami musim paceklik yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan melonjaknya harga sandang pangan sehingga rakyat Majapahit mengalami kelaparan pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi (Susetya, 2019).

Menurut Hasanu Simon, Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi bersama putranya Raden Rahmat, Sayyid Ali Murthadlo, dan Abu Hurairah tiba di wilayah Jawa. Bersama para rombongannya, Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi mendarat di Tuban, menetap dan melakukan dakwah di wilayah Tuban. Namun, Syekh Maulana Ibrahim berada di Tuban tidak begitu lama karena sakit dan akhirnya meninggal dunia. Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi dimakamkan di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Tuban (Simon, 2008). Pelabuhan Tuban yang pada saat itu merupakan pelabuhan utama Majapahit menjadi alasan Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi untuk melabuhkan perahunya di Gesikharjo sebagai kewaspadaan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban. Gesikharjo berada di sebelah timur dari pelabuhan Tuban yang menjadi tempat mendaratnya Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi dan menjadi tempat berdakwah kepada masyarakat sekitar Gesikharjo yang cukup jauh dari ramainya pelabuhan Tuban.

Syekh Ibrahim Asmoroqondi beserta rombongannya di Gesikharjo kemudian membuat pemukiman dan menetap di sana. Hal ini merupakan cara berdakwah Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi melalui daerah pesisir, di mana posisi Gesikharjo berada di daerah pesisir bersama dengan wilayah lain, seperti Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Cara berdakwah tersebut membentuk model penyebaran Islam yang unik, mulai dari pesisir hingga pedalaman. Dari strategi ini akhirnya mendorong munculnya "Borjuasi Islam" di daerah pedalaman. Hal ini juga yang nantinya membentuk pola Islam pedesaan, di mana jaringan Islam pedesaan ini akan menjadi kekuatan Islam melalui tarekat dan pesantren (Lombard, 2005). Tarekat dan pesantren merupakan dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu

buku ini tidak diperjualbelikan

sama lain. Metode dakwah *bil lisan* dan *bil hal* merupakan metode yang digunakan oleh Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi dalam dakwahnya. Metode ini penting yaitu setiap ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Sekitar 15 tahun dari 1410–1425 M, Syekh Maulana Ibrahim mulai berdakwah di Tuban akhirnya. Syekh Maulana Ibrahim meninggal dan dimakamkan di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Tuban (Himmah, 2020).

Kedua, adalah Raden Makdum Ibrahim atau yang sering dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang ternyata merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan orang yang ikut berperan dalam mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro. Dalam buku yang berjudul *Het Book van Bonang* (1916), Schrieke menjelaskan bahwa Sunan Bonang lahir di Desa Bonang, Lasem pada tahun 1464 M. Menggunakan gending, sastra, dan kesenian merupakan suatu metode penyebaran Islam yang digunakan oleh Sunan Bonang. Bukti nyata di bidang sastra yang dipakai oleh Sunan Bonang yaitu *Suluk Wujil.* Daerah Lasem, Rembang, dan Tuban merupakan wilayah tempat Sunan Bonang berdakwah atas perintah dari Sunan Ampel selaku ayahnya sendiri.

Dari latar belakang Sunan Bonang, yaitu dari keluarga bangsawan Tuban, membuat dirinya belajar kesenian dan budaya Jawa langsung dari lingkungan kerajaan sehingga ia menguasai seluk-beluk serta hal-hal yang berhubungan dengan sastra, yang salah satunya ialah *Tembang Macapat* (Sunyoto, 2017). Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending-gending Jawa yang bernapaskan Islam karena kepiawaiannya dalam bidang sastra, hal tersebut juga dipakai untuk menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa bagian Timur. Kepandaian Sunan Bonang dalam menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat Jawa, terutama wayang dan musik gamelan, menjadi salah satu kesuksesan Sunan Bonang dalam berdakwah. Sarana dakwah melalui pertunjukan wayang yang disisipkan ajaran Islam di dalamnya mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat. Untuk menarik simpati masyarakat, Sunan Bonang menggunakan dakwah melalui kesenian rakyat, yaitu berupa seperangkat gamelan atau yang di-

buku ini tidak diperjualbelikan

sebut dengan Bonang. Setiap ciptaan syair lagu gamelan berisi pesan moral agama dan diselingi dengan *syahadatain* (ucapan dua kalimat syahadat), *sekaten* yang berasal dari *syahadatain* merupakan istilah dari gamelan yang mengiringinya (Saputra, 2019).

Tradisi *selamatan* merupakan salah satu tradisi yang diwariskan oleh Sunan Bonang. Menurut Agus Sunyoto, *slametan* ini berasal dari ajaran Tantrayana sekte Bhairawa Tantra, yang awalnya memuja Dewi Durga melalui ritual *Panca Makara* di tempat terbuka atau tanah lapang (*ksetra)*. Makanan yang disajikan dalam upacara ini meliputi daging *(mamsa)*, ikan *(matsya)*, minuman keras *(madya)*, persetubuhan bebas *(maithuna)*, dan samadhi *(mudra)*. Sunan Bonang kemudian mengadakan acara serupa dengan *panca makara* yang lebih beradab dengan tetap mempertahankan format melingkar, tetapi menggantikan hidangannya dengan nasi tumpeng, daging ayam, ikan, minuman biasa, serta mantra yang diganti dengan kalimah *thayyibah* dan ayat Al-Qur'an (Sunyoto, 2017). Akhirnya ritual tersebut diberi nama *Slametan* atau yang sekarang kita kenal dengan *kenduri*, dan hingga saat ini masyarakat tetap masih melestarikan *slametan* yang dibuat oleh Sunan Bonang (Sunyoto, 2017).

Sunan Bonang meninggal saat berdakwah di Pulau Bawean pada tahun 1525. Masyarakat memberi hormat kepada Sunan Bonang dan dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa. Banyak sekali versi terkait dengan tempat dimakamkannya Sunan Bonang, namun lokasi makam Sunan Bonang yang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, merupakan versi yang dipercayai oleh masyarakat terkait makam asli dari Sunan Bonang. Ketika meninggal, karena *karomah* dan kebijakannya dalam berdakwah sebagai *waliyullah* para santri Sunan Bonang yang berada di banyak tempat menginginkan Sunan Bonang dimakamkan di daerah masing-masing para santri, meliput wilayah Tuban, Lasem, dan Madura. Akhirnya, Madura dipilih karena mereka beranggapan bahwa santri-santri dari Madura dikenal patuh dan taat kepada Sunan Bonang. Dari hal tersebut, di setiap daerah-daerah yang disebutkan tadi mengakibatkan adanya

buku ini tidak diperjualbelikan

beberapa versi yang dipercayai masyarakat setempat sebagai makam dari Sunan Bonang.

Ketiga, Sunan Bejagung, yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asy'ari berasal dari Hadramaut. Menurut R. Soeparno (1983), Sunan Bejagung memiliki nama asli Syekh Muhammad Asing (Modin Bejagung) merupakan Putra dari Syekh Muhandil Kubro yang diambil putra oleh Prabu Cingkaradewa Raja Campa. Awalnya, setelah Kerajaan Pasai runtuh, Syekh Abdullah Asy'ari beserta rombongannya tiba di Jawa. Rombongan ini juga termasuk ulama Hadramaut yang dipimpin oleh Syekh Jumadil Khubro. Di antara mereka adalah Syekh Ibrahim Asmoroqondi, Maulana Ishaq, Syekh Abdullah Asy'ari, dan Maulana Malik Ibrahim. Setibanya di Jawa, Syekh Jumadil Khubro menugaskan Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah di Gresik, Maulana Ishaq di Banyuwangi, Syekh Ibrahim Asmoroqondi dan Syekh Abdullah Asy'ari di Tuban, sementara Syekh Jumadil Kubro sendiri berdakwah di Kerajaan Majapahit.

Kedatangan Syekh Abdullah Asy'ari di Tuban disambut dengan baik oleh Adipati Tuban ke-6, Arya Dikara. Arya Dikara menunjukkan penghormatannya kepada Syekh Abdullah Asy'ari dengan memberikan tanah perdikan yang sekarang dikenal sebagai Bejagung. Di tanah perdikan ini, Syekh Abdullah Asy'ari mendirikan lembaga keislaman pada abad ke-15. Inilah tempat dimulainya aktivitas dakwah Syekh Abdullah Asy'ari yang dilakukan secara rutin bersama masyarakat hingga mereka tertarik dengan ajaran Islam. Syekh Abdullah Asy'ari mengadopsi gaya bahasa tutur yang lembut dan sopan dalam berdakwah, dan dengan keramahan serta kebaikannya, ia mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Selain itu, Syekh Abdullah Asy'ari mendirikan sebuah masjid yang menjadi pusat perkembangan agama Islam di daerah tersebut. Akhirnya, agama Islam berkembang pesat di wilayah tersebut.

Dengan cara serupa, Syekh Abdullah Asy'ari menerapkan strategi dakwah yang mirip dengan para wali lainnya, yakni melalui pengajian, seperti yang saat ini diterapkan dengan sistem *sorogan*. Kiai atau Sunan berperan sebagai pemimpin dalam pengajian dan dikelilingi

buku ini tidak diperjualbelikan

oleh para santri untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Berdasarkan cerita masyarakat, Moden Asngari atau Syekh Abdullah Asy'ari dikenal sebagai Sunan Bejagung Lor di kalangan penduduk setempat. Pada mulanya, Syekh Abdullah Asy'ari adalah seorang petani jagung biasa yang memiliki keahlian bertani yang lebih dari rata-rata. Dia memanfaatkan keahliannya dalam bercocok tanam untuk menyatu dengan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam di Desa Bejagung.

Secara umum, Islamisasi di Tuban bisa dilakukan melalui beberapa saluran. *Pertama*, Islamisasi yang dibawakan oleh saudagar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran perdagangan terkait dengan masuknya Islam di Nusantara. Hasil bumi yang di Nusantara yang sangat melimpah menjadi minat para saudagar dari berbagai negara, seperti Cina, Arab, Persia, dan sebagainya. Adapun tiga tempat yang dianggap penting terkait masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yaitu Tuban, Gresik dan Surabaya. Ketiga tempat tersebut menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang asing dan menjadi jalur transit bagi saudagar muslim sebelum melanjutkan perjalanan (Syam, 2005).

Kedua, proses Islamisasi di Tuban juga menggunakan saluran pernikahan dalam menyebarkan agama Islam. Saluran Islamisasi melalui pernikahan ini melibatkan saudagar Muslim dengan anak bangsawan dari kalangan kerajaan. Berdasarkan syariat Islam, jika pernikahan yang dilangsungkan melibatkan orang yang berbeda agama, sebelum pernikahan dilangsungkan, pasangannya harus masuk Islam dahulu sebagai syarat utama dalam melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Pernikahan ini memunculkan komunitas-komunitas Muslim yang terdapat di wilayah pesisir (Yatim, 2012).

Ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa pernikahan mempercepat Islamisasi seperti dalam babad, hikayat, dan tradisi. Seperti halnya yang dijelaskan dalam *Babad Tanah Jawa* mengenai pernikahan putri Campa dan Brawijaya V, pernikahan antara Sayyid Ali Rahmatullah dengan Dewi Condrowati yang merupakan putri dari Raja Tuban Arya Teja juga dijelaskan dalam *Babad Tanah*

buku ini tidak diperjualbelikan

Jawa. Adapun juga dalam *Babad Tuban yang menjelaskan tentang pernikahan antara Raden Ayu Teja* dengan Syekh Ngabdurrahman yang kemudian memiliki seorang putra bernama Syekh Jali. Beberapa babad di atas, menjelaskan bahwa Islamisasi lewat pernikahan banyak dilakukan oleh para bangsawan dengan para saudagar (Marwati Djoenet Poesponegoro & Notosusanto, 1984).

Ketiga, saluran Islamisasi menggunakan jalur Pendidikan dalam penyebarannya, baik lewat pesantren maupun masjid, seperti yang dilakukan oleh para Wali Songo. Para wali juga mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan tempat pengajian guna menunjang proses penyebaran agama Islam. Masjid menjadi tempat tumbuh kembangnya aktivitas pendidikan Islam dikalangan masyarakat. Masjid diyakini merupakan peninggalan para wali yang pernah berdakwah di daerah tersebut. Sebagaimana dengan Masjid Giri yang diidentifikasi sebagai peninggalan dari Sunan Giri, Masjid Sunan Ampel yang didirikan oleh Raden Rahmad, dan sebagainya (Syam, 2005).

Selain masjid, para wali juga mendirikan pesantren dalam proses penyebaran agama Islam. Pondok pesantren tidak dapat terlepas dari peran para ulama. Jejak para wali dalam penyebaran agama Islam terdapat di setiap daerah, seperti pesantren Sunan Ampel di Surabaya, pesantren Drajat di Lamongan, dan sebagainya. Puncak perkembangan Islam yaitu ketika berdirinya Kerajaan Demak Bintoro sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dengan Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak.

Keberadaan Islam di Tuban terbukti dengan peninggalan dari Sunan Bonang yaitu *kalpataru* yang menunjukkan bahwa Islam diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu. *Kalpataru* merupakan sebuah bukti wujud toleransi umat Islam dengan agama lokal pada abad ke-15 sampai ke-16. Dalam ukiran *Kalpataru* terdapat empat undakan dan bangunan keberagaman agama di dalamnya. Peninggalan tersebut membuktikan bahwa Sunan Bonang merupakan salah satu ulama besar yang menerima keberadaan agama lain di sekitarnya. Kerukunan umat beragama pada masa Sunan Bonang ditunjukkan dalam ornamen-ornamen bangunan ibadah dalam satu tiang. Metode

buku ini tidak diperjualbelikan

yang digunakan Sunan Bonang sangat efektif karena metode yang digunakan tidak pernah mengubah tatanan tradisi yang telah ada sehingga tradisi Islam dan Hindu-Buddha hidup berdampingan, bahkan berkesinambungan dengan tradisi Hindu-Buddha yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat bagaimana *kalpataru* merupakan representasi antara tradisi Islam dan Hindu-Buddha yang ditemukan di kompleks makam Sunan Bonang.

Sumber: Njoto (2014); Laili *et al*. (2022)

Gambar 6.1 Kalpataru Sunan Bonang

Posisi pelabuhan Tuban yang strategis menyebabkan pelabuhan Tuban kian ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Pelabuhan Tuban menjadi tempat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari Arab, India, Eropa, Asia Tengah, dan pribumi, termasuk pedagang

buku ini tidak diperjualbelikan

Cina yang turut mendorong penyebaran Islam di sekitar pelabuhan Tuban. Hal ini menunjukkan adanya peran penting wilayah pesisir dan peran para pelaku ekonomi dalam eksistensi Islam di wilayah Tuban atau bahkan secara luas di pesisir utara Jawa. Perkembangan Tuban tidak dapat dilepaskan dari posisinya di jalur perdagangan, pelayaran dan perkembangan Islam walaupun Tuban tidak masuk kedalam jalur Sutera Utama (Fuad, 2013).

Perlu diketahui bahwa selain Cina, para saudagar dari Persia, Arab, dan India juga termasuk para pemilik modal. Dengan adanya aktivitas perdagangan serta mengalirnya dana investasi dari pihak asing termasuk Tuban menjadikan kegiatan sektor riil berjalan dengan kondusif. Hal ini yang mengakibatkan para saudagar asing masuk ke dalam kelompok masyarakat elit. Maka dari itu para saudagar menjadi menantu para bangsawan pribumi (Mukarrom, 2014).

Peran Islam dalam politik lokal di Nusantara dimulai dengan dominasi Kerajaan Islam atas Selat Malaka, yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan titik awal Islamisasi. Melalui proses ini, perdagangan, budaya, politik, dan intelektualitas Islam berkembang bersamaan. Para pedagang Islam yang sudah mapan kemudian menjalin ikatan pernikahan dengan penguasa setempat, memberikan kontribusi diplomatik dan pengalaman internasional dalam perdagangan, serta mencoba memengaruhi penguasa lokal untuk memeluk Islam agar dapat bersaing dengan pedagang Hindu-Buddha dari Jawa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk legitimasi untuk melawan Majapahit dan melepaskan diri dari pemerintahan (Rozi, 2018).

C. Perdagangan Pelabuhan Tuban Setelah Islamisasi

Di bawah kontrol pemerintahan Majapahit, Pelabuhan Tuban menjadi pelabuhan internasional sekaligus pelabuhan utama. Pada masa-masa selanjutnya, Tuban mulai mengalami kemunduran. Menurut Edi Sedyawati, sejak keruntuhan Majapahit, Tuban menjadi semakin otonom dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan hingga abad ke-16. Bahkan, pada tahun 1599, Tome Pires dan pengunjung-pengunjung Belanda yang singgah di Kota Tuban

buku ini tidak diperjualbelikan

terkesan oleh kemegahannya. Meskipun demikian, pandangan De Graff pada abad ke-15 dan ke-16 menyatakan bahwa kapal-kapal dagang yang lebih besar harus melepaskan sauh di laut yang lebih jauh dari Kota Tuban karena pendangkalan pantai akibat endapan lumpur. De Graff, bagaimanapun, tidak dapat memastikan apakah tujuh abad sebelumnya kapal-kapal besar dapat lebih mudah berlabuh di pelabuhan Tuban seperti sekarang.

Selain efek dari pendangkalan perairan, juga dicatat adanya kemunculan perompak atau pembajak kapal dagang di perairan utara laut Jawa. Menurut De Graff, pada abad ke-15 dan ke-16, dengan mayoritas penduduk Tuban yang merupakan nelayan, kemungkinan besar bahwa warga Tuban terlibat dalam perompakan terhadap kapal dagang yang melintas di perairan Tuban menggunakan kapal kecil mereka, terutama kapal-kapal dagang yang membawa rempah-rempah dan melintas di utara laut Jawa menuju kota-kota dagang seperti Gresik dan Surabaya menjadi sasaran mereka.

Ketika Belanda pertama kali mencapai Tuban, mereka menemukan tiga pengunjung yang ternyata diawaki oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai "bajak laut" (*freebooter*) dari Tuban. Namun, upaya ini dilakukan untuk memulihkan perdagangan Tuban yang sedang lesu. Pendapat ini mengungkapkan bahwa pada Abad Pertengahan, perairan utara Tuban sangat rawan terhadap tindakan perompakan kapal. Edi Sedyawati mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa setelah Tuban ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1619 M, Tuban bukan lagi pelabuhan utama, melainkan Jepara. Ini menyebabkan penurunan pelabuhan Tuban dan munculnya perompak yang merampas muatan kapal yang melintas di perairan tersebut. Pelabuhan yang kurang ramai memaksa penduduknya turun ke perairan untuk mencari barang rampasan yang dapat dijual di pelabuhan.

Fenomena ini dipengaruhi oleh kebijakan politik masa Panembahan Senopati yang menghapus armada lautnya dan fokus pada pengaruhnya di seluruh Pulau Jawa. Perubahan garis pantai di pesisir Tuban juga berdampak besar pada perdagangan di pelabuhan

buku ini tidak diperjualbelikan

Tuban, yang mengalami penurunan. Hal ini mendorong penduduk Tuban untuk menggunakan tindakan kekerasan terhadap pedagang Cina, memaksa mereka untuk berlabuh di pelabuhan. Ini mengakibatkan konfrontasi di mana orang Cina dikalahkan dan kargonya disita. Akibatnya, Tuban mendapat reputasi sebagai sarang perompak dalam sumber-sumber Cina.

Pelabuhan Tuban mengalami perubahan yang saling berkaitan dalam beberapa aspek. Perubahan tersebut mencakup keadaan pelabuhan, pelaku perdagangan, kepemimpinan, dan kemajuan pelabuhan. Kehadiran komunitas pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Arab, dan Persia memengaruhi jenis komoditas yang diperdagangkan. Komoditas yang lebih umum dan relevan bagi komunitas Muslim, seperti kain, logam, dan gula, menjadi lebih dominan dalam perdagangan.

Perubahan dalam perdagangan tersebut juga memengaruhi ekonomi Pelabuhan Tuban. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan dengan komunitas Muslim yang semakin besar menciptakan peluang pekerjaan dan usaha yang lebih besar. Hal ini mencerminkan kemajuan pelabuhan, di mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan berjalan seiring. Selain itu, perubahan dalam tata kelola dan kepemimpinan pelabuhan mendukung perkembangan di pelabuhan Tuban.

Kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang efisien menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan pelabuhan. Hal ini pastinya juga berhubungan dengan pajak dan bea cukai, pengelolaan pajak dan bea cukai umumnya menjadi tanggung jawab pemerintahan dan kepemimpinan lokal di wilayah tersebut. Pada masa itu, wilayah-wilayah seperti Tuban di Jawa Timur memiliki pemerintahan lokal yang dikenal dengan sebutan "hulu" (atau juga "kabupaten") yang dipimpin oleh seorang kepala distrik atau pemimpin setempat. Kepala distrik atau pemimpin lokal ini biasanya memiliki wewenang dalam pengumpulan pajak, termasuk bea cukai, untuk mendukung pendapatan daerah dan membiayai proyek-proyek local administrator

buku ini tidak diperjualbelikan

pelabuhan dan pemerintah setempat memastikan kelancaran aktivitas perdagangan dan mengatur peraturan yang diperlukan.

Kemunduran Tuban dimulai pada saat Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung menyerang Tuban pada abad ke-17. Akibat takluknya Tuban terhadap Mataram Islam membuat Tuban tidak lagi sebagai pelabuhan utama, justru Jepara dipilih oleh Mataram Islam sebagai pelabuhan utama. Selain faktor tersebut, sepinya pelabuhan Tuban juga disebabkan oleh pendangkalan dan munculnya para perampok di sekitar pelabuhan, sehingga hal tersebut sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat pesisir Tuban yang bergantung pada ekonomi pelabuhan (Graaf & Pigeaud, 1985). De Graaf menjelaskan bahwa pada abad ke-17 dan 18 Tuban tidak lagi penting dalam percaturan politik dan ekonomi Nusantara bahkan Internasional (Graaf & Pigeaud, 1985).

D. Penutup

Tuban adalah salah satu dari empat kota penting selama periode Majapahit. Pada periode tersebut, Tuban yang mulanya berkembang dari pelabuhan Kambang Putih masa Airlangga (Kerajaan Kediri) terus mengalami perkembangan, bahkan menjadi pelabuhan pengumpul komoditas pedalaman atau dikenal sebagai *collecting center*, yang kemudian juga menjadi pelabuhan *entrepot* yang ramai didatangi pedagang asing, termasuk pula kedatangan pedagang muslim dari beberapa wilayah, seperti India, Cina, dan Arab. Interaksi antara pedagang asing dengan masyarakat pesisir Tuban ini kemudian mendorong masuknya Islamisasi di wilayah pesisir. Namun, Tuban yang mulanya menjadi pelabuhan penting dari periode Hindu-Buddha hingga masa peralihan (kerajaan-kerajaan Islam) mulai mengalami penurunan fungsi, utamanya disebabkan karena proses pendangkalan akibat endapan lumpur di daerah pelabuhan. Selain fenomena alam, Tuban juga mulai mengalami kemunduran setelah adanya kebijakan politik Panembahan Senopati terhadap kedatangan pedagang-pedagang asing yang kemudian berdampak pada kemunculan perompak

buku ini tidak diperjualbelikan

atau pembajak kapal. Karena itu, Tuban mendapat reputasi cukup buruk sebagai sarang perompak dalam sumber-sumber Cina. Secara berangsur Tuban semakin ditinggalkan oleh pedagang asing, hingga pada abad ke-17 dan ke-18 Tuban tidak lagi penting dalam percaturan politik dan ekonomi Nusantara, bahkan internasional.

E. Referensi

Djakariyah. (2014). *Sejarah Indonesia II*. Ombak.

Fuad, A. N. (2013). *Tradisi intelektual muslim Uzbekistan*. UIN Sunan Ampel Press.

Graaf, D., & Pigeaud. (2001). *Kerajaan Islam pertama: Tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI*. Terjemahan Grafiti Press dan KITLV. PT Pustaka Utama.

Hadi, A. (2016). *Cakrawala budaya Islam*. IRCiSoD.

Laili, V. S. A., Ananda, D. A. R., Putra, G. A., & Prahardana, M. W. (2022). Kosmologi kalpataru: Representasi kehidupan dan pengharapan masyarakat Jawa di abad 9-16 Masehi. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, *16*(2), 265. https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/27494

Hall, K., Kathirithamby-Wells, J., & Villiers, J. (1991). The Southeast Asian port and polity: Rise and demise. *The Journal of Asian Studies*, *50*(4), 995. DOI: 10.2307/2058623.

Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa silang budaya: Batas-batas pembaratan, kajian terpadu bagian 1*. Terj. Winarsih Partiningratin Arifin. Gramedia.

Mahmudah, S. N. (2015). Kepurhakalaan Kompleks Makam Syekh Ibrahim Asmoroqondi di Tuban (Studi Sejarah dan Akulturasi) [*Skripsi*]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah nasional Indonesia III*. Balai Pustaka.

Mills, J. V. G. (ed). *Ma Huan Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores (1433)*. Cambridge University Press.

Mukarrom, A. (2014). *Sejarah Islam Indonesia 1*. UIN Sunan Ampel Press.

Njoto, H. (2014). À propos d'une pièce en bois sculptée de l'art du Pasisir (xve s.-xviie s.) : le « kalpataru ». *Archipel*, *88*, 169–188. 10.4000/archipel.553.

buku ini tidak diperjualbelikan

Purwadi. (2005). *Babad tanah Jawi*. Gelombang Pasang.

Rahimsyah. (1998). *Jejak-jejak Wali Songo: Penyebaran Islam di Jawa*. Mitra Umat.

Rozi, T. F. (2018). Peranan pelabuhan Tuban dalam proses islamisasi di Jawa abad XV-XVI [*Skripsi*]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Saputra, F. F. N. (2019). Metode dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa dalam buku Atlas Walisongo Karya Agus Sunyoto dan relevansinya dengan materi SKI Kelas IX [*Skripsi*]. IAIN PONOROGO.

Simon, H. (2008). *Misteri Syekh Siti Jenar*, *cetakan V*. Pustaka Pelajar.

Separmo, R. (1983). *Catatan sejarah 700 tahun Tuban*. Pemkab Tuban.

Sunyoto, A. (2017). *Atlas Wali Songo*. Pustaka Iman.

Susetya, W. (2019). *Senyum manis Walisongo*. DIVA Press.

Syam, N. (2005). *Islam pesisiran*. Lkis.

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB VII

SUNGAI KALIMAS DAN RELASINYA DENGAN PELABUHAN DAN PERDAGANGAN DI SURABAYA TAHUN 1800–1940

Nenci Aprilia Nabela & Deny Yudo Wahyudi

A. Surabaya dan Sungai Kalimas

Sungai Kalimas yang mengalir membelah Kota Surabaya tidak hanya merupakan elemen geografis saja, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap adanya Pelabuhan dan perekonomian Kota Surabaya. Sungai Kalimas merupakan awal berkembangnya Kota Surabaya menjadi kota yang besar. Surabaya juga dikenal sebagai kota industri karena letak geografisnya yang berada di daerah pesisir sehingga berakibat pada Kota Surabaya yang semakin terkenal serta dijadikan sebagai kota pelabuhan yang menjual berbagai macam barang dari wilayah pedalaman ke beberapa wilayah untuk mengekspor barang. Namun, Pelabuhan Kalimas berfungsi sebagai gerbang perdagangan pada masa Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Sungai Kalimas menjadi kawasan perdagangan dan transportasi.

N. A. Nabela & D. Y. Wahyudi
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: nenci.aprilia.2107315@students.um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis
Nabela, N. A. & Wahyudi, D. Y. (2025). Sungai Kalimas dan Relasinya dengan Pelabuhan dan Perdagangan di Surabaya Tahun 1800–1940. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (83–93). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1518
E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

Pelabuhan Surabaya merupakan salah satu pelabuhan penting dan strategis pada masa kolonial. Kota Surabaya menjadi penghubung antara masyarakat pesisir dan pedalaman sehingga di sana menjadi kawasan yang ramai dengan lalu lintas perdagangan. Peranan Sungai Kalimas sebagai jalur perdagangan yang ada di Kota Surabaya sangat terlihat pada masa itu dan dimanfaatkan oleh Belanda sehingga mampu mengubah perekonomian bagi Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis kemudian membahas lebih jauh tentang pengaruh dari Sungai Kalimas bagi pelabuhan dan perekonomian di Kota Surabaya pada masa kolonial. Karena jika dilihat, Sungai Kalimas menjadi salah satu penopang dari perekonomian di Surabaya.

Guna mengetahui peran Sungai Kalimas terhadap pelabuhan dan perdagangan di Surabaya, pendekatan sejarah digunakan dengan berpedoman pada beberapa langkah, antara lain heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap heuristik, penulis menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Menurut Sugiyono (2012, dalam Putri, 2019), studi kepustakaan menitikberatkan kepada kajian teoretis yang bersumber kepada literatur ilmiah. Tujuan dari metode tersebut adalah untuk memberikan gambaran pembaca tentang topik yang sedang diteliti atau dibahas (Rondiyah *et al*., 2017). Literatur yang digunakan oleh penulis dalam penulisan buku ini adalah buku cetak maupun noncetak, artikel jurnal, dan catatan kuliah. Selanjutnya, pada tahap kritik, penulis memilah-milah literatur yang telah didapatkan. Literatur yang telah dipilah dan relevan dengan topik, nantinya akan digunakan di dalam penelitian. Pada tahap interpretasi, penulis menafsirkan literatur yang akan digunakan sebagai sumber penelitian, kemudian menuliskannya melalui tahap historiografi.

buku ini tidak diperjualbelikan

B. Kondisi Geografis Sungai Kalimas Surabaya

Sungai Kalimas terletak di Surabaya, yakni kota terbesar kedua di Indonesia dan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kalimas menjadi salah satu sungai yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Kota Surabaya. Sungai ini memiliki dimensi panjang sekitar 15 km, dengan lebar 20–35 m, yang memiliki kedalaman 1,26–2,7 m. Sungai Kalimas merupakan pecahan dari Sungai Brantas yang berhulu di Mojokerto, kemudian mengalir ke arah timur laut sebelum bermuara di Surabaya (menuju ke Selat Madura). Kalimas merupakan muara dari Sungai Brantas yang terpecah menjadi sembilan cabang, yakni Kali Greges, Kali anak, Kali Krembangan, Kali Mas, Kali pegiringan, Kali Anda, Kali Bokor, Kali Palaka, dan Kali Pacekan yang sudah memecah Kota Surabaya.

Sungai Kalimas sendiri merupakan bandar pelabuhan tradisional di Surabaya sebelum masa Kolonial Belanda. Dalam buku *Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe*, wilayah Kalimas dimulai dari Gunungsari, kemudian mengalir ke arah timur. Selanjutnya di dekat Wonokromo terpecah menjadi dua, yang pertama menuju arah Jagir Wonokromo, sedangkan yang kedua menuju arah Darmokali, Dinoyo, Kaputran, dan Kayoon. Setelah itu, belok ke arah Ketabangkali dan Ngemplak. Kemudian di antara Jalan Plampitan dan Jalan Ambenga, Kalimas terpecah lagi. Yang sebelah timur mengaliri daerah Ngemplak, Kalisari, Penyindilan, Gembong, Kertopaten, Srenggana, Tenggumung, yang berkelok-kelok sampai dengan Selat Madura. Kemudian yang satunya dari Plampitan, Peneleh, Pandean, Jalan Semut, hanya berbentuk lurus saja tidak berliku-liku yang mengarah ke utara hingga pada Dermaga Ujung sehingga jalur menuju ke Dermaga Ujung ini yang menjadi Pelabuhan Tradisional Kalimas Surabaya.

buku ini tidak diperjualbelikan

Sumber: Universiteit Leiden (1902)

Gambar 7.1 Sungai Kalimas Surabaya Masa Kolonial

Sungai Kalimas terletak di Surabaya, di mana Surabaya sendiri juga berkaitan dengan Sungai Kalimas sehingga hal tersebut dapat berpengaruh. Surabaya terletak pada dataran rendah yang memiliki ketinggian sekitar 3–6 m di atas permukaan laut. Sebagian besar area tanah di Surabaya sendiri terdapat lapisan tanah aluvial yang merupakan hasil dari endapan sungai atau pantai serta tanah di daerah perbukitan sebelah barat kota mengandung kadar kapur yang tinggi. Surabaya sendiri memiliki curah hujan yakni rata-rata 1.411 mm per tahun. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari. Namun, pada musim kemarau angin bertiup dari tenggara yang memiliki kecepatan sekitar 10 knots dari barat daya. Kondisi geografis Surabaya ini hampir sama dengan wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur lainnya. Karena itu, hal tersebut membuat Jawa Timur sebagai salah satu tempat transit serta gerbang yang cukup penting

buku ini tidak diperjualbelikan

dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pada masa kolonial.

C. Sejarah dan Perekonomian Kota Surabaya pada Tahun 1800–1940

Surabaya merupakan sebuah wilayah yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, di samping juga termasuk muara Sungai Brantas. Surabaya bukan hanya nama sebuah karesidenan, melainkan juga merupakan nama sebuah kota. Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur serta Gresik pada bagian barat. Namun, secara spesifik, letak Surabaya sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur oleh Selat Madura, dan sebelah tenggara dibatasi oleh Pasuruan. Wilayah Surabaya sebagian besar terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, di sebelah timur laut yakni delta, bagian ini memuat wilayah-wilayah seperti Jabakota, Kota, dan Sememi. Pada daerah genangan air terdapat di sepanjang ujung barat timur laut Surabaya yang meliputi daerah Medoan, Bokor, Jeblokan, Ploso, pada bagian wilayah Jabakota. Kemudian daerah Mrutu, Sape, Genteng, Kalimas, Krembangan, dan Dupak merupakan wilayah Kota. Yang terakhir daerah Greges dan Manukan pada wilayah Sememi.

Berdasarkan penjelasan Faber yang dikutip Handinoto (1996, 31), Kota Surabaya didirikan oleh Kertanegara pada tahun 1275 sebagai tempat pemukiman baru untuk para prajuritnya yang berhasil mengalahkan pemberontakan Kanjuruhan. Sejarah Kota Surabaya dari kertanegara sampai masa kemerdekaan Indonesia mengalami pergantian pemerintahan beberapa kali. Sesudah jatuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1482–1542 Surabaya menjadi wilayah kerajaan Demak, selanjutnya tahun 1570–1587 Surabaya berada di bawah kekuasaan Pajang. Tahun 1625–1742 berada di kekuasaan Mataram dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan VOC. VOC menjadikan Surabaya sebagai pusat kekuasaan di Jawa Timur. Kemudian pemerintahan VOC mengalami keruntuhan dan digantikan dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, Surabaya menjadi salah satu daerah yang terkena proyek Jalan Anyer-Panarukan, dan di

buku ini tidak diperjualbelikan

bawah pimpinan Deandels, Surabaya dibangun menjadi kota dagang dan kota benteng (Handioto, 1996, 35).

Surabaya merupakan daerah rawa yang sebagian besar memiliki tanah yang padat sehingga sangat memadai jika dibangun Gudang serta infrastruktur perdagangan. Namun, secara spesifik, Surabaya terletak di delta Sungai Brantas serta memiliki pelabuhan yang cukup besar sehingga pada tahun 1864, kota Surabaya baru memiliki arti sebagai kota maritim. Dengan perkembangan perdagangan di Surabaya, semakin berkembang juga kota Surabaya sebagai kota maritim (Ubaidillah,2016). Di era Kerajaan Majapahit, Surabaya sudah menjadi pelabuhan gerbang utama. Hal ini kemudian berlanjut hingga masa kolonial pada abad ke-19 yang memosisikan Surabaya sebagai *collecting centers* hasil produksi perkebunan di Jawa Timur. Karesidenan Surabaya memiliki wilayah sangat luas dan juga memiliki kepadatan penduduk yang relatif bervariasi. Dengan adanya pemerintahan Raffles, data mengenai jumlah penduduk karesidenan Surabaya pertama kali dapat diketahui.

Pada abad ke-19, wilayah Surabaya memiliki keistimewaan sendiri sebagai sebuah kota pelabuhan modern, perdagangan, maupun industri terbesar. Surabaya merupakan pusat pemerintahan daerah serta markas besar militer pemerintahan kolonial Belanda di wilayah timur Pulau Jawa. Kemudian wilayah ini juga mengemban sebagai markas besar pelayanan finansial dalam bidang ekonomi berupa perusahaan dagang, barang ekspor, gudang, serta fasilitas pelabuhan. Namun, sebelum Belanda menguasai sepenuhnya, sejak abad ke-17 sudah memasuki Surabaya. VOC memiliki strategi dalam menduduki kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa yakni dengan mendirikan sebuah benteng yang berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan hasil pertanian di tepi sungai yang berdekatan dengan pelabuhan sehingga dapat dikatakan bahwa sungai dan pelabuhan masih memegang peranan penting bagi perkembangan kota Surabaya. Surabaya memiliki sebuah pelabuhan yang mulai masa kerajaan sudah menjadi tempat keluar-masuk barang. Kegiatan sektor maritim yang ada di

buku ini tidak diperjualbelikan

Sungai Kalimas juga didukung dengan adanya Pelabuhan Tanjung Perak yang berada pada lokasi yang sangat strategis.

Pelabuhan menjadi sarana transportasi yang menjadi unsur penting serta memiliki fungsi sebagai urat nadi kehidupan serta perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada berbagai bidang dan sektor tersebut. Perekonomian Surabaya pada masa kolonial ditopang dengan adanya perdagangan hasil bumi dan industrinya. Di Surabaya sejak masa kerajaan telah menjadi tempat mentransaksi barang dagangan lewat jalur sungai. Selain transportasi, perekonomian Surabaya juga menjadi daerah pemasok hasil pertanian dan perkebunan yang penting untuk komoditas ekspor. Produk utama yang diperdagangkan dari Surabaya adalah gula, kopi, teh dan tembakau. Daerah Surabaya dan sekitarnya menjadi pusat penanaman tebu dan memiliki pabrik-pabrik gula.

D. Pengaruh Kondisi Geografis Sungai Kalimas terhadap Perkembangan Pelabuhan dan Perekonomian Kota Surabaya

Sebelum adanya sarana transportasi darat yang memadai, sungai menjadi salah satu sarana transportasi yang sangat banyak digunakan. Khususnya kota Surabaya menjadi gerbang masuk dan keluarnya manusia dan barang, serta menjadi penyalur komoditas dari daerah-daerah lainnya. Sungai Kalimas merupakan sungai yang membelah Kota Surabaya yang ditetapkan menjadi Pelabuhan utama dari berkumpulnya hasil bumi di Pulau Jawa, yang kemudian disiapkan untuk kebutuhan ekspor.

Aktivitas transportasi laut sudah ada sebelum kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sehingga sungai kalimas menjadi sentral lalu lintas yang ramai dengan adanya perahu dan kapal. Didukung oleh letak Surabaya yang strategis yaitu di daerah *hinterland* yang subur sehingga menghasilkan seperti beras, kopi, gula, dan tembakau. Selain itu, Surabaya juga sudah menjadi komoditas perdagangan

buku ini tidak diperjualbelikan

lokal maupun internasional sehingga pelabuhan di Surabaya menjadi gerbang utama perdagangan di Surabaya. Sebelum adanya Pelabuhan Tanjung Perak, seluruh aktivitas bongkar-muat dilakukan di pelabuhan Kalimas sehingga jika untuk melakukan bongkar-muat barang atau kegiatan menaikkan dan menurunkan kargo harus menggunakan perahu supaya dapat menjangkau daerah pedalaman dan pusat kota karena Pelabuhan Kalimas berada di sungai sehingga kapal besar tidak dapat berhenti di tempat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kondisi geografis Sungai Kalimas sangat memengaruhi adanya pelabuhan serta menjadi tempat terakhir dari hasil bumi daerah Pulau Jawa yang akan diekspor ke daerah lainnya. Dengan letak geografis yang sangat strategis, Sungai Kalimas ditetapkan menjadi pelabuhan utama di Pulau Jawa untuk tempat berkumpulnya hasil bumi yang ada di daerah pedalaman untuk melakukan ekspor ke berbagai daerah Nusantara, khususnya ke Eropa, sehingga daerah pesisir yang berada di pantai utara pulau Jawa pada saat itu menjadi pusat berkumpulnya produk atau hasil bumi yang akan dikirimkan ke berbagai daerah. Sungai Kalimas memang sangat penting karena memiliki peran sebagai sarana transportasi dari hasil bumi yang akan diekspor sehingga menjadi jalur utama yang menghubungkan perairan lepas dengan pedalaman kota Surabaya. Dengan melalui sungai ini, transaksi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan pada perekonomian Surabaya.

Sungai Kalimas memengaruhi adanya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Surabaya pada masa itu karena awalnya aktivitas perdagangan dilakukan di Pelabuhan kalimas yang berada di daerah Sungai Kalimas yang tidak cukup jika kapal besar memasukinya. Kalimas pada masa itu menjadi pusat lalu lintas perdagangan dari berbagai negara sehingga bongkar-muat barang-barang yang ada di kapal besar tidak dapat terjadi, tetapi berlabuh di Selat Madura. Dengan adanya hal tersebut, arus perdagangan di pelabuhan ini mengalami peningkatan, namun dermaga Pelabuhan Kalimas tidak memadai lagi sehingga dibangunlah Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi pelabuhan yang sangat ramai perdagangan.

buku ini tidak diperjualbelikan

Pada masa kolonial Belanda, kota Surabaya menjadi daerah penopang kebutuhan ekonomi dari hasil perdagangannya. Pada masa itu, Belanda membuat kanal-kanal yang dapat menghubungkan perairan laut dengan pusat kota. Dengan adanya Sungai Kalimas, transportasi mulai dari sampan hingga perahu melakukan pengangkutan barang komoditas berupa rempah-rempah dan ikan hasil tangkapan nelayan, kemudian dibawa ke daerah kota yang dikenal sebagai Kembang Jepun (daerah pecinan di Kota Surabaya) sampai daerah Kayon (yang saat ini terdapat Surabaya Mall) karena daerah-daerah tersebut juga dilalui oleh sungai Kalimas. Sungai Kalimas sebagai jalur perdagangan di Surabaya sangat terlihat pada masa kolonial karena dimanfaatkan Belanda dengan sangat maksimal sehingga dapat mengangkat perekonomian Pemerintah Kota Surabaya. Pada masa kolonial ini, Surabaya menjadi daerah dagang yang sangat ramai sehingga banyak memunculkan pedagang-pedagang yang melakukan transaksi di Surabaya. Namun, karena ukuran sungai Kalimas yang tidak cukup luas membuat kapal-kapal besar tidak dapat memasuki lebih dalam sehingga mereka hanya dapat berlabuh di Selat Madura. Pelabuhan yang sangat berperan penting dalam dalam pengembangan perekonomian sejak masa lalu yaitu Kalimas dan Tanjung Perak. Sebelum adanya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Kalimas merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada di Kota Surabaya yang berada di Muara Kalimas.

E. Penutup

Sungai Kalimas merupakan sungai yang berada di Surabaya. Sungai ini merupakan cabang dari Sungai Brantas. Sungai Kalimas sendiri dikatakan membelah daerah kota Surabaya sehingga letaknya strategis sebagai penopang transportasi air pada masa kolonial. Peranan sungai Kalimas sebagai jalur transportasi memang sudah ada sejak sebelum adanya pemerintah kolonial. Sebelum jalur darat dan udara belum maksimal, masyarakat Surabaya memanfaatkan adanya jalur sungai untuk mengirimkan komoditas dan hasil bumi dari daerah pedalaman maupun daerah sekitarnya.

buku ini tidak diperjualbelikan

Kota Surabaya disebut sebagai kota dagang dan kota industri. Surabaya memiliki letak yang strategis untuk digunakan sebagai kota dagang karena berada di delta Sungai Brantas dan dekat dengan sungai kalimas sehingga muncul pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat berkumpulnya hasil komoditas yang akan diekspor. Sungai Kalimas ini memiliki letak yang strategis sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Surabaya karena dengan adanya peran sungai sebagai jalur transportasi dan sebagai jalur ekspor hasil bumi sehingga membuat perekonomian di Kota Surabaya mengalami kemajuan.

F. Referensi

Achdian. A., & Chotim. E. E. (2018). De particuliere sadja: Kelas menengah kota dan politik kewargaan di kota kolonial Surabaya akhir abad ke-19. *Jurnal Masyarakat & Budaya, 20*(1), 75–90.

Adi. N. K. (2019). Peranan Sungai Kalimas sebagai sarana transportasi sungai Kota Surabaya tahun 1900-1952. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, 7*(1).

Astuti. S. R. (2016). Pembangunan pelabuhan Surabaya dan kehidupan sosial ekonomi di sekitarnya pada abad XX. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fahmi. M. N. (2017). Kembang Jepun (Handelstraat) sebagai pusat ekonomi etnis China di Surabaya tahun 1906-1930. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah. 5*(1),111–121.

Handianto, & Hartono. S. (2007). Surabaya kota pelabuhan (Surabaya port city). *Dimensi Teknik Arsitekktur, 35*(1), 88–99.

Handinoto. (1996). *Perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Andi Offset.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.

Putri, A. E. (2019). Evaluasi program bimbingan dan konseling: Sebuah studi pustaka. *(Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia (JBKI), 4*(2), 39. https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890

Rahmawati. R. (2023). Sejarah Sungai Kalimas sebagai jalur transportasi di Kota Surabaya 1910-1942 [*Skripsi tidak diterbitkan*]. STKIP PGRI Sidoarjo.

Rondiyah, A. A., Wardani, N. E., & Saddhono, K. (2017). Untuk meningkatkan pendidikan karakter kebangsaan di era MEA

buku ini tidak diperjualbelikan

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). *The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*, 141–147.

Ubaifillah. A. (2016). Kajian sejarah maritim: Peranan Sungai Kalimas sebagai jalur perdagangan dan pengaruhnya bagi etnis Arab di Surabaya tahun 1902-1930 [*Skripsi tidak diterbitkan*]. FAH UINSA Surabaya.

Universiteit Leiden. (1902). KITLV A492 - De Kalimas te Soerabaja. _KITLV Digital Collections_. (https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/919971, diakses 15 Agustus 2025).

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

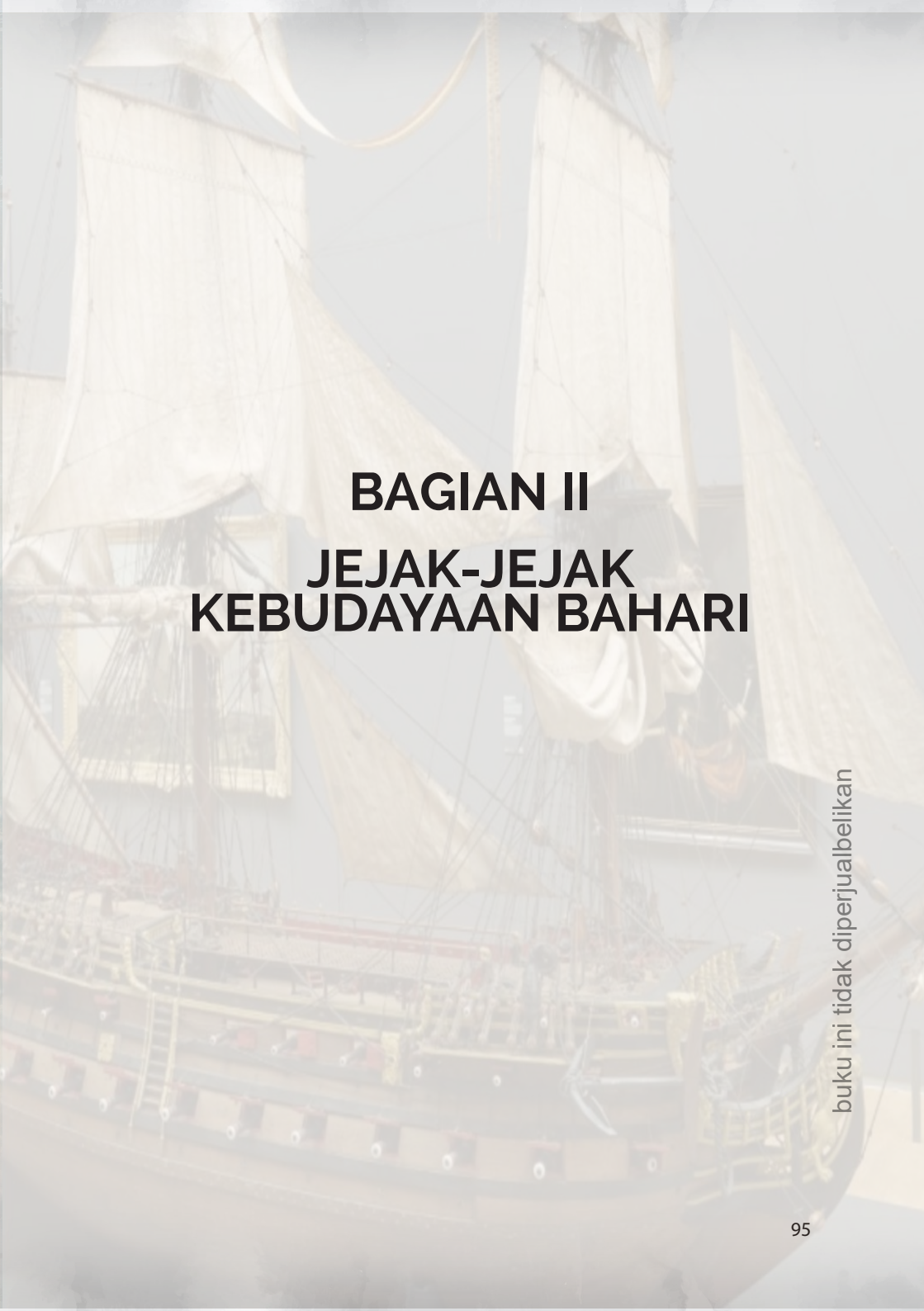

BAGIAN II

JEJAK-JEJAK KEBUDAYAAN BAHARI

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB VIII

JAWA DALAM CATATAN ODORICO DE PORDENONE

Daya Negri Wijaya

A. Odorico de Pordenone dan Penjelajahan ke Timur Jauh

Jawa telah dikenal dunia sejak milenia pertama. Pelancong dan saudagar Cina banyak melakukan berbagai aktivitas, terutama perdagangan, ketika bermukim di Jawa. Mereka juga merekam keadaan sosial, budaya, dan geografi Jawa (Groeneveldt, 2019). Orang-orang asing lainnya, termaktub dalam Prasasti Balawi, seperti komunitas Muslim dan Arab, Keling, Arya, Singhala, Karnntaka, Bahlara, Cina, Campa, Mandikira, Remin, Khmer, dan Bebel, juga telah menyapa Jawa pada masa Majapahit (Priswanto, 2012; Perkasa, 2012; Wahyudi, 2013; Nufus, 2018). bangsa Eropa juga telah mengenal Jawa bahkan sebelum kehadiran Bangsa Portugis pada abad XVI. Pelancong Eropa,

D .N. Wijaya
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: daya.negri.fis@um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis
Wijaya, D .N. (2025). Jawa dalam Catatan Odorico de Pordenone. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (97–105). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1519, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

seperti Marco Polo dan Ludovico di Varthema, pernah singgah di Jawa (Komroff, 1928). Rohaniawan Italia yang bernama Odorico de Pordenone juga pernah diberi tugas untuk melancong dan menyebarkan iman Kristus ke Jawa pada awal abad ke-14. Hayat dan karya Odorico belum terlalu banyak diulas. Kajian terdahulu hanya terfokus pada kisah petualangan Odorico secara umum saja (Laufer, 1914; Moule, 1920; Bressan, 1997; O'Doherty, 2006 & 2009).

Bab ini mengeksplorasi kehadiran Odorico (Mattiussi) de Pordonone di Jawa. Pada bab ini dilengkapi informasi yang telah tersedia dengan berfokus pada kehidupan ekonomi-politik dan sosial-budaya di Jawa. Sebagaimana para pelancong asing lainnya, Odorico juga mencatat apa yang dia lihat dan alami selama berada di Jawa. Dia diperkirakan berdiam di Jawa pada medio 1321–1322, yang waktu itu Jawa dikuasai oleh Majapahit. Odorico mencatat beberapa hal, seperti (1) Jawa dikuasai oleh raja yang membawahi tujuh raja bawahan; (2) Komoditas dagang utama Jawa; (3) Istana raja; dan (4) Jawa berhasil memukul mundur lagi serangan Kaisar Mongol. Informasi Odorico perlu disandingkan dan diverifikasi dengan data sejarah lainnya, seperti prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Majapahit, berita Cina, dan kronik asing. Dengan adanya kritik (internal) sumber, diharapkan khalayak dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait kondisi Jawa abad ke-14.

B. Hayat dan Karya Odorico de Pordonone

Odorico de Pordonone memiliki nama asli yakni Odorico Mattiussi atau Mattiuzzi. Dia lahir di Villanova, Pordonone, pada tahun 1286. Dia merupakan seorang pendeta Ordo Fransiskan dan diberi tugas untuk menjelajah ke Timur Jauh. Hasil penjelajahannya menjadi referensi utama bagi penjelajah selanjutnya. Dia memiliki karakter yang sederhana dan gigih dalam menjalankan tugas misionarisnya.

Odorico memulai perjalanannya dengan meninggalkan Padua pada sekitar tahun 1316. Dia kemudian menumpang kapal lintas benua dari Venesia. Dengan melalui Konstantinopel dan Jazirah Turki, dia mencapai Hormuz di Teluk Persia. Dari sana, dia melanjutkan

buku ini tidak diperjualbelikan

pelayaran dengan menyinggahi beberapa tempat seperti di Malabar, Coromandel, Srilanka, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Campa, dan Guangzhou. Odorico sempat bermukim di Cina dari 1324 hingga 1327. Saat itu, Cina berada dalam genggaman Dinasti Yuan. Odorico kembali ke Eropa dengan menggunakan jalan darat melalui Mongolia, Tibet, Persia, dan Tabriz. Sebelum dia meninggal pada 1331 di Udine, Odorico menceritakan semua kisah perjalanannya pada William de Solona pada 1330. Atas guratan William itulah, perjalanan hidup Odorico dapat kita baca hingga kini (Bressan, 1997).

Menariknya, manuskrip dari perjalanan Odorico kini terdapat 128 versi. Kemungkinan besar, para rohaniawan menuliskan kembali catatan yang dibuat oleh William. Ada kemungkinan juga saat itu, kronik perjalanan ke Dunia Timur merupakan sesuatu yang sangat berharga dan membuka pintu pada kekayaan, kejayaan, dan kemakmuran (Bressan, 1997). Adapun, naskah tertua terkait perjalanan Odorico tersimpan di Perpustakaan Kota Asisi. Manuskrip itu berjudul "Multe et diverse hystorie odorici fratris minoris de ritibus et condicionibus huius mundi et de martirio IIII fratrum minorum (AD 1331-1333)". Perpustakaan Vatikan juga menyimpan tiga manuskrip perjalanan Odorico. Manuskrip lainnya tersebar di seluruh antero Eropa seperti perpustakaan-perpustakaan di Italia, Austria, Jerman, Ceko (Praha), Hungaria (Budapest), Prancis (Paris), Polandia (Wroclaw), Spanyol, Swedia (Uppsala), dan Britania Raya (Cambridge, Glasgow, London, dan Oxford) (Bressan, 1997).

Intisari manuskrip Odorico, tentu saja menggambarkan perjalanannya, terbagi dalam lima bab. Bab pertama, bagian pendahuluan dan perjalanan ke Timur Tengah (Armenia dan Persia). Bab kedua, kunjungan ke India. Bab ketiga, perjalanan melalui Samudra Hindia dan lautan Cina dengan mengunjungi Sri Lanka, Nicobar, Lamri, Sumatra, dan Jawa. Bab keempat, dia sempat bermukim di Cathay. Bagian terakhir, Odorico kembali ke Eropa via Asia Tengah (Bressan, 1997).

buku ini tidak diperjualbelikan

C. Ekonomi Politik Jawa dalam Catatan Odorico do Pordonone

Odorico diperkirakan berada di Jawa ketika Majapahit berada di bawah pimpinan Raja Jayanegara. Odorico melihat dengan saksama keadaan ekonomi politik Majapahit. Birokrasi politik Majapahit dilihat sekilas olehnya. Dia merasa Raja Jawa memiliki tujuh raja lain di bawah kekuasaan utamanya (Rush, 2012). Jika kita perhatikan dengan saksama, mungkin yang dia maksud dengan tujuh raja bawahan dari raja Majapahit adalah Bathara Sapta Prabu. Selain itu, dewan penasihat itu juga disebut dengan nama lain, seperti Sapta Raja, Mantri Agung, Kalawan Para Natha, Pohom Narendra, dan Saptangga Raja (Yamin, 1962c). Bathara Sapta Prabu merupakan sebuah jabatan penasehat raja yang anggotanya ialah keluarga raja yang berkuasa (Yamin, 1962c). Ketika Jayanegara berkuasa, belum diketahui siapa saja yang masuk pada lingkaran Bathara Sapta Prabu, yang dibentuk setelah Raden Wijaya mangkat (Yamin, 1962a). Namun, ketika Hayam Wuruk berkuasa, informasi siapa saja Bathara Sapta Prabu dapat diketahui. Dalam Prasasti Singasari 1351 disebutkan Bathara Sapta Prabu dikepalai oleh Tribuana Tungga Dewi (Yamin, 1962b). Pada awalnya, Sapta Prabu terdiri dari tujuh orang, yakni Prabu Hayam Wuruk, kedua orang tua, bibi dan paman, serta kedua saudara putri. Namun, jumlah anggotanya kemungkinan bertambah pada tahun 1354. Walaupun jumlahnya berubah menjadi sembilan orang, namun namanya tetap Bathara Sapta Prabu (Yamin, 1962d). Adapun sembilan orang yang menjadi Bathara Sapta Prabu yakni Prabu Hayam Wuruk sebagai ketua dewan, Tribhuwana Tungga Dewi, Sri Kerta Wardhana, Dyah Wiyat Sri Raja Dewi, Sri Wijaya Rajasa, Bhre Lasem Duhitendu Dewi, Sri Rajasa Wardhana, Bhre Pajang, dan Singa Wardana (Unjiya, 2014).

Kesaksian lain dari Odorico ialah geografi dan komoditas di Jawa. Menurutnya, Pulau Jawa merupakan pulau terbesar di dunia dan sepenuhnya dihuni (Rush, 2012). Marco Polo juga menyerukan hal yang sama. Polo (2019) berujar bahwa, menurut para pelaut veteran, Jawa merupakan pulau yang terbesar di dunia. Tentu informasi itu

buku ini tidak diperjualbelikan

tidak terlalu akurat dan tidak bersesuaian dengan kenyataan yang ada. Terkait komoditas di Jawa, Odorico berujar bahwa bandar-bandar di Jawa memiliki cengkih, kemukus, dan buah pala serta segala macam rempah lain juga banyak jenis makanan lain dalam jumlah besar. Namun, di Jawa tidak memiliki anggur (Rush, 2012). Tidak berbeda jauh, Polo (2019) menyampaikan bahwa Jawa merupakan pulau yang kaya akan komoditas. Mereka memiliki lada, pala, cengkih, serta berbagai jenis rempah yang dijumpai di dunia. Begitu banyak kapal dan pedagang yang berdagang di Jawa dan mendapatkan keuntungan dagang yang tinggi. Karya Ma Huan yang berjudul *Ying-yai Sheng-lan* juga menginformasikan komoditas yang ada di Jawa. Pelancong Cina itu mendapat berbagai produk pertanian seperti beras, wijen, dan kacang kedelai. Selain itu, Jawa juga menghasilkan kayu secang, kayu cendana, lada, merica, baja, dan tempurung penyu (Groeneveldt, 2019). Ketersediaan komoditas di Jawa tentu didasarkan pada permintaan barang oleh para pedagang asing. Pedagang Cina misalnya begitu mencari lada hitam. Selain itu, pedagang mancanegara lainnya juga mencari beras, kacang, adas, pewarna *safflower*, biji jamuju, biji ketumbar, pewarna wangkudu, garam, dan gula. Selain komoditas yang diekspor, ternyata terdapat beberapa komoditas yang dibawa ke Jawa, seperti keramik, kain, kemenyan, pedang, logam, koin, dan budak (Christie, 1998; Nufus, 2018).

Selain birokrasi politik dan komoditas perdagangan, Odorico juga menyebutkan ketakjubannya pada istana Jawa. Dia mengajarkan bahwa Raja Jawa memiliki sebuah istana besar dan mewah paling menakjubkan. Istana itu memiliki tangga lebar dan megah ke arah ruangan di bagian atas, semua anak tangga secara bergantian terbuat dari emas dan perak. Seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas, di mana gambar-gambar ksatria diukirkan pada lapisan emas itu. Gambar kesatria itu berhiaskan sebuah mahkota kecil yang dihias dengan beragam batu mulia. Atap istana itu terbuat dari emas murni dan seluruh ruangan di bagian bawah dilapisi dan berselingan dengan lempeng-lempeng berbentuk kotak yang terbuat dari emas dan perak (Rush, 2012:2). Istana Jawa yang dimaksud ada

buku ini tidak diperjualbelikan

kemungkinan adalah ibu kota Majapahit yakni di Trowulan. Sejauh kajian yang selama ini dilakukan para ahli masih menyepakati ibu kota Majapahit berada di sana (Munandar, 2008).

Terkait gambaran istana Majapahit, informasi lain dapat kita telusuri berasal dari uraian Pu Prapanca dalam Nagarakrtagama (Riana, 2009) dan Ma Huan dalam Ying-yai Sheng-lan (Groeneveldt, 2019). Menurut mereka, istana Majapahit dikelilingi dinding bata merah tinggi setinggi tiga changa tau tombak dan tebal. Di dekatnya ada pos tempat para prajurit berjaga. Penjagaan mereka sangat ketat dan berlapis. Gerbang utama menuju istana (kompleks istana) terletak di sisi utara tembok, dalam bentuk gerbang agung dengan pintu-pintu besar yang terbuat dari besi berukir. Di depan gerbang utara terdapat bangunan panjang tempat pertemuan tahunan pejabat negara, pasar, dan persimpangan yang disucikan. Memasuki kompleks melalui gerbang utara terdapat lapangan yang dikelilingi bangunan-bangunan suci agama. Di sisi barat lapangan ini terdapat paviliun yang dikelilingi oleh kanal dan kolam tempat orang-orang mandi. Di ujung selatan alun-alun terdapat berbagai rumah yang dibangun di teras dengan teras, rumah-rumah ini adalah tempat tinggal para pelayan istana. Gerbang lain mengarah ke lapangan ketiga yang penuh dengan bangunan dan aula besar. Gedung ini adalah ruang tunggu tamu yang akan menghadap raja. Kompleks istana raja terletak di sisi timur alun-alun ini, dalam bentuk beberapa paviliun atau paviliun yang dibangun di atas platform batu bata berukir, dengan tiang kayu besar diukir dengan sangat halus dan atap yang dihiasi dengan ornamen tanah liat.

Terakhir, Odorico juga memberikan informasi terkait keadaan geopolitik Asia. Kaisar Cina atau Khan yang Agung sering mengadakan peperangan dengan raja Jawa. Akan tetapi, menurutnya serangan Cina selalu berhasil dipatahkan dan dipukul mundur (Rush, 2012). Polo (2019) juga memberikan informasi serupa ketika mendeskripsikan Jawa. Dia berujar pasukan Khan baru saja kalah di Jawa. Secara historis, kaisar Cina memang pernah mengirim pasukan dua kali ke Jawa. Pertama, ketika dia meminta diplomatnya untuk

buku ini tidak diperjualbelikan

mengharapkan pengakuan dari Prabu Kertanegara. Kedua, pasukan Cina datang lagi dengan maksud ingin menghukum Kertanagara yang tidak mau tunduk kepada Cina. Akan tetapi, pasukan Cina tidak lagi dapat menjumpai Kertanagara yang tewas terbunuh ketika Jayakatwang mengobrak-abrik istana Singhasari. Raden Wijaya yang berhasil selamat dari serbuan Jayakatwang kemudian bernegosiasi dan bersepakat untuk menyerang Kadiri bersama. Aliansi mereka berhasil menghabisi Jayakatwang dan para sekutunya. Terlena akan kemenangan yang mereka miliki, pasukan Cina menggelar pesta kemenangan. Dalam keadaan mabuk berat, pasukan Cina tidak siap dengan serangan tiba-tiba Raden Wijaya. Raden Wijaya berhasil menghabisi dan mengusir pasukan Cina. Dengan berkedudukan di Tarik, Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit (Groeneveldt, 2019).

D. Penutup

Keberadaan catatan Odorico mengenai dinamika politik dan perdagangan di Jawa memberikan informasi pelengkap pada sejarah Jawa masa Majapahit dengan perspektif berbeda. Kiranya informasi dalam catatan Odorico menambah beberapa tinjauan mengenai sistem birokrasi yang diterapkan di Jawa, bahkan gambaran mengenai istana raja Jawa yang dinilai megah dan memiliki koordinasi begitu terstruktur. Catatan ini juga menambah data sejarah terkiat komoditas-komoditas yang diperdagangkan oleh Majapahit, begitu pula jenis komoditas yang dipertukarkan oleh pedagang asing di bandar-bandar Majapahit.

Upaya menyandingkan informasi dalam catatan Odorico dengan tinggalan arkeologis yang relevan juga memperjelas vitalnya eksistensi bandar-bandar di pesisir Jawa dari periode Majapahit bagi pedagang asing. Majapahit sebagai pemegang hegemoni pada periode tersebut telah menjalin kerja sama dengan negara lain seperti Cina yang dijelaskan oleh Odorico. Pedagang asing tersebut menuju Majapahit (secara lebih luas Jawa) untuk memperoleh komoditas beras, wijen, kayu secang, kayu cendana, lada, merica, baja, hingga tempurung penyu. Prasasti Balawi dan Singosari tentu dapat melegitimasikan

buku ini tidak diperjualbelikan

akurasi informasi dari Odorico terkait komoditas dan aktivitas perdagangan tersebut. Selain itu, keberadaan beberapa kronik asing lainnya terutama karya Marco Polo dan Ma Huan dapat melengkapi sekaligus membenarkan informasi Odorico.

E. Referensi

Bressan, L. (1997). Odoric of Pordenone (1265-1331). His Vision of China and South-East Asia and His Contribution to Relations between Asia and Europe. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, *70*(2) (273), 1–23.

Christie, J. W. (1998). Javanese markets and the Asian Sea Trade Boom of the Tenth to Thirteenth Centuries. *Journal of the Economic and Social History of the Orient, 41*(3), 344–381.

Groeneveldt, W. P. (2019). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.

Hall, K. R. (1985). *Maritime trade and state development in Early Southeast Asia.* University of Hawai'i Press

Komroff, M. (1928). *Contemporaries of Marco Polo: Consisting of the travel records to the eastern parts of the world of William of Rubruck (1253-1255); the journey of John of Pian de Carpini (1245-1247)*; *the journal of Friar Odoric (1318-1330) & the Oriental Travels of Rabbi Benjamin of Tudela (1160-1173).* Boni & Liveright.

Laufer, B. (1914). Was Odoric of Pordenone ever in Tibet?. *T'oung Pao*, *15*(3), 405–418.

O'Doherty, M. (2009). The Viaggio in Inghilterra of a Viaggio in Oriente: Odorico da Pordenone's itinerarium from Italy to England. *Italian Studies*, *64*(2), 198–220.

Moule, A. C. (1920). A Small Contribution to the Study of the Bibliography of Odoric, Second Series. *T'oung Pao*, *20*(5), 301–322.

Munandar, A. A. (2008). *Ibu Kota Majapahit: Masa jaya dan pencapaian*. Komunitas Bambu.

Nufus, A. H. (2018). *Orang-orang Asing di Jawa: Berdasarkan data prasasti abad XI-XV* [*Skripsi tidak diterbitkan*]. FIB-Universitas Indonesia.

O'Doherty, M. (2006). *Eyewitness accounts of 'the Indies' in the Later Medieval West: Reading, reception, and re-use* (c. 1300-1500) [*Disertasi tidak dipublikasikan*]. University of Leeds.

buku ini tidak diperjualbelikan

Penzer, N. M. (Ed). (1928). *The itinerary of Ludovico di Varthema from 1502 to 1508*. Argonaut Press.

Perkasa, A. (2012). *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit.* Ombak.

Polo, M. (2019). *The travels of Marco Polo.* Penguin.

Priswanto, H. (2012). Orang-orang asing di Majapahit. I. Adrisijanti (Ed). *Majapahit: Batas Kota dan Jejak-Jejak Kejayaan*. Balai Arkeologi Yogyakarta.

Riana, I. K. (2009). *Nagarakrtagama: Masa keemasan Majapahit*. Kompas.

Rush, J. (2012). *Jawa tempo doeloe*. Komunitas Bambu.

Suryandari, R. (2014). *Perdagangan lokal di Kerajaan Majapahit abad XIII-XV.* [*Tesis tidak diterbitkan*]. FIB-UI.

Unjiya, M. A. (2014). *Lasem negeri Dampoawang*. Salmaidea.

Wahyudi, D. (2015). Kerajaan Majapahit: Dinamika dalam sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 88–95.

Yamin, M. (1962a). *Tatanegara Majapahit parwa I.* Yayasan Prapanca.

Yamin, M. (1962b). *Tatanegara Majapahit parwa II*. Yayasan Prapanca.

Yamin, M. (1962c). *Tatanegara Majapahit parwa III*. Yayasan Prapanca.

Yamin, M. (1962d). *Tatanegara Majapahit parwa IV*. Yayasan Prapanca.

Yule, H. (1983). *Cathay and the way thither vol. II: Odoric of pordenone.* Hakluyt Society.

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB IX

MAKAM TROLOYO: KEBUDAYAAN MASA PERALIHAN DI MOJOKERTO

Anis Fitri Rachmawati & Deny Yudo Wahyudi

A. Harmonisasi Kehidupan Beragama di Majapahit

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan karena kebudayaan bisa terbentuk seiring dengan perkembangan manusia. Menurut Koentjaraningrat (2015), kebudayaan memiliki tujuh unsur, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Namun, dalam bab ini hanya dibahas salah satu dari tujuh unsur kebudayaan tersebut, yakni unsur sistem religi. Abad ke-4 Masehi disinyalir sebagai masuknya agama Hindu ke Nusantara. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa agama Hindu masuk pada abad tersebut yaitu adanya prasasti Yupa di Kalimantan Timur yakni pada masa Kerajaan Kutai, sedangkan agama Buddha masuk sekitar abad ke-2 Masehi dengan bukti patung Buddha yang

A. F. Rachmawati & D. Y. Wahyudi
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: afirarachmawati@gmail.com

© 2025 Editor & Penulis
Rachmawati A. F. & Wahyudi, D. Y. (2025) Makam Troloyo: Kebudayaan Masa Peralihan di Mojokerto. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (107–120). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1520, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

terbuat dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Pengaruh agama Hindu-Buddha tersebut dapat masuk ke Nusantara karena berbagai alasan, mulai dari peperangan, perdagangan, pernikahan, hingga pendidikan.

Kerajaan Majapahit, yang tepatnya berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, memiliki dua agama yang dianut oleh keluarga bangsawan dan juga rakyatnya. Dua agama tersebut yakni Hindu dan Buddha. Seperti penjelasan dari Sartono Kartodirjo (1993, dalam Maghfiroh, 2019) pada terjemahan bait yang ada di kitab Sutasoma karangan Pu Tantular bahwa (mereka) yang terpilih, *Buddha* dan *Wiswa (Siwa)*, merupakan dua elemen dasar, tidak tunggal terpisah itu konon karena dapat segera dibagi dua (padahal) dalam pada itu ke-*Jina*-an (ke-buddha-an) dan kebenaran Siwa itu tunggal itu terpisah (tetapi juga) tunggal. Pada masa Kerajaan Majapahit, pertemuan agama Siwa dan Buddha disebut dengan "koalisi". Artinya, identifikasi dari kedua agama tersebut dikaitkan dengan prinsip serta kebenaran tertinggi dengan semua manifestasinya, namun tetap ada perbedaan dalam keduanya yaitu mengenai peribadatan. Selain itu, melalui bait tersebut juga dijelaskan bahwa di Kerajaan Majapahit memiliki cara hidup yang punya toleransi tinggi karena meskipun kebenarannya berbeda, tetap saling menghormati dan menghargai sehingga pada masa Kerajaan Majapahit bisa dikatakan sudah memiliki agama yang plural.

Selain dari agama Hindu dan Buddha yang hidup dan dianut pada masa Kerajaan Majapahit, ada juga agama Islam di sana. Keberadaan suatu bangunan suci (candi) dengan lebih dari satu macam keagamaan menunjukkan integrasi sosial dan toleransi beragama. Hal ini berlaku untuk umat agama Hindu, Buddha dan Islam. Pernyataan tersebut membenarkan fakta bahwa di Kerajaan Majapahit memang benar-benar hidup dengan rasa toleransi tinggi pada masyarakatnya tanpa ada diskriminasi dalam perbedaannya. Sebenarnya agama Islam telah ada di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi, hanya saja pada abad ke-13Masehi agama Islam mulai berkembang dengan cepat. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apa bukti atau indikasi

buku ini tidak diperjualbelikan

yang menunjukkan bahwa agama Islam juga hidup di tengah-tengah masyarakat Kerajaan Majapahit yang aslinya menganut dua agama Hindu dan Buddha sebagai agama paling dominasi. Karena seperti yang telah banyak beredar bahwa Kerajaan Majapahit runtuh diakibatkan oleh semakin berkembangnya agama Islam di Jawa. Walaupun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya mereka memang hidup berdampingan dengan baik dan damai.

B. Penemuan Makam Troloyo di Mojokerto

Arkeologi yang mengandung bukti peninggalan Islam seperti di Trowulan yang tepatnya ada di Troloyo ini pertama kali dikembangkan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Mojokerto, dan sampai saat ini pun juga masih ada di bawah pengawasannya. Awalnya, kebanyakan orang tidak mengira bahwa pada masa kemasyhuran Majapahit, Islam juga tumbuh menyertai agama Hindu dan Buddha yang dianut oleh masyarakat Majapahit sebelumnya (Chawari, 1993).

Di Jawa, penyebarannya agama Islam dihadapkan dengan dua jenis lingkungan kebudayaan yang kejawen, yakni pertama, unsur-unsur Hindu-Buddha yang sudah diserap oleh lingkup Kerajaan Majapahit, dan kedua, kepercayaan animisme-dinamisme yang masih membayangi dan melekat pada lingkup pedesaan *(wong cilik)* (Sofyan, 2010). Meskipun terdengar sulit ketika Islam masuk ke wilayah Kerajaan Majapahit, namun terdapat bukti yang menyatakan bahwa agama Islam memang ada di sana. Penemuan makam merupakan bukti nyata kedatangan Islam di Jawa. Bagaimana jika sebelum abad ke-11 bukti keberadaan umat Islam di Jawa masih sangat langka? Bukti-bukti yang menunjukkan kemajuan Islamisasi yaitu pada akhir abad ke-13 Masehi sampai pada abad selanjutnya dapat diketahui ketika Kerajaan Majapahit telah sampai puncak kejayaannya (Widayanti, 2015).

Perlu diketahui bahwa komunitas pedagang muslim sudah muncul pada abad ke-9 di pusat-pusat politik dan kemudian tumbuh pada abad ke-14. Namun sayangnya, dalam perkembangan komunitas muslim ini tidak semudah dengan yang ada di Kerajaan Samudra

buku ini tidak diperjualbelikan

Pasai karena di sini Islam menghadapi pertahanan politik dan budaya yang kuat. Di daerah Trowulan banyak meninggalkan bukti-bukti yang menyatakan keberadaan Kerajaan Majapahit, baik yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Peninggalan-peninggalan tersebut dapat berupa prasasti, bangunan-bangunan, makam, pemukiman, gapura-gapura, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.

Di Trowulan terdapat prasasti tertua pada zaman Pu Sindok yang bertarikh 861 Saka, sedangkan yang termuda yakni angka tahun 1387 Saka pada sebuah batu nisan di kompleks makam Troloyo (Wibowo, 1983). Namun, menurut pernyataan dari L. C. Damais (1957), dalam Sulistiono (2009), angka tahun tertua nisan yang beraksara Jawa Kuno adalah tahun 1203 Saka atau 1281 Masehi, sementara yang termuda yakni 1533 Saka atau 1611 Masehi. Sesuatu yang pasti bahwa di wilayah ibu kota Kerajaan Majapahit terdapat kompleks makam Troloyo dengan nisan yang beraksara Jawa kuno dan inskripsi huruf Arab. Mengingat bahwa kompleks tersebut letaknya tidak berada jauh dari wilayah kerajaan yakni di Kota Trowulan (disinyalir sebagai ibu kota Majapahit) sehingga bisa dikatakan bahwa di tempat tersebut merupakan makam *(pesarean)* bagi penduduk maupun keluarga kerajaan yang telah beragama Islam. Diperkirakan komunitas muslim sudah mulai bermukim di sekitar ibu kota tepat pada masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit yaitu ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada dan pada masa raja setelahnya. Tjandrasasmita (1993, dalam Adrisijanti, 2014) mengatakan, Troloyo adalah tempat yang sudah diberikan oleh pihak Kerajaan Majapahit untuk mendirikan pemukiman yang terletak di sebelah selatan Kedaton.

Dengan memberikan wilayah bagian selatan kepada komunitas muslim ini pastinya pihak dari kerajaan memiliki alasan tertentu. Chawari (1997) mengatakan, ada dua kemungkinan alasan mengapa komunitas muslim diberikan tempat tinggal di Troloyo, yaitu pertama memiliki maksud untuk mengecilkan mereka (komunitas muslim) dan kedua merupakan bentuk toleransi dalam menghormati kelompok yang minoritas. Dilihat dari identitas makam yang ada di Troloyo yang

buku ini tidak diperjualbelikan

merupakan termasuk orang berpengaruh ataupun penting, mungkin saja maksud dari pihak kerajaan itu baik. Karena memperbolehkan ajaran Islam dapat mencapai dakwahnya di tengah-tengah masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha. Bahkan, di dalam tubuh keluarga kerajaan sudah ada beberapa pejabat pemerintahan yang juga memeluk agama Islam. Dari hasil analisis JP Moquette (1912; 1920) dalam Tjandrasasmita (2009) menunjukkan adanya kesamaan jenis huruf, sistem penulisan dan bahan marmer dari batu nisan Malik Ibrahim (822 H) di makam Troloyo, batu nisan Samudera Pasai tahun 822 H dan 831 H, dan Cambay 754 H (1333 M) diyakini telah dibuat di pabrik yang sama, yaitu di Cambay. Toleransi Kerajaan Majapahit ini dibuktikan dengan pengakuan dari para pedagang muslim yang telah diberikan tempat tinggal khusus di Troloyo.

C. Makam Troloyo sebagai Makam Islam

Keterangan: Letak Makam Troloyo dan wilayah sekitarnya.
Foto: Anis Fitri Rachmawati (2023)

Gambar 9.1 Letak Makam Troloyo

Letak administratif dari Makam Troloyo yaitu di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto (lihat Gambar 9.1).

buku ini tidak diperjualbelikan

Makam Troloyo terindikasi sebagai makam *(pesarean)* Islam yang berada di tengah-tengah wilayah Kerajaan Majapahit. Seseorang yang pertama kali meneliti daerah makam tersebut yaitu L.Ch. Damais. Damais menyebutkan bahwa di daerah tersebut terdapat makam-makam orang muslim yang tinggal disekitar daerah Majapahit. Hal tersebut dibuktikan dengan nisan-nisan yang ada di makam tersebut memiliki inskripsi huruf Arab (Chawari, 1997).

Jika melihat dari inskripsi huruf arab yang ada di dalam nisan-nisan yang ada di makam Troloyo, penelitian yang dilakukan oleh Damais benar adanya bahwa Makam Troloyo merupakan sebuah kompleks makam Islam yang berada di wilayah Kerajaan Majapahit. Selain itu, pada batu-batu nisan yang sudah ditemukan tersebut tarikh yang tertulis dalam batu tersebut masih menggunakan tahun saka India, bukan menggunakan tahun hijriah Islam, dan juga menggunakan angka Jawa Kuno, bukan menggunakan angka Arab sehingga dari situlah bisa diketahui bahwa yang dimakamkan di sana adalah orang-orang Jawa yang sudah memeluk Islam, bukan orang non-Jawa yang hanya sekadar singgah di wilayah Kerajaan Majapahit (Ricklefs, 2008). Bisa dilihat contoh penulisan tarikh pada batu nisan yang ada di Makam Troloyo yang menggunakan angka Jawa kuno dan menggunakan tahun saka di bawah ini (lihat Gambar 9.2).

Keterangan: Tarikh atau angka tahun yang terdapat di batu nisan Makam Troloyo, Trowulan, Mojokerto.
Sumber: Anis Fitri Rachmawati, 2023

Gambar 9.2 Tarikh Nisan Makam Troloyo

buku ini tidak diperjualbelikan

Makam Troloyo memiliki area yang sangat luas, di dalamnya terdapat kompleks-kompleks makam kecil. Adapun kompleks-kompleks tersebut, yaitu Makam Tunggal, Makam Telu, Petilasan Wali Songo, Makam Panjang, dan Makam Pitu (Mashud, 2021). Pertama, Makam Tunggalo (Makam Syekh Jumadil Kubro). Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai pembimbing dari para wali (Jannah & Ayundasari, 2021). Namun, penjelasan mengenai Syekh Jumadil Kubro yang disebut sebagai pendahulu dari para wali mempunyai berbagai macam versi. Akan tetapi, dari semua versi tersebut menyatakan bahwa sebelum zamannya para wali, Syekh Jumadil Kubro terlebih dahulu melangsungkan dakwah di Pulau Jawa.

Syekh Jumadil Kubro menginjakkan kaki di Pulau Jawa yakni pada abad ke-14. Pada saat itu agama yang berkembang di Pulau Jawa masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha yang masih sangat kuat. Meskipun pada saat itu masih didominasi dengan agama Hindu dan Buddha yang sangat kuat, Syekh Jumadil Kubro berhasil menyebarkan Islam di kalangan Kerajaan Majapahit berkat ketekunan dan kemahirannya dalam berdakwah. Makam Syekh Jumadil Kubro yang terdapat di wilayah makam Troloyo. Pada bagian dalam nisan kepalanya terdapat tulisan Huruf Arab yang merupakan kutipan dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran: 185, Al-Anbiya: 35, Al-Ankabut: 57, Ar-Rahman: 26, dan Al-Qashas: 88, dan Asmaul Khusna (Chawari, 1997).

Kedua, Makam Telu. Disebut sebagai "Makam Telu" karena di dalam kompleks makam tersebut terdapat tiga makam, di antaranya Makam dengan tulisan nama Syekh Abdul Qadir Jaelani Sini, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Maulana Ibrahim. Maulana Sekah merupakan seorang tokoh Islam yang diketahui dari Blambangan (Harahap, 1951). Maulana Malik Ibrahim merupakan orang terkemuka sebagai penyebar agama Islam di Jawa (Alwi, 1957). Pada Makam Syekh Abdul Qadir Jaelani Sini, bentuk nisan kepala dan kakinya yaitu kurung kurawal. Bagian dalam nisan kepala terdapat inskripsi huruf Arab berupa potongan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kaligrafi *(Khat)* naskhi. *Khat* Naskhi tersebut merupakan tulisan huruf arab

buku ini tidak diperjualbelikan

yang mudah untuk dibaca dibandingkan *khat* lainnya. Hal tersebut dikarenakan *khat* Naskhi dalam aturannya harus dituliskan menggunakan harokat, sehingga mudah untuk dibacanya (Irawan, 2015). Kemudian Makam Syekh Maulana Sekah pada bagian dalam nisan kepala terdapat inskripsi huruf arab Tauhid (Mashud, 2021). Selanjutnya untuk makam Maulana Malik Ibrahim bagian dalam nisan kepalanya terdapat inskripsi huruf arab penggalan ayat Al-Qur'an Surat Al-Imran:185.

Ketiga, yang disebut sebagai petilasan Wali Songo semua nisannya berbentuk kurung kurawal, tidak ada ornamen-ornamen yang unik, namun ada beberapa nisan yang memiliki inskripsi huruf Arab. Adapun inskripsi huruf arab yang berada dalam nisan-nisan tersebut, yaitu kutipan yang diambil dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran: 185, Al-Anbiya: 35, dan Al-Ankabut: 57 (Chawari, 1997). Dengan adanya makam yang disebut sebagai petilasan Wali Songo dan ada beberapa nisannya yang terdapat huruf Arab, semakin menambah nilai keislaman Makam Troloyo. Kemudian Makam Tunggal (Makam Syekh Jumadil Kubro) pada bagian dalam nisan kepalanya terdapat tulisan huruf arab yang merupakan kutipan dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran: 185, Al-Ambiya: 35, Al-Ankabut: 57, Ar-Rahman: 26, dan Al-Qashas: 88, serta Asmaul Khusna (Chawari, 1997).

Kemudian Kubur Panjang. Dinamakan sebagai "Kubur Pajang" karena makam tersebut memiliki panjang yang melebihi panjang ukuran manusia normal. Yang dimakamkan di dalam makam Panjang tersebut yaitu Syekh Ngundung. Nisannya terdapat inskripsi huruf arab penggalan dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran: 185, Al-Ambiya: 35, Al-Ankabut: 57, dan Ar-Rahman: 26–27. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu Makam Tujuh. Dinamakan makam tujuh karena di dalam kompleks makam tersebut terdapat tujuh buah makam. Orang yang dimakamkan di makam tersebut diyakini sebagai petinggi-petinggi dari Kerajaan Majapahit yang telah memeluk Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan lambang Surya Majapahit yang terdapat pada nisan-nisan pada makam tersebut. Karena lambang Surya Majapahit tidak sembarangan digunakan, hanya petinggi-petinggi dari kerajaan

buku ini tidak diperjualbelikan

yang hanya boleh menggunakan lambang tersebut. Makam tujuh diyakini sebagai makam Islam juga karena ada inskripsi huruf Arab dalam nisan-nisan tersebut yaitu ayat-ayat tauhid dan penggalan surat Al-Ankabut: 57. Menurut Mustopo (2002), corak kaligrafi yang digunakan pada nisan-nisan di Makam Troloyo menggunakan corak kaligrafi yang bersifat lokal. Ragam hias yang ditemukan pada nisan-nisan tersebut juga merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan juga Hindu-Buddha. Kontinuitas dari budaya Hindu-Buddha dan Jawa yang ada di kuburan Islam tersebut menunjukkan bahwa ada kearifan lokal di dalamnya (Jati & Wahyudi, 2016).

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa memang Makam Troloyo merupakan kompleks makam Islam yang berada di tengah-tengah wilayah Kerajaan Majapahit. Hal tersebut dibuktikan dengan inskripsi-inskripsi Bahasa Arab yang memuat penggalan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Selain itu, penggunaan tahun saka India dan juga angka Jawa kuno pada batu nisan yang ada di Makam Troloyo juga mengindikasikan bahwa yang dimakamkan merupakan orang Jawa, bukan orang non-Jawa. Kemudian menurut Damais dalam Ricklefs (2008), hiasan yang ada di beberapa batu nisan dan juga lokasinya dekat dengan situs ibu kota Majapahit, mungkin saja yang dimakamkan di makam tersebut yaitu bangsawan Jawa ataupun anggota Kerajaan Majapahit sehingga dari sinilah bisa ditarik kesimpulan bahwa pada Kerajaan Majapahit sudah terdapat orang-orang yang memeluk agama Islam, meskipun mayoritas agama yang dianut pada masa tersebut yaitu Hindu-Buddha, bahkan diyakini terdapat petinggi-petinggi di kalangan Kerajaan Majapahit yang telah menjadi seorang muslim. Makam-makam dari petinggi Kerajaan Majapahit tersebut diyakini berada di kompleks Makam Tujuh.

D. Islam, Hindu, dan Buddha di Tengah Kehidupan Majapahit

Kerajaan Majapahit yang terletak di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah Trowulan, Mojokerto, merupakan sebuah kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit berada di jalur

buku ini tidak diperjualbelikan

pelayaran dan perdagangan yang sangat strategis. Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan oleh Majapahit telah dikenal antarpulau maupun secara internasional (Kartodirjo, 1993). Hal tersebut dibuktikan dengan wilayah Majapahit yang sampai ke luar Jawa, meliputi Kalimantan, Sumatra, Semenanjung Melayu, dan juga pulau-pulau yang ada di sebelah timur Jawa.

Di Majapahit terdapat dua sungai yang memiliki potensi dalam sarana pelayaran. Kedua sungai itu adalah Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang berakhir di laut Jawa. Padatnya lalu lintas perdagangan di kedua sungai itu bisa diketahui melalui prasasti Trowulan yang berangka tahun 1280 Saka (1358 M) dan juga prasasti yang lain menyebutkan ada 3 dari 44 lokasi yang dianggap penting karena disebut sebagai lokasi pemunggahan yang berada di pinggir Sungai Brantas di daerah Mojokerto mulai dari bagian sungai sebelah muara yang bernama Trung, Curabhaya, dan Canggu (Widayanti, 2015).

Perdagangan antarpulau maupun internasional yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit tersebut mengharuskan para pedagang berinteraksi dengan pedagang asing, baik dari Arab, India, Tiongkok, Turki, maupun Persia. Adapun bukti-bukti arkeologis yang membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit telah berinteraksi dengan pedagang asing, yaitu keramik dari Thailand, Vietnam, dan juga Tiongkok. Hal tersebut bisa dilihat di tempat peninggalan bersejarah Museum Trowulan di Mojokerto. Akibat adanya interaksi yang dilakukan oleh rakyat pribumi dengan pedagang asing maka Kerajaan Majapahit tersebut mendapat pandangan baru tentang agama selain Hindu-Buddha yaitu agama Islam. Pedagang-pedagang tersebut mengenalkan Islam kepada sesama pedagang yang lainnya sehingga dari situlah timbul rasa kekerabatan tanpa memedulikan tentang keturunan, suku, dan juga golongan, serta menjadi ketertarikan tersendiri bagi para pedagang lainnya yang mempunyai adat istiadat dan agama yang berbeda (Sofwan, 2004).

Islam sendiri mudah diterima karena sifatnya yang memiliki toleransi terhadap masyarakat. Selain itu, agama Islam juga bersifat terbuka dan juga komunikatif terhadap warisan Hindu-Buddha. Islam

buku ini tidak diperjualbelikan

bisa berasimilasi dengan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Penyebaran agama Islam tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo yang telah menyebarkan Islam ke pulau Jawa. Dari berbagai sudut arkeologis yang berkaitan dengan fenomena tentang kemajuan agama Islam, dilihat dari makam-makam di Troloyo yang lebih erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Majapahit (Adrisijanti, 2014).

Hubungan antara ketiga agama ini juga dapat dilihat melalui saluran Islamisasi dengan jalan pernikahan yang dilaksanakan oleh raja Majapahit yaitu Brawijaya dengan putri Campa yang beragama Islam. Disampaikan oleh Ma Huan (1970) bahwa Laksamana Cheng Ho dalam ekspedisinya di Jawa dan kemudian berkunjung ke Kerajaan Majapahit menyatakan terdapat tiga golongan besar di sana yang salah satunya merupakan penduduk muslim.

Pengalaman politik pada masa kerajaan sebelum Majapahit memungkinkan timbulnya kesadaran akan berartinya sebuah persatuan, solidaritas, persatuan, dan sikap toleransi yang tinggi pada era Kerajaan Majapahit. Misalnya perdebatan yang terjadi karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dalam upaya pencegahannya, Pemerintah Kerajaan Majapahit telah meresmikan agama Hindu dan Buddha. Artinya, kepercayaan lain juga dapat berkembang seperti halnya agama Islam, di mana unsur-unsur budayanya telah menjadi agama yang telah diterima oleh masyarakat. Sama halnya dengan pernikahan antara Raja Brawijaya dan Putri Campa, memberikan tanda bahwa pemeluk agama Islam dapat berada di posisi tinggi di dalam kerajaan. Begitu pula eksistensi ulama di kerajaan yang menjadi bagian dari elite kerajaan dengan duduk di samping raja sebagai penasihat spiritual keagamaan dan memastikan legitimasi pelaksanaan politik penguasa di tengah rakyatnya yang bergeser menjadi seorang muslim (Maghfiroh, 2019), contohnya Raden Fatah (Sunan Ampel) yang merupakan keponakan dari Putri Darawati, permaisuri Raja Kertajaya. Usaha Islamisasi yang dilakukan Raden Fatah disambut baik oleh Raja Kertajaya dan bahkan sampai diangkat menjadi gubernur

buku ini tidak diperjualbelikan

di wilayah Ampel Denta serta memperbolehkan untuk menyiarkan dakwah ajaran agama Islam.

E. Penutup

Dari beberapa bukti-bukti yang tertera bisa dikatakan hubungan antara ketiga agama di wilayah Majapahit terjalin dengan baik. Kemungkinan sampai saat ini pun masih terdapat sikap toleransi tersebut walaupun sudah berbeda proporsi mengenai dominannya agama yang dianut oleh penduduk di wilayah sekitar Trowulan. Makam Troloyo telah membuktikan bahwa kehidupan antar agama Hindu, Buddha, dan Islam pada masa itu harmonis. Semua itu dapat dilihat dengan keberadaan makam Troloyo sendiri yang terletak di tengah-tengah Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan besar dengan dominasi penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha, dan saat ini Trowulan menjadi pusat peninggalan Kerajaan Majapahit. Hal tersebut terlihat dari beberapa bangunan yang mencerminkan agama Hindu-Buddha dan makam yang mencerminkan agama Islam.

Makam-makam orang penting pemeluk agama Islam ditandai dengan batu nisan yang memiliki lambang 'Surya Majapahit'. Orang-orang penting yang ada di Kerajaan Majapahit itu memiliki posisi tinggi di dalam sistem pemerintahan kerajaan. Entah orang-orang tersebut memang asli pemeluk agama Islam atau mualaf. Yang pasti, pihak kerajaan memang sudah mengakui adanya agama Islam di tengah-tengah penduduk yang mayoritas pemeluk agama Hindu maupun Buddha, bahkan komunitas muslim telah diberikan lokasi tertentu, yakni di Troloyo dekat dengan ibu kota Trowulan.

F. Referensi

Adrisijanti, I. (Ed.). (2014). *Majapahit: Batas kota dan jejak kejayaan di luar kota*. Kepel Press, xx–312. http://repositori.kemdikbud.go.id/2054/

Alwi, S. (1957). *Sejarah perkembangan Islam di timur jauh*. Al Maktab Addami.

Chawari, M. (1997). Inskripsi berhuruf Arab di Kompleks Makam Troloyo (kajian terhadap gaya penulisan, arti dan maksud inskripsi,

buku ini tidak diperjualbelikan

serta kronologinya). *Berkala Arkeologi*, *17*(1), 52–61. https://doi.org/10.30883/jba.v17i1.761

Garraghan, G. J. (1946). *A guide to historical method*. Fordham University Press.

Harahap, A. S. (1951). *Sejarah penyiaran agama Islam di Asia Tenggara*. Islamiah.

Irawant, C. B. (2015). Kaligrafi Arab Khat Naskhi dalam penciptaan karya seni Kriya Kayu. *Fakultas Seni Rupa dan Desain Surakarta*, 131.

Janah, I. R., & Ayundasari, L. (2021). Islam dalam hegemoni Majapahit: Interaksi Majapahit dengan Islam abad ke-13 sampai 15 masehi. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, *1*(6), 732–740. https://doi.org/10.17977/um063v1i6p732-740

Jati, S. S. P., & Wahyudi, D. Y. (2016). The ancient grave of Troloyo in Trowulan. *Mediterranean Journal of Social Sciences, 7*(4), 512. https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4p512

Kartodirjo, S. (1993). *700 tahun Majapahit (1293-1993)*: *Suatu bunga rampai*. Dinas Pariwisata Daerah Jawa Timur.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

Ma Huan. (1970). *Ying-Yai Sheng-Lan 'The Overall Survey of the Ocean's Shores'* (F. Ch'eng-Chün, Ed.; J. V. G. Mills, Penerj.). Cambridge University Press. https://books.google.com/books/about/Ying_Yai_Sheng_Lan.html?id=DjQ9AAAAIAAJ

Maghfiroh, F. (2019). *Toleransi umat Beragama: Studi posisi umat Islam di Kerajaan Majapahit* [*Doctoral dissertation*]. UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/31570/

Mashud, I. (2021). *Kearifan lokal epigrafi Islam masa Majapahit pada makam nisan Troloyo*. LIPI Press. https://doi.org/10.14203/press.295

Mustopo, M. H. (2002). *Lintas budaya pada masa peralihan di Jawa Timur abad XV-XVI M (Kontinuitas dalam Budaya Islam)*.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (1 ed.). PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.

Sofwan, R. (2004). *Islamisasi di Jawa*. Pustaka Pelajar.

buku ini tidak diperjualbelikan

Sofyan, Y. M. (2010). Kekuasaan Jawa: Studi komparatif sistem kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Demak [*Skripsi*]. UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2212

Sulistiono, B. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara: Masalah dan solusinya*. Litbang Departemen Agama, 1–25.

Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara* (D. Salim, Ed.). Direktorat Jenderal Kebudayaan. http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=6603&keywords=arkeologi+islam+nusantara

Wibowo, A. (1983). Nagarakertagama dan Trowulan. *Berkala Arkeologi*, *4*(1). https://doi.org/10.30883/jba.v4i1.300

Widayanti, A. (2015). Makam Troloyo Trowulan Mojokerto": Kajian arkeologi dan sejarah [*Doctoral Dissertation*]. UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/2547/

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB X

PASURUAN DALAM PUSARAN PERADABAN

Erza Sahrul Gunawan

A. Pasuruan Daerah "Tapal Kuda"

Pasuruan merupakan daerah yang terletak pada area yang dikenal dengan sebutan "Tapal Kuda". Daerah Tapal Kuda sendiri menurut Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur merupakan nama sebuah kawasan di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Daerah ini mencakupi tujuh kabupaten, antara lain Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo. Menurut sejarah, daerah Tapal Kuda ini disebut sebagai Blambangan atau dalam bahasa Jawa disebut daerah "Brang Wetan" (Seberang Timur) karena kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari Kerajaan Mataram, artinya daerah ini tidak dikenal sebelum imigran dari kawasan Mataram berpindah mengisi kawasan pesisir selatan. Namun, kini istilah Blambangan

E. S. Gunawan
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: erzad3@gmail.com

© 2025 Editor & Penulis

Gunawan, E. S. (2025) Pasuruan dalam Pusaran Peradaban. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (121–135). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031c1521, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

hanya ditujukan untuk wilayah yang sekarang masuk Kabupaten Banyuwangi.

Pesisir merupakan kekuatan terbesar Nusantara dalam mengarungi sejarah. Sejarah telah menunjukkan banyak kota-kota penting di dunia terlahir atau berkembang tidak jauh dari wilayah perairan, baik itu sungai maupun laut, karena pesisir tempat berdirinya pelabuhan dan merupakan tempat para pedagang dari berbagai daerah dan bangsa berinteraksi. Posisi demikian juga menjadikan Pasuruan merupakan salah satu daerah yang cukup berpengaruh di wilayah timur Pulau Jawa.

Akumulasi dari banyaknya interaksi yang terjadi di wilayah pesisir Pasuruan membawa dampak yang tidak sedikit bagi Pasuruan dalam beberapa bidang, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi. Tidak hanya itu, interaksi dari berbagai kelompok pedagang dan pendatang berhasil membawa silang budaya yang turut mewarnai proses berjalannya Pasuruan hingga menjadi salah satu daerah yang cukup diperhitungkan di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya sebentar, proses ini berlangsung terus-menerus hingga melewati beberapa peradaban, mulai dari masa Klasik, Islam, hingga masa Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam legenda, Pasuruan yang sering dikenal dengan istilah "Pasar Uang" seolah menegaskan bahwa pada masa silam Pasuruan merupakan daerah yang makmur. Ulasan tentang Pasuruan sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak, namun ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai pijakan dalam melihat Pasuruan jauh ke belakang. Beberapa tulisan yang memuat informasi tentang Pasuruan seperti karya H. J. Domis dari tahun 1830. Domis sendiri merupakan seorang Residen Belanda yang pernah menjabat di Pasuruan. Sebelum bertugas di Pasuruan, Domis disebut pernah menjabat sebagai Residen Semarang. Selain Domis, beberapa laporan atau catatan orang Belanda lain juga cukup penting untuk melihat lorong ke belakang tentang Pasuruan dan daerah lain di wilayah Nusantara. Meskipun belum banyak informasi yang memuat Pasuruan secara lengkap dari sisi historis, hal ini menjadi motivasi tersendiri untuk membuka tabir

buku ini tidak diperjualbelikan

bagaimana sepak terjang Pasuruan dari masa ke masa dalam pusaran peradaban. Hingga kini beberapa dari sisa proses interaksi antarbudaya masih tersisa di beberapa sudut daerah dan kota di Pasuruan.

B. Pasuruan pada Masa Klasik

Dari tulisan Domis (1830) diperoleh beberapa informasi yang dijadikan sebagai sumber untuk menggambarkan Pasuruan dari masa ke masa, terlebih pada masa Belanda. Domis mencatat wilayah Pasuruan yang saat itu berstatus karesidenan sangatlah luas, meliputi Gunung Semeru, Tengger, Kawi dan Arjuno, yang membentang dari selatan ke utara hingga ke laut. Wilayah tersebut saat ini antara lain Malang, Pasuruan, dan Probolinggo serta sebagian Lumajang.

Wilayah Malang merupakan bagian dari Pasuruan yang keberadaannya sudah ada sejak masa kerajaan Singhasari, sedangkan di wilayah Pasuruan sendiri ada beberapa peninggalan kerajaan kuno di wilayah Winongan. Pada masa itu, Pasuruan berada di bawah pengaruh beberapa kerajaan besar, antara lain tahun 800-an berada di bawah Kadiri, tahun 900-an berada di bawah Brambanan, tahun 1002 berada di bawah Medang Kamulan, setelah jatuhnya kerajaan Pajajaran, tahun 1301 sepenuhnya berada di bawah Majapahit. Pada akhir masa Majapahit, Pasuruan banyak menderita kerugian akibat perselisihan antara Majapahit dan Blambangan.

Catatan Belanda De Vries (1931) menyebutkan jika ada sebuah legenda tentang asal-usul nama Pasuruan yang diceritakan oleh orang Portugis, Joao De Barros. Legenda tersebut mengatakan, pada tahun 800-an, pendatang dari Siam memasuki wilayah Jawa Timur. Mereka terdampar karena badai dan petir. Mereka terdampar di kawasan yang luas dan subur, namun belum berpenghuni. Akhirnya putra Raja Siam yang bernama Passara tinggal di wilayah tersebut. Daerah itu pun diberi nama Passarvan (Passaruan) atau Passaroan. Namun, legenda tersebut diyakini lemah karena pada sekitar tahun 755 M dalam catatan N. J. Krom sudah ditemukan jejak Hinduisme di wilayah Malang dan tidak jauh dari Pasuruan. Jejak masa klasik yang lebih pasti adalah Pasuruan berada di bawah pengaruh Pu

buku ini tidak diperjualbelikan

Sindok pada tahun 928 M. Pada masa Airlangga, Pasuruan diyakini sebagai bagian dari wilayah Jenggala dan kemudian berada di bawah pengaruh Tumapel dan Singhasari.

Dalam catatan kitab Nagarakrtagama tentang perjalanan Raja Majapahit Hayam Wuruk menunjukkan beberapa tempat yang diyakini sebagai nama-nama daerah di wilayah Pasuruan, yang hingga kini masih bisa dikenali dari toponimi nama desanya. Beberapa daerah tersebut, antara lain Bayanghalo (Balong, dekat Keraton), Kedun Dawa (Kedungdowo), Madakaripura (tanah hadiah untuk Gajah Mada), Mungguh (Tegalpunggu), Ganten Poh (Poh Jentrek; Manggalan), Capahan (Tapa'an), Kalampisan (Klampisan), Lumbang, Pantjar (Pancur), Tungilis (Tenggilis), Pabayeman (Bayeman), Ranu Akuning (Ranu Klindungan), Balerah (Blerah), dan masih banyak lagi. Dalam catatan tersebut juga menyebutkan Hinduisme dan Budhisme hidup berdampingan. Sisa peninggalan zaman Hindu-Buddha pun tersebar dari wilayah barat ke timur, seperti Candi Jawi, Candi Gunung Gangsir, hingga Patirtaan Banyu Biru.

C. Konflik dengan Mataram

Pada masa Islam, Pasuruan merupakan bagian dari kesultanan Demak. Sejak melemahnya Majapahit, Demak di bawah pemerintahan Raden Patah gencar menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok timur Jawa sehingga secara umum, pada waktu itu, masyarakat Pasuruan sudah mengenal agama Islam, meskipun belum semua masyarakat memeluk agama Islam karena beberapa di antara mereka masih memeluk agama kepercayaan, terutama masyarakat di wilayah Tengger yang masih memeluk agama Hindu (Domis, 1830). Pada masa berikutnya, Islam tampak menjadi kekuatan tersendiri bagi Pasuruan. Terlihat dari kemunculan pesantren-pesantren yang tersebar di pelosok penjuru Pasuruan, dengan Sidogiri sebagai ikon hingga tersemat predikat "Kota Santri".

Berada di bawah pengaruh Kesultanan, dalam Babad Tanah Jawi Pasuruan beberapa kali terlibat dalam situasi gejolak politik. Sultan Demak Ketiga, Pangeran Trenggana(1461), memecah be-

buku ini tidak diperjualbelikan

berapa daerah, di mana menantu laki-lakinya, pangeran dari Madura menguasai daerah Madura, Sumenep, Sidayu, Gresik, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1490, daerah-daerah di bawah kekuasaan Pangeran Madura dinyatakan bebas dan dipilihlah Adipati Surabaya, Wirokromo, sebagai pimpinan. Dalam catatan De Vries (1931), ketika Demak mengalami perpecahan, Pasuruan sempat bergabung dengan Madura, namun pada tahun 1570 berpisah dan bergabung dengan Pajang.

Kemudian sejak 1586, bersama Surabaya dan Kediri membentuk koalisi Brang Wetan melawan pendirian Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Panembahan Senapati. Konflik tersebut membuat wilayah timur, khususnya Pasuruan, terbebas dari pengaruh Mataram hingga takluk dari Mataram pada tahun 1617. Memasuki tahun 1675–1679, Pasuruan kembali dilanda peperangan yang dipicu oleh kelompok Trunojoyo yang menduduki wilayah pesisir Surabaya dan sekitarnya. Perlawanan Trunajaya sendiri melawan Mataram pada masa Amangkurat I yang bersekutu dengan VOC membuat Pasuruan benar-benar berada di luar kontrol dari kesultanan Mataram.

Posisi Pasuruan yang sebelumnya berseberangan dengan Mataram ini nantinya dimanfaatkan oleh Untung Surapati yang terlibat konflik dengan VOC untuk membangun kekuatan sejak 1686. Di bawah kendali Suropati, Pasuruan menjadi daerah yang tidak terikat dengan Mataram. Perlawanan Surapati terhadap Mataram dan VOC berlangsung cukup lama bersamaan dengan masa jabatannya sebagai pemimpin di Pasuruan, yaitu 21 tahun (Domis, 1830). Mengenai kisah perlawanan Surapati ini diceritakan dalam beberapa kisah di Babad Tanah Jawi, dan secara rinci juga ditulis tokoh Belanda, Valentijn. Setelah konflik yang panjang dilalui oleh Untung Surapati dan putra-putranya, Pasuruan secara penuh dikendalikan oleh VOC pada tahun 1743. Sebagai pejabat daerah Pasuruan ditunjuklah pangeran dari Kartasura, Notonegoro, untuk mengisi pemerintahan.

buku ini tidak diperjualbelikan

D. Pasuruan, Belanda, dan Gula

Semenjak berada di bawah kendali VOC, telah dibentuk divisi Oost hook atau ujung timur pulau, meliputi wilayah Gresik, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sumenep dengan Surabaya sebagai pusatnya. Belanda mulai menempatkan tentara atau pegawai VOC di wilayahnya. Mereka diberikan fasilitas untuk mengelola sebagian tanah. Salah satu tentara atau pegawai VOC yang pernah bertugas di Pasuruan adalah Johannes Coert (Jan Koert). Jan Coert merupakan seorang tentara VOC sejak tahun 1756 yang berasal dari Horberg, Jerman, yang kemudian ditugaskan di beberapa tempat, seperti Semarang dan Bangkalan. Pada tahun 1792, Jan Coert dipindahtugaskan ke wilayah Pasuruan menggantikan Mayor Adriaan Van Rijks yang meninggal. Sebagai tentara VOC dengan pangkat tinggi, Coert mendapatkan jatah wilayah Apanage sebesar 45,4 hektare. Di wilayah Kedawung inilah pada tahun 1800 oleh Residen Pasuruan, Ligten, Coert diizinkan menggabungkan beberapa perusahaan gula hingga menjadi sebuah pabrik gula yang berdiri di Desa Kedawung.

Pada tahun 1801, Jan Coert meninggal, dan pengelolaan perusahaan Kedawung beralih kepada Johannes Hesselaar (Husselaar) yang juga bertugas sebagai komandan. Johannes Hesselaar sendiri kemudian meninggal pada tahun 1830 dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hermanus Theodorus Hesselaar. Dalam catatan arsip lain dari tahun 1938 yang dimiliki Belanda, muncul nama lain yang berbeda namun diyakini masih dengan orang yang sama, yaitu Hermanus Theodorus Hofland. Dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan atau pabrik gula Kedawung dikelola oleh keluarga Hesselaar. Penerus keluarga Hesselaar adalah seorang menantunya yang bernama Gerrit Lebret dan berhasil menjadi "Raja Gula" di wilayah Timur Pasuruan dengan membangun pabrik gula Kedawung hingga menjadi pabrik gula yang sukses dan bertahan hingga kini.

Pasca-kebangkrutan VOC, banyak perubahan terjadi di Pulau Jawa. Ketika Jawa jatuh ke tangan Inggris, Raffless membagi Pulau Jawa menjadi 16 prefektur (karesidenan), salah satunya Karesidenan Pasuruan dengan total populasi pada tahun 1815 berjumlah 108.812

buku ini tidak diperjualbelikan

jiwa (pribumi 107.752 jiwa dan Tionghoa 1.070 jiwa) (Raffless, 2014, 6 & 38). Karesidenan Pasuruan sendiri meliputi wilayah Kabupaten Bangil, Malang, Probolinggo, dan sebagian Lumajang. Selanjutnya, Pasuruan pada era Belanda dikenal dengan istilah *Oud Indische staad* (Kota Lama) yang bercirikan pemisahan antara pemerintahan Bumiputera dan Kolonial. Kantor Bupati dan aloon-aloon merupakan simbol dari kekuasaan Bumiputera, sedangkan kantor residen dan asisten residen adalah simbol kolonial (Siska, 2018, 108).

Penunjukan Pasuruan sebagai pusat karesidenan bukan tanpa sebab mengingat posisinya yang berdekatan dengan Surabaya, tanah yang subur, serta ditunjang dengan pelabuhan yang ramai menjadi lokasi yang menguntungkan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu, Belanda sejak abad ke-19 menaruh perhatian lebih kepada Pasuruan. Sektor yang menjadi andalan dari wilayah Pasuruan adalah perkebunan. Salah satu komoditas ekspor andalan Belanda pada abad ke-19 di wilayah Pasuruan adalah gula. Terbukti dengan ditemukannya banyak pabrik gula dan ada yang masih aktif hingga sekarang. Belanda bahkan membangun Pusat Penelitian Pabrik gula Indonesia (P3GI) atau Proefstation Oost Java pada tahun 1887 di Pasuruan.

Pembahasan tentang Pasuruan pada era kolonial lekat kaitannya dengan kemegahan dan kegemilangan Belanda dalam mengelola wilayah, baik itu di desa maupun kotanya. kekayaan alam yang dimiliki membuat Belanda pada waktu itu membangun berbagai aset dan fasilitas untuk menunjang kepentingan mereka. Sektor perkebunan adalah yang paling diutamakan oleh Belanda. Hasil perkebunan lainnya adalah tanaman kasumba dan padi. Hasil pertanian yang melimpah dan kebutuhan pertahanan di wilayah pesisir pantai utara Jawa membuat Belanda ingin berbenah dengan membangun jalur kereta api, terlebih pada waktu itu harga sewa hewan ternak penarik gerobak mengalami kenaikan yang menyulitkan Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1871, ide pembangunan rel kereta api mulai dirancang. Jalur yang diutamakan adalah Surabaya–Pasuruan, dan kemudian diresmikan sejak 1878 oleh Gubernur Jenderal Mr. J. W. Van Lansberge (Reitsma, 1928). Pembangunan rel kereta api dengan

buku ini tidak diperjualbelikan

jalur ini menunjukkan bahwasannya Pasuruan merupakan kota penting yang berdampingan dengan Surabaya.

Kemegahan Kota Pasuruan tergambar pada novel karya sastrawan Belanda Louis Couperus yang terbit pada tahun 1900. Novel yang berjudul *De Stille Kracht* atau "Kekuatan Diam" tersebut menggunakan Pasuruan sebagai set tempatnya. Sekilas dalam novel tersebut menggambarkan kemegahan hunian Belanda, kantor pemerintahan, gedung *societet, bulevar*, hotel, gereja, jembatan, dan juga stasiun. Penggambaran kondisi Kota Pasuruan dalam novel tersebut sangat penting untuk melihat Pasuruan pada era kolonial Belanda. Penggambaran itu pula yang menunjukkan bahwa kawasan Pasuruan pada era kolonial mengalami modernisasi yang tidak kalah dengan kota besar lainnya di Jawa.

Beberapa sisa bangunan *heritage* dan struktur bergaya Indische pada Kota Pasuruan yang digambarkan novel tersebut saat ini masih banyak ditemui. Gaya bangunan Indische sendiri dimulai sejak masa Daendels (1808–1811). Selama menjabat, Daendels menginginkan hunian yang lebih sehat dengan mengubah gaya bangunan-bangunan penting menjadi ala villa desa, yaitu bangunan besar dan mewah yang memiliki halaman luas dan dilindungi pepohonan. Terlihat dari segi arsitektur, Daendels menghidupkan perpaduan antara European style dengan bangunan khas Tionghoa dan Jawa yang kemudian lebih dikenal dengan gaya bangunan Indische (campuran elemen-elemen Eropa dengan Indonesia) (Wertheim, 2014, 133).

E. Peran Tionghoa di Pasuruan

Sejak VOC memindahkan pusat aktivitasnya ke Batavia atau pada masa pemerintahan Jan Pieter Zoon Coen, gelombang kedatangan orang-orang Cina semakin besar. Hal ini sejalan dengan proyek besar yang sedang dibangun oleh sang Gubernur Jenderal untuk membangun kota yang modern. Salah satu alasan Coen banyak mendatangkan orang Cina karena tidak percaya dengan Pribumi, dikhawatirkan

buku ini tidak diperjualbelikan

mata-mata dari Banten atau Mataram. Kebijakan ini membuat banyak orang Cina yang bekerja sebagai kontraktor bangunan dan berperan penting dalam pembangunan kota di Batavia (Shahab, 2013). Peran orang Tionghoa dalam mendukung kepentingan Belanda menempatkan mereka pada kelas sosial yang cukup strategis. Pemerintahan Belanda memanfaatkan cara komunikasi orang Tionghoa yang luwes untuk menjadi penyambung antara orang Belanda dengan Pribumi.

Pascahuru-hara di Batavia tahun 1740, Belanda menerapkan pemisahan tempat tinggal bagi warga Tionghoa atau *wijkenstelsel*. Untuk memudahkan pengawasan terhadap kelompok Tionghoa, Belanda menunjuk salah seorang di antara mereka yang berpengaruh untuk mengatur kelompok Tionghoa di kota-kota. Berdasarkan hal itu, kemudian lahir Pecinan dan jabatan administratif atau opsir yang bergelar *luitenant, kapitein dan majoor der Chinezen*. Sebuah jabatan yang bergelar militer, namun tidak ada kaitannya dengan militer karena lebih bersifat politik, sosial dan ekonomi. Mereka yang ditunjuk sebagai opsir ini berasal dari kalangan terpandang dan mapan secara ekonomi (Haryono, 2017:28).

Cerita Opsir Tionghoa bisa dikatakan berawal dari Batavia, yaitu tentang tokoh Souw Beng Kong, yang merupakan Kapiten Cina pertama di Pulau Jawa yang diangkat oleh Belanda. Kapiten Souw Beng Kong cukup menarik kisahnya karena merupakan imigran Cina pertama yang diangkat menjadi Kapiten atau opsir oleh J. P. Coen pada tahun 1619 atau beberapa bulan setelah Coen menguasai Batavia (Shahab, 2013).

Seakan sama dengan apa yang terjadi pada Batavia, di wilayah Pasuruan juga memiliki kisah yang hampir sama tentang hubungan antara pemerintah Belanda, Opsir Cina dan Pribumi. Hanya saja jika di Batavia hubungan itu sudah terjadi sejak masa VOC, di Pasuruan bukti yang tersedia sementara terjadi pada masa Kolonial Belanda. Jika di Batavia menyuguhkan peran Souw Beng kong dari keluarga Souw, di daerah Pasuruan akan terlihat peran dari keluarga Han dan

buku ini tidak diperjualbelikan

Kwee dengan masing-masing tokohnya yang meninggalkan jejak kejayaan di Pasuruan.

F. Keluarga Han

Keluarga Han berasal dari seorang tokoh yang bernama Han Siong Kong. Lahir di Tianbao, Tiongkok, pada tahun 1673. Ia menetap dan meninggal di Lasem. Terdapat kisah unik bagaimana keluarga Han menyebar hingga ke Jawa Timur. Ketika Han Siong Kong meninggal, anak-anaknya meninggalkan jasad dan peti matinya karena hujan badai. Ketika hujan reda dan mereka kembali, jasad sang ayah sudah dimakamkan oleh kekuatan misterius. Arwah Han Siong Kong mengutuk anak-anaknya agar tidak lagi melangkahkan kakinya di tanah Lasem karena dianggap kurang berbakti. Seketika itu dikisahkan anak-anak Han Siong Kong kemudian memilih untuk meninggalkan Lasem dan sebagian menuju ke Jawa Timur. Beberapa menetap di Surabaya, Pasuruan, dan sekitarnya (Salmon, 1991).

Asal hubungan kerabat keluarga Han di Pasuruan masih menjadi pertanyaan hingga sekarang, namun Leluhur mereka disebutkan berasal dari Han Sam Pwee. Han Sam Pwee memiliki tiga orang anak, di antaranya Han Hoo lam, Han Hoo Tjoan, dan Han Hoo Tong. Untuk keturunan Han sendiri di Pasuruan masih perlu ditelusuri lebih mendalam hubungan yang lebih menguatkan sehingga bisa dipertemukan pada garis leluhur mereka apakah dari Lasem atau dari Madura (Siong, 2001).

Kisah keluarga Han di Pasuruan yang cukup terkenal dimulai dari tokoh besar bernama Han Kik Ko, anak dari Han Bwee Kong (Surabaya) yang menjabat Kapitan Pasuruan (1771–1794). Han Kik Ko berasal dari garis keturunan Lasem, yang merupakan tokoh Tionghoa yang sangat termasyur dan memiliki aset membentang dari selatan Surabaya hingga Pasuruan, kemudian ke timur hingga Probolinggo. Tidak mengherankan jika kemudian karier kapitan yang dia miliki berakhir gemilang dengan menjabat sebagai Bupati Probolinggo (1810–1813) dengan gelar Jawa Tumenggung (Salmon, 1991).

buku ini tidak diperjualbelikan

Setelah Han Kik Ko, ada keluarga Han yang menjabat sebagai kapitan Pasuruan (1881–1886), ia adalah Han Hoo Tjoan (Haryono, 2017, 121). Han Hoo Tjoan berasal dari keluarga Han Sam Pwee. Antara Han Kik Ko dan Han Hoo Tjoan kuat dugaan bahwa keduanya masih memiliki kekerabatan. Claudine Salmon dan Han Bing Siong, yang meneliti tentang keluarga Han di Jawa Timur, meyakini, pada dasarnya keluarga Han yang berada di Indonesia berasal dari satu tempat leluhur yang sama di Tiongkok, yaitu Desa Tian Bao.

Satu nama lagi yang tidak kalah terkenal adalah adik dari Han Hoo Tjoan yang bernama Han Hoo Tong. Ia merupakan pengusaha Tionghoa yang sukses di bidang industri gula. Hingga sekarang bukti kekayaannya berupa bangunan megah masih berdiri kokoh di Pasuruan. Selain memiliki aset perusahaan yang besar dan beberapa didedikasikan untuk keluarga, Han Hoo Tong dalam buku Peringatan 100 tahun THHK Pasuruan dikenang sebagai promotor sekaligus presiden pada lembaga pendidikan Tionghoa atau Tionghoa Hwee Kwan (THHK) di Pasuruan.

G. Keluarga Kwee

Menurut keterangan dari salah satu keturunan keluarga Kwee, Hong Seen Kwee, yang secara kebetulan juga beberapa tahun terakhir sedang meneliti leluhurnya, bahwa leluhur mereka datang dan menetap di Pasuruan sejak abad ke-18 Masehi, yang berasal dari Desa Liu Chuan, Provinsi Fujian, Tiongkok. Namun, menurutnya menambahkan, jika masih banyak hal yang tersimpan tentang asal-usul atau kisah di balik perjalanan leluhur mereka. Keluarga Kwee sendiri ia kisahkan sebagai keluarga yang bekerja keras sehingga mampu membentuk jaringan bisnis, sosial dan politik yang besar dan sukses.

Leluhur tertua keluarga Kwee di Pasuruan berasal dari Kwee Tjong Hook (1754–1842). Kwee Tjong Hook membangun sebuah rumah keluarga yang kini dikenal dengan Hotel Daroessalam. Anak pertamanya Kwee Ting Tjiang menjadi Wijkmeester di Pasuruan pada tahun 1871. Kemudian diangkat sebagai letnan (1873) membantu Kapitan Kwee Siou Liem (Kwee Malang) yang ditugaskan di Pasuruan.

buku ini tidak diperjualbelikan

Selanjutnya pada tahun 1887, Kwee Sik Poo yang merupakan cucu dari Kwee Tjong Hook dari anak keduanya, diangkat sebagai Kapitan Pasuruan. Bahkan bisa dikatakan Kwee Sik Poo adalah Tionghoa paling sukses dalam sejarah opsir Tionghoa Pasuruan.

Kesuksesan Kwee Sik Poo ditunjang dari bisnis yang membuat keluarganya begitu terhormat dan kaya raya adalah mengelola pabrik gula. Selain dikenal sangat kaya, Kapitan Kwee Sik Poo di Pasuruan juga dikenal masyarakat, khususnya di kalangan Tionghoa sangat baik dan dermawan. Kwee Sik Poo sering membantu rakyat yang kurang mampu sehingga kemudian mendapatkan gelar kehormatan Ridder Van Oranje Nassau pada tahun 1911 dan 1922 dari pemerintah Belanda. Sebuah gelar ksatria kehormatan yang diberikan kepada seseorang atas jasanya yang besar bagi Belanda. Tidak hanya itu, Jabatan Kapitan Kwee Sik Poo setelah mengabdi selama 36 tahun naik menjadi Mayor Tituler (kehormatan). Pada tahun 1926 Mayor kwee Sik Poo meminta untuk digantikan anaknya yang bernama Kwee Khoen Ling. Kwee Khoen Ling sendiri sudah menjadi letnan sejak tahun 1918 dan menjabat sebagai kapitan menggantikan ayahnya sampai pada tahun 1931 (Haryono, 2017, 124).

H. Penutup

Pasuruan sebagai suatu wilayah telah mengalami proses panjang dalam perjalanan sejarah. Dalam proses itu segala macam bentuk perubahan dan dinamika peradaban telah dilalui. Sejak dari zaman perkembangan Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan Belanda. Dinamika perkembangan zaman tersebut membentuk Pasuruan menjadi daerah yang dihuni oleh masyarakat yang multikultural. Budaya yang terbentuk secara *tangible* dan *intangible* terekam dengan sangat baik dalam memori kolektif masyarakat. Ini terbukti dengan masih bertahannya objek budaya tersebut di tengah rongrongan perubahan dan modernisasi yang kian cepat.

Secara kultural, letak Pasuruan yang berada di wilayah pantura dan terdapat dua etnis dominan, yaitu Jawa dan Madura, membuat masyarakatnya dikenal dengan istilah Pandhalungan. Masyarakat

buku ini tidak diperjualbelikan

Pandhalungan (Pendalungan) adalah masyarakat yang berada dalam posisi transisi dalam pola sosial budayanya. Masyarakat transisi adalah masyarakat yang memiliki kultur campuran antara dua budaya dominan yang ada. Etika sosial, seperti tata krama, sopan-santun, atau budi pekerti orang pandalungan berakar pada nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan yang mewarnainya, yakni kebudayaan Jawa dan kebudayaan Madura.

Dalam perilaku sehari-hari, masyarakat transisi atau orang pandalungan sangat akomodatif, toleran dan menghargai perbedaan. Jika merasa tidak senang, mereka akan segera mengungkapkannya. Sebaliknya, jika merasa senang, mereka pun akan segera mengatakannya. Di kawasan ini hampir tidak pernah terjadi konflik antarkelompok etnis. Konflik yang pernah dan mungkin terjadi, lebih disebabkan akar konflik berupa kecemburuan sosial yang bernuansa ekonomi, politik, pribumi dan nonpribumi, atau bernuansa keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, budaya orang pandalungan sangat sarat dengan nuansa Islam. Hal itu terjadi karena di wilayah ini ulama dan kiai bukan hanya menjadi tokoh panutan, melainkan juga tokoh yang memiliki akar kuat pada beberapa kekuatan politik (Sutarto,2006).

Hebatnya lagi, Pasuruan tidak hanya dihuni oleh dua etnis di atas, tetapi juga beberapa kelompok lain seperti Eropa dan Timur Asing. Akumulasi dari berbagai entitas tersebut membuat Pasuruan menjadi wilayah yang berbudaya unik, menarik dan diperhitungkan. Ditunjang dengan kondisi dan letak geografis yang strategis membuat Pasuruan menjadi daya tarik tersendiri di bidang ekonomi. Terbukti dengan posisi Pasuruan dalam sejarah yang selalu mengambil peran sebagai salah satu wilayah berpengaruh di wilayah pesisir Jawa Timur.

Hadirnya Pasuruan dalam peran aktif pada panggung sejarah wilayah di Jawa Timur tidak terlepas dari gabungan interaksi yang telah tercipta. Kelompok pribumi dengan elite lokalnya berhasil membentuk Pasuruan hingga mencapai pada level tertentu dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Mereka tidak hanya berkuasa, namun juga berperan aktif menghidupkan aktivitas ekonomi dengan menjadikan kekayaan alam yang melimpah sebagai andalan ditunjang

buku ini tidak diperjualbelikan

pelabuhan sebagai aset yang penting. Kehadiran orang Tionghoa juga menjadi katalis yang menentukan arah perubahan Pasuruan menjadi daerah diperhitungkan juga sangat luar biasa berpengaruh. Mereka berhasil menjadi penghubung jarak antara elit lokal dan elite Eropa yang juga ambil bagian dalam kemajuan Pasuruan.

Dengan demikian, berbagai macam faktor mulai dari sejarah dan lain sebagainya menunjukkan bahwa masyarakat Pasuruan telah mengalami perubahan sosial dalam mengarungi zaman dan tantangan peradaban. Seperti pendapat dari Ibnu Khaldun bahwasannya faktor perubahan sosial sangatlah kompleks sehingga pendekatan historis adalah cara yang tepat untuk memahami perubahan sosial. Lebih lanjut lagi Arnold Toynbee berpendapat tentang "Tantangan dan tanggapan" dalam mengarungi perubahan. Keberagaman etnis dan kondisi lingkungan fisik hanya menjadi penunjang dalam membentuk perubahan yang dialami oleh Pasuruan. Karena menurutnya tidak ada ras atau etnis superior, bahkan penentu bisa jadi perannya diambil oleh kaum minoritas kreatif atau kelompok elite yang bisa membawa arus perubahan (Lauer, 1993).

I. Referensi

Siong, H. B. (2001). A short note on a few uncertain links in the Han Lineage. *Archipel, 62*, 43–52.

Couperus, L. (2017). *De Stille Kracht: Kekuatan diam* (Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Christina Dewi Elbers). Kanisius.

De Vries, E. (1931). Landbouw en welvaart in het regentschap Pasoeroean; Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java [*PhD thesis*]. University of Wageningen, the Netherlands. Veenman & Zonen.

Domis, H. J. (2020). *Pasuruan 1830: Catatan H. J. Domis* (Suntingan Teks dan Alih Bahasa oleh Ratih Kirana S.P & Dian Soni A). Perpusnas Press.

Haryono, S. (2017). *Perkawinan strategis: Hubungan keluarga antara opsir-opsir Tionghoa dan 'cabang atas' di Jawa pada abad ke-19 dan 20*. Steve Haryono.

Lombard-Salmon, C. (1991). The Han Family of East Java. Entrepreneurship and politics (18th-19th Centuries). *Archipel, 41*, 53–87.

buku ini tidak diperjualbelikan

Raffles, T. S. (2014). *The history of Java*. Penerbit Narasi

Reitsma, S. A. (1928). *Korte geschiedenis der Nederlandsch-indische spoor-en tramwegen*. Weltevreden G. Kolff & Cc.

s.n. (1938). *Short history of the Pamanoekan and Tjiassemlands*. Centrale Bibliotheek Kon. Inst. V.D. Tropen Amsterdam.

Shahab, A. (2013). *Waktu Belanda mabok lahirlah Batavia*. Buku Republika.

Siska, Y. (2018). *Geografi sejarah Indonesia*. Garudhawaca.

Wertheim, W.F. (1999). *Masyrakat Indonesia dalam transisi*. Tiara Wacana.

Wiriaatmaja, R., Dasuki, A., & Wildan, D. (2003). *Sejarah dan peradaban Cina: Analisis filosofis-historis dan sosia-antropologis*. Humaniora Utama Press.

Yusivadi, H. (2008). *Budaya Pandalungan multikulturalitas dan hibridisasi budaya antaretnik* dalam *pemetaan kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah upaya pencarian nilai-nilai positif*. Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi JawaTimur Bekerjasama dengan Kompyawisda Jatim.

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB XI

JEJAK BANGUNAN INDIS
PASURUAN SEBAGAI SIMBOL KEJAYAAN PEREKONOMIAN ABAD KE-18–19

Alfan Fikril Hakim

A. Pasuruan dan Potensi Tinggalan Kolonial

Praktik kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa, khususnya Belanda, telah memberikan dampak cukup besar bagi bangsa Indonesia. Adapun salah satu dampak yang sangat terasa yaitu adanya perubahan dari sistem ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi uang dan kapitalis (Abubakar dkk., 2020). Perubahan sistem perekonomian tersebut secara simultan berpengaruh juga terhadap perkembangan sosial masyarakat. Sebagai contoh, dari sekian banyak wilayah di Jawa yang menerapkan sistem tanam paksa Pasuruan menjadi wilayah dengan kemajuan sangat signifikan (Niel, 2003).

Kemajuan yang dialami Pasuruan dapat diamati dari peran penting wilayah tersebut sejak jatuh ke tangan VOC pada 1707 (Abubakar dkk., 2020). Bahkan disebutkan bahwa Pasuruan pernah menjadi pu-

A. F. Hakim
Universitas Negeri Malang, *e-mail*: alfanfikril@gmail.com

© 2025 Editor & Penulis

Hakim, A. F. (2025) Jejak Bangunan Indis Pasuruan sebagai Simbol Kejayaan Perekonomian Abad KE 18–19. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (137–156). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1522, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

sat Karesidenan, kotapraja (*gemeente*), dan sentra industri perkebunan tebu (Nurhajarini, 2010). Tidak hanya itu, Pasuruan juga dianggap sebagai kawasan yang memiliki potensi sangat besar sebagai kawasan transit serta perdagangan Opium (Rush, 2000). Posisi Pasuruan yang strategi secara ekonomi membuat banyak orang ingin menetap di wilayah tersebut.

Disebutkan dalam *Punika Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean* bahwa pada masa pemerintahan Adipati Nitiadiningrat, wilayah Pasuruan dihuni oleh beberapa etnis, di antaranya Jawa, Mandar, Bawean, Bugis, Sumbawa, Madura, dan Cina (Nurhajarini, 2010). Khusus untuk etnis Cina, etnis ini merupakan tokoh penting penggerak perekonomian di Pasuruan. Informasi ini juga dijelaskan dengan spesifik oleh Lombard & Salmon (1991) yang menyatakan bahwa pada abad KE-18, Bupati Pasuruan selalu menyewa tanah untuk dikelola oleh Han Kik Ko di bidang perkebunan.

Pemberian hak akses kepada Han Kik Ko secara khusus maupun kepada orang-orang Cina pada umumnya tidak lepas dari kesuksesan mereka mengembangkan industri gula. Disebutkan bahwa sejak industri gula dikelola oleh etnis Cina terjadi banyak modernisasi dan peningkatan hasil produksi (Reeve, 2017). Dalam data yang lain, G. H. von Faber menyebut bahwa Pasuruan pernah melakukan ekspor 10.963,5 *pikoel* kopi dan 10.843 *pikoel* gula (Handinoto, 2015).

Peran etnis Tionghoa dalam membangun kejayaan perekonomian di Pasuruan ini membuat pemerintah kolonial memberikan banyak hal kepada mereka. Adapun beberapa hal yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada etnis Tionghoa Pasuruan, yaitu pembebasan pajak, pemberian jabatan penting seperti pengangkatan Kapten dan Mayor Cina, serta menggunakan kebudayaan Eropa sebagai gaya hidup (Onghokham, 2017; Sien, 2017). Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan apabila banyak berdiri bangunan-bangunan bernuansa Indis *icon* kejayaan industri perkebunan gula dan peran dominan etnis Cina dalam perekonomian Pasuruan.

Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan kejayaan ekonomi Pasuruan tersebut di antaranya *Proefstation Oost Java* (saat ini men-

buku ini tidak diperjualbelikan

jadi gedung P3GI), Gedung *Societiet Harmonie* (saat ini menjadi gedung Yayasan Untung Suropati), kompleks bekas *Heerenstraat* (saat ini menjadi wilayah jalan Balai Kota Pasuruan), dan beberapa bangunan Indis di kawasan Pecinan. Bangunan-bangunan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sampai saat ini kondisinya masih terawat dengan baik. Namun, latar belakang kesejarahan dari beberapa peninggalan tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar.

Masyarakat Pasuruan hanya mengetahui bahwa peninggalan-peninggalan tersebut sebagai bangunan khas masa kolonial. Menanggapi realita tersebut, penulis merasa bahwa perlu melakukan kajian historis mengenai sebagian bangunan Indis di Pasuruan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pewarisan budaya sekaligus sebagai upaya mengenalkan latar belakang kesejarahan masyarakat Pasuruan di periode kolonial (Suprapta, 2020). Berdasarkan argumentasi tersebut, fokus pada bab ini adalah kondisi perekonomian Pasuruan pra-kolonial, kondisi perekonomian Pasuruan di era kolonial, latar belakang kesejarahan bangunan Indis di Pasuruan, serta hubungan antara bangunan Indis dan kejayaan perekonomian di Pasuruan abad ke-8–19.

B. Perkembangan Ekonomi di Pasuruan Pra-Kolonial

Gambaran awal mengenai perekonomian di Pasuruan sejauh ini masih terkendala oleh terbatasnya sumber. Sumber paling lama sejauh ini menyatakan perekonomian di Pasuruan pada periode klasik bertumpu kepada perdagangan yang dikelola oleh pemerintahan Pu Sindok dengan memanfaatkan Sungai Bangil (Widiah, 2018). Adapun terkait komoditas barang yang diperdagangkan rata-rata meliputi padi/beras, buah-buahan, sirih, pinang, bawan, lada, cabai, kelapa, kemukus, kapulaga, mengkudu, bunga, dan hewan ternak (Nastiti, 2003; Widiah, 2018).

Setelah periode Pu Sindok, gambaran perekonomian di Pasuruan tidak lagi ditemukan. Gambaran mengenai perekonomian di Pasuruan muncul kembali dalam *Punika Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean*.

buku ini tidak diperjualbelikan

Di dalam babad tersebut dijelaskan bahwa perekonomian Pasuruan abad ke-15–16 aktivitasnya difokuskan untuk menyuplai peperangan melawan Palemboam (Blambangan) (Tjiptoatmodjo, 1983). Bupati Pasuruan pada saat itu, Adipati Nitiadiningrat membuat kebijakan untuk mengalihkan semua pendapatan untuk membeli persenjataan, membangun dinding pertahanan kota dari kayu, dan membayar gaji para pegawai (mungkin pekerja) (Nurhajarini, 2010).

Informasi berikutnya tentang perekonomian Pasuruan kembali muncul setelah ditaklukkan oleh Mataram Islam. Dalam informasi tersebut disampaikan bahwa pada era penguasaan Pajang, Pasuruan memilih untuk melepaskan diri dan bergabung dengan Surabaya. Akan tetapi, ketika Mataram Islam berdiri wilayah Pasuruan coba ditaklukkan kembali. Penaklukkan tersebut berhasil disukseskan di masa kepemimpinan Sultan Agung (De Graaf & Pigeaud, 2019). Di bawah kepemimpinan Mataram Islam, Pasuruan dikelola dan ditata seperti wilayah induknya. Khusus untuk kegiatan perekonomian, semuanya dipusatkan di sebelah utara hingga Klenteng. Saat ini, kawasan pasar yang menjadi pusat perekonomian Pasuruan masa pra kolonial berada di sebelah utara Jl. Soekarno-Hatta (Chawari, 2002).

Pada periode di bawah kekuasaan Mataram Islam, perekonomian di Pasuruan kebanyakan digerakkan oleh penduduk lokal. Bicara mengenai penduduk lokal, setidaknya terdapat dua etnis utama di Pasuruan, yaitu etnis Jawa dan Madura, sedangkan terkait dengan pedagang dari etnis lain, seperti Cina, Arab, dan Benggala, sejauh periode tersebut belum banyak disebutkan. Kedua etnis tersebut baru mulai disebutkan dalam laporan yang ditulis oleh H. J. Domis di tahun 1830 (Domis, 2020) dan dalam *Poeniko Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean* (Tjiptoatmodjo, 1983).

C. Perekonomian Pasuruan di Era Kolonial

Gambaran mengenai perekonomian di Pasuruan pada periode kolonial dijelaskan mengalami peningkatan sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari semakin terbukanya Pasuruan dengan kehadiran para pedagang asing, mulai dari Eropa, Cina, Arab, dan Bengal.

buku ini tidak diperjualbelikan

Dalam laporan yang dibuat oleh H. J. Domis (1830 M), masyarakat di Pasuruan mempunyai banyak profesi dan variasi pekerjaan. Ada beberapa penduduk yang menggantungkan hidupnya terhadap penjualan hasil bumi, seperti kelapa, beras/padi, pinang, buah-buahan, sirih, pinang, bawan, lada, cabai, kemukus, kapulaga, mengkudu, bunga, dan hewan ternak (Domis, 2020).

Beberapa orang di Pasuruan juga menggantungkan hidupnya dari kegiatan maritim. Hal ini dapat dijumpai dari beberapa penduduk yang ada di Kampung Mandaran. Orang-orang yang ada di Kampung Mandaran dan sekitarnya digambarkan juga memiliki profesi sebagai petani garam. Digambarkan juga di Kampung Mandaran terdapat satu Gudang Garam (Domis, 2020). Selanjutnya di wilayah Pasar juga terdapat kelompok pedagang dari etnis Arab, Moor, dan Cina. Dijelaskan bahwa pada periode Mataram Islam sampai periode pemerintahan H.J. Domis hanya ada sedikit pedagang Arab dan Moor, sedangkan pedagang Cina sudah mulai banyak dengan beberapa komunitas besar (Domis, 2020).

Informasi mengenai semakin ramainya perekonomian di Pasuruan juga dapat diamati dari *Poeniko Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean*. Di dalam babad tersebut digambarkan bahwa Bupati yang berkuasa dengan gelar "Sang Nata" selalu melakukan pengawasan dan penataan di berbagai tempat. Di dalam kegiatan tersebut, Bupati selalu menyempatkan diri mengatur kawasan pemukiman maupun perdagangan yang diisi oleh banyak orang. Adapun orang-orang tersebut, di antaranya Jawa, Cina, dan Madura (Tjiptoatmodjo, 1983).

Selain beberapa etnis dengan jumlah yang sangat besar tersebut, dalam setiap kunjungannya, Bupati selalu menemui beberapa etnis lain. Bahkan, Bupati juga mengizinkan para bangsa asing terutama Belanda untuk mendirikan Loji. Informasi tersebut termuat dalam *Poeniko Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean* (dalam Tjiptoatmodjo, 1983), bahwa "sang Nata" (bupati) tiap hari mengadakan pengaturan kota. Dijelaskan pula bahwa jalan-jalan dibersihkan, kampung-kampung yakni kampung Jawa, Cina, Madura dan Belanda diatur menurut tempatnya masing-masing sehingga menjadi indah dipandang. Wilayah

buku ini tidak diperjualbelikan

kota yang disebut dalam catatan tulisan tersebut sebagai "nigari" juga kian ramai dikunjungi oleh pedangan asing, seperti pedagang Cina, Belanda, Kandar, Bawean dan Bugis, bahkan Sumbawa.

Hadirnya pengaruh bangsa asing, terutama Cina dan Eropa (Belanda), membuat perekonomian di Pasuruan tumbuh semakin cepat. Bahkan orang-orang kaya dari etnis Cina pada saat itu mendapat kepercayaan oleh penguasa lokal (Bupati Pasuruan) dengan menyewakan beberapa tanah miliknya (Lombard & Salmon, 1991; Domis, 2020). Melihat kesempatan tersebut, beberapa orang kaya dari etnis Cina menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas produksi di sektor perkebunan. Terlebih setelah berlakunya kebijakan *cultuur stelsel* terjadi sebuah perkembangan signifikan pada dua sisi, yaitu pesatnya perekonomian Pasuruan dan semakin kuatnya pengaruh etnis Tionghoa (Niel, 2003).

Perkembangan dan kemajuan tersebut kemudian berdampak kepada perhatian pemerintah terhadap wilayah Pasuruan untuk kebijakan *cultuur stelsel*. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai riset mengenai wilayah Pasuruan untuk kepentingan *cultuur stelsel*. Hasilnya, Pasuruan kemudian dijadikan sebagai salah satu pusat untuk penanaman komoditas tebu yang nantinya diolah untuk industri gula (De Vries, 1931). Menyikapi kondisi yang demikian ini, pemerintah kemudian mendirikan pabrik gula sebagai stimulus untuk meningkatkan produksi dan keuntungan (Niel, 2003).

Turut sertanya pemerintah dalam industri gula di Pasuruan membuat wilayah tersebut semakin maju dalam urusan perekonomian. Tercatat, sebelumnya sudah ada pabrik gula milik swasta Eropa dan milik Kapitan Han Kik Ko (Reeve, 2017; Domis, 2020). Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan industri gula di Pasuruan mengalami peningkatan sangat signifikan. Hal ini dapat diamati dari meningkatnya jumlah pengusaha yang menekuni bidang industri gula. Semula, hanya ada Han Kik Ko dan tuan C. Vos sebagai pengusaha di bidang tersebut (Domis, 2020) kemudian berkembang menjadi 44 orang.

buku ini tidak diperjualbelikan

Adapun rincian dari seluruh pengusaha industri gula di Pasuruan terdiri dari 37 orang dari etnis Cina, 4 orang penduduk lokal, dan 3 orang Eropa. Dengan banyaknya jumlah pengusaha tersebut membuat Pasuruan di setiap tahunnya berhasil menyetorkan 47.514 *pikoel* gula kepada pemerintah kolonial (Tjiptoatmodjo, 1983). Selain urusan peningkatan produksi, industri gula di Pasuruan juga dapat dikatakan sangat stabil. Hal ini dapat diamati pada Tabel 11.1 yang menunjukkan jumlah pabrik gula di Pasuruan sejak 1830–1870. Dari data tersebut dapat diamati bahwa selama 40 tahun hanya ada satu pabrik gula yang menghentikan kegiatan produksinya (Ismain, 2001).

Tabel 11.1 Perkembangan Jumlah Pabrik Gula di Pasuruan Tahun 1830–1870

Tahun	Jumlah
1830	17
1845	18
1850	18
1856	17
1860	17
1865	17
1870	17

Keterangan: Perkembangan jumlah pabrik gula di Pasuruan yang relatif tidak mengalami perubahan signifikan pada kurun waktu 1830–1870.
Sumber: Ismain (2001)

D. Latar Belakang Kesejarahan Bangunan Indis di Pasuruan

Kemajuan perekonomian di wilayah jajahan memberikan dampak sangat signifikan bagi pemerintah kolonial. Dengan kemajuan tersebut, beberapa kebijakan mulai mengalami perubahan. Adapun salah satu perubahan yang berdampak cukup besar yaitu mulai dicabutnya larangan membawa istri dan anak ke wilayah koloni, salah satunya ke Hindia Belanda (Hudiyanto, 2011). Semakin meningkatnya populasi orang-orang Eropa di Hindia Belanda kemudian memaksa pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan khusus. Adapun kebijakan khusus yang dimaksud adalah melakukan penataan wilayah pemukiman.

buku ini tidak diperjualbelikan

Penataan permukiman ini dilakukan dengan membagi kota menjadi beberapa kawasan hunian berdasarkan ras (Basundoro, 2016).

Kebijakan terkait pembagian kawasan hunian tersebut kemudian berdampak kepada penataan pemukiman yang lebih teratur. Akan tetapi, pada sisi yang lainnya, pembagian kawasan berdasarkan ras ini menyebabkan semakin tampak jelasnya kesenjangan sosial. Hal ini dapat diamati dari semakin majunya kawasan utama, seperti pemukiman Eropa, Pecinan, dan wilayah yang dihuni oleh penguasa lokal (Basundoro, 2016). Meskipun demikian, dari sisi budaya pembagian kawasan hunian berdasarkan ras tidak menghalangi adanya perkembangan budaya masyarakat pada masa itu.

Perkembangan budaya ini dapat diamati dari berkembangnya gaya hidup yang disebut sebagai Indis (Soekiman, 2014). Gaya hidup ini dijelaskan sebagai percampuran antara budaya Eropa, lokal (Jawa), dan Cina. Penggunaan gaya hidup ini semakin masif dengan adanya kebijakan desentralisasi. Kebijakan tersebut secara resmi ditetapkan untuk memudahkan pengelolaan para penduduk Eropa di tanah jajahan dan memudahkan pemantauan berbagai etnis terutama Cina (Handinoto, 2015).

Meskipun demikian, dari sisi positifnya dengan kebijakan ini beberapa daerah di wilayah koloni memiliki kedaulatan dalam mengelola dan menyusun kebijakan. Hal ini dapat diamati dari pengelolaan Pasuruan sebagai sebuah wilayah dengan potensi perekonomian sangat besar. Pasuruan saat itu yang merupakan kawasan strategis dengan industri gulanya tidak luput dari penerapan kebijakan tersebut, terlebih setelah Pasuruan diberikan status *Gemeente* oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang ada di Batavia. Setelah Pasuruan diberikan status *Gemeente* pada 1918, Residen dan *Burgemeester* mulai membangun sarana prasarana yang menunjang kegiatan industri, sarana kebudayaan, dan lain sebagainya (Hamdy & Wishnu, 2021).

Kebijakan turunan yang muncul akibat adanya desentralisasi juga dapat diamati dari pemberian hak-hak istimewa kepada para

buku ini tidak diperjualbelikan

pengusaha etnis Cina di Pasuruan. Para pengusaha tersebut dianggap sebagai mitra bisnis yang sangat membantu pemerintah kolonial dalam pengembangan industri perkebunan hingga membuat Pasuruan menjadi sentra industri perkebunan di wilayah bagian timur pulau Jawa. Adapun dari sekian banyak hak istimewa yang ada, yang paling menarik adalah diperbolehkannya orang-orang Cina menggunakan budaya Eropa (Onghokham, 2017).

Pemberian hak tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan budaya pada masa itu. Hal ini dapat diamati dari penggunaan gaya arsitektur bernuansa budaya Indis pada rumah-rumah milik pengusaha Cina di Pasuruan. Adapun beberapa bangunan tersebut, di antaranya *Omah* Singa, gedung milik Yayasan Pancasila, dan Hotel Daarussalam. Ketiga bangunan tersebut menjadi *icon* penggunaan budaya Indis di bidang arsitektur oleh pengusaha Cina sebagai bukti dari kemajuan perekonomian Pasuruan di bawah pengelolaan mereka (Sien, 2017).

1. *Omah Singa*

Penyebutan bangunan tersebut dengan nama *Omah* Singa oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan patung singa yang ada di depannya (lihat Gambar 11.1). Patung singa tersebut dalam sejarahnya merupakan ornamen pindahan dari Hotel Daarussalam. Ornamen tersebut dipindahkan setelah Hotel Daarussalam dibeli oleh pengusaha dari etnis Arab yang berasal dari Yaman, yaitu Muhammad bin Thalib (Sien, 2017).

Omah Singa diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1825 oleh seorang arsitektur dari kalangan orang Belanda. Belum diketahui secara jelas awal kepemilikan bangunan ini, akan tetapi dalam perkembangannya Tan Kong Seng atau Tan King Soen (seorang Kapiten Cina di Pasuruan) pada tahun 1840 membeli dan menempatinya (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kepariwisataan, 2015).

buku ini tidak diperjualbelikan

Keterangan: Bagian depan bangunan *Omah* Singa yang dihiasi dengan *ornament* patung singa.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.1 Patung *Omah* Singa

Pada perkembangannya, rumah ini masih dimiliki oleh keturunan dari Tan Kong Seng (Tan King Soen). Kepastian tersebut dimilikinya setelah putranya (Tan Hing Nio) menikahi Kwee Khoen Ling (Sien, 2017). Kwee Khoen Ling merupakan salah satu keluarga dari Kwee Sik Poo yang mendiami Hotel Daarussalam, Kwee Khoen Ling memutuskan untuk menempati rumah warisan dari keluarga istrinya setelah Hotel Daarussalam dijual.

Sebagai bagian dari hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, *Omah* Singa sangat kental dengan nuansa Indis dan sangat mewah. Bangunan ini memiliki dua paviliun terpisah yang berada di kedua sisi bangunan (Sien, 2017). Pada bangunan utama dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lengkap. Bangunan ini juga memiliki *desain* tampilan bagian depan yang mirip dengan Hotel Daarussalam, yang

buku ini tidak diperjualbelikan

artinya memiliki kemungkinan bahwa kedua bangunan ini dibangun pada periode yang sama.

Sien (2017) menjelaskan bahwa interior *Omah* Singa sangat unik dengan memadukan beberapa gaya arsitektur sekaligus. Pada bagian atap menggunakan *design* bergaya Romawi klasik, unsur dekorasi paling dominan menggunakan gaya *Art Nouveau* (lihat Gambar 11.2) khas Eropa (Handinoto, 1990). Gambaran dengan gaya tersebut juga dapat diamati dari panil-panil kaca impor yang bergaya khas Venesia pada jendela dan pintu (lihat Gambar 11.3). Kemudian pada bagian kamar, dindingnya dihiasi dengan tempelan ubin, porselin indah yang diimpor langsung dari Italia (lihat Gambar 11.4), serta berbagai macam fitur-fitur mewah lain yang ditemui pada rumah-rumah pejabat pemerintahan Eropa.

Keterangan: Bagian atap *Omah* Singa yang menggunakan *design* bergaya Romawi klasik
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023.

Gambar 11.2 Atap *Omah* Singa

buku ini tidak diperjualbelikan

Keterangan: Beberapa panil kaca yang menghiasi jendela dan pintu *Omah* Singa
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023.

Gambar 11.3 Panil Kaca *Omah* Singa

Keterangan: *Desain* interior bernuansa Eropa pada salah satu kamar di *Omah* Singa.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.4 Kamar *Omah* Singa

Selain beberapa temuan tersebut, dalam *Omah* Singa terdapat juga unsur budaya Cina sebagai wujud perpaduan. Adapun unsur budaya Cina dapat ditemui pada barang-barang antik peninggalan Dinasti Ching, vas porselin yang diimpor langsung dari Cina, kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati (lihat Gambar 11.5) (Sien, 2017).

buku ini tidak diperjualbelikan

Kemudian, terdapat juga altar untuk ritual dan penghormatan kepada nenek moyang dalam budaya Cina (lihat Gambar 11.6).

Keterangan: Barang antik peninggalan Dinasti Ching berupa vas porselin, kursi, dan meja yang terbuat dari kayu jati.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.5 Interior Bernuansa Cina *Omah* Singa

Keterangan: Altar kayu bertuliskan anggota keluarga Han yang telah meninggal.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.6 Altar di *Omah* Singa

buku ini tidak diperjualbelikan

2. Bangunan Milik Yayasan Pancasila

Bangunan ini dalam sejarahnya merupakan rumah milik Han Hoo Tong. Han Hoo Tong merupakan seorang pengusaha Cina dengan pengaruh besar di sektor industri gula bersama dengan Kwee Sam Gan, dan Han Tiang Kwi. Ketiganya dianggap berpengaruh karena mampu mendanai penggunaan teknologi-teknologi baru di seluruh pabrik gula yang ada di Pasuruan (Reeve, 2017). Han Hoo Tong disebutkan juga sebagai orang Cina selanjutnya yang menyewa tanah milik Bupati Pasuruan setelah Han Kik Ko.

Tanah tersebut kemudian digunakannya untuk mendirikan pabrik gula di Pleret, Sarirejo, Ngempit, Pengkol, dan Kelurahan (Lombard & Salmon, 1991). Keistimewaan yang diperoleh Han Hoo Tong tidak hanya karena posisinya sebagai pengusaha, tetapi juga kerabat dari Kapiten Cina Pasuruan yaitu Han Hoo Tjoan yang menjabat pada 1881–1886 (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kepariwisataan, 2015). Selain itu, ada banyak fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu seperti urusan pajak dan hak sewa lahan untuk perusahaan yang dikelolanya yaitu *Bouw Maatschappij* (Lombard & Salmon, 1991).

Berbagai *privilege* tersebut tecermin di dalam kemegahan rumahnya. Bangunan rumah milik Han Hoo Tong bahkan lebih tinggi dari *Omah* Singa dan Hotel Daarussalam yang ada di sekitarnya. Bangunan tersebut memiliki nuansa Eropa lebih kuat dari beberapa bangunan lainnya di kompleks Pecinan. Hal ini dapat dilihat dari gambaran bagian depan, hiasan logam emper atau yang biasa disebut dengan *karbil* (lihat Gambar 11.7) (Tutuko, 2003), pintu yang diukir dengan gaya khas arsitektur klasik, ornamen-ornamen indah di lantai menggunakan porselin impor Italia, serta panil-panil kaca bening dengan banyak motif ukiran (lihat Gambar 11.8) (Handinoto, 2015).

buku ini tidak diperjualbelikan

Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.7 *Karbil* pada Bagian Depan *Omah* Singa

Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.8 Porselin dan Panil Kaca pada Pintu

3. Hotel Daarussalam

Hotel Daarussalam merupakan sebuah bangunan yang memiliki gaya arsitektur bernuansa Indis di Pasuruan. Bangunan ini lebih dikenal sebagai bekas rumah milik Kwee Sik Poo yang dijual kepada pengusaha dari etnis Arab yaitu Muhammad bin Thalib (Sien, 2017). Bangunan ini juga dapat dijadikan sebagai penanda kejayaan, *privilage*, hingga status sosial pemiliknya. Mengacu kepada dua peninggalan

buku ini tidak diperjualbelikan

sebelumnya, tentu penghuni sekaligus pemiliknya merupakan orang dengan pengaruh sangat kuat.

Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.9 Kwee Sik Poo

Bicara mengenai penghuni dan pemilik, bangunan tersebut ternyata bukan merupakan rumah asli milik Kwee Sik Poo. Dijelaskan bahwa Kwee Sik Poo membeli dan merenovasinya setelah menjabat sebagai seorang Mayor Cina di Pasuruan (Sien, 2017). Selain merupakan seorang pejabat, Kwee Sik Poo juga dikenal sebagai pengusaha kaya yang berpengaruh di sektor industri gula dan perdagangan opium. Dengan menguasai dua komoditas tersebut, tidak mengherankan apabila Kwee Sik Poo mampu membeli dan merenovasi Hotel Daarussalam (Rush, 2000).

Terkait informasi mengenai kepemilikan bangunan sebelum Kwee Sik Poo, sejauh ini belum ditemukan bukti konkret. Jika mengacu kepada laporan yang ditulis oleh H.J. Domis, ada kemungkinan bahwa bangunan ini milik Tuan Heer Hofland (Domis, 2020). Akan tetapi, jika dicermati kembali sepertinya bangunan tersebut bukan milik orang Eropa melainkan sesama orang Cina. Hal ini dapat diamati

buku ini tidak diperjualbelikan

dari posisi bangunan yang berada dekat dengan Klenteng. Selain itu, mengacu kepada sumber yang sama bahwa kawasan tersebut lebih banyak dihuni oleh orang Cina dan sebagian wilayah lainnya dihuni orang-orang Moor.

Berbicara lebih jauh terkait dengan budaya Indis yang melekat pada Hotel Daarussalam, terdapat beberapa unsur yang mendukung pernyataan tersebut. Adapun beberapa unsur di dalamnya yaitu menggunakan kombinasi gaya *ngang shan* dan *swallow tail* khas Cina Fujian di bagian atap (Sien, 2017). Tampak bagian depan (lihat Gambar 11.10) menggunakan corak perpaduan arsitektur Eropa Klasik (*Empire Style*) dengan sedikit modifikasi dengan penambahan fitur interior khas Cina. Sedangkan pada bagian depan bangunan (lihat Gambar 11.11) terdapat material logam berupa emper atau yang biasa disebut dengan *karbil* dan juga terdapat lampu taman yang biasa dijumpai pada ragam hias bangunan-bangunan bergaya indis di Hindia Belanda (Tutuko, 2003, 9).

Keterangan: Bagian depan Hotel Daarussalam yang menggunakan corak perpaduan arsitektur Eropa klasik dengan interior khas Cina.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.10 Bagian Depan Bangunan Hotel Daarussalam

buku ini tidak diperjualbelikan

Keterangan: Bagian depan yang dilengkapi dengan *karbil,* lampu taman, dan atap bernuansa Indis.
Sumber: Alfan Fikril Hakim, 2023

Gambar 11.11 Atap dan *Karbil* Hotel Daarussalam

E. Penutup

Perkembangan perekonomian suatu kelompok masyarakat membawa dampak sangat signifikan di semua bidang. Gambaran ini terus berlanjut dari periode awal kehidupan manusia. Hal ini dapat diamati dari perkembangan perekonomian di sektor perdagangan yang memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup. Sebagai contoh studi kasus, perkembangan ekonomi perdagangan melalui jalur sungai membawa perubahan terhadap perilaku dan pola hidup mereka menjadi lebih *survive*.

Pada periode berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi industri perkebunan gula juga memengaruhi pola hidup masyarakat di Pasuruan. Perubahan ini setidaknya meliputi orientasi ekonomi hingga gaya hidup dengan digunakannya budaya Indis sebagai simbol kelas sosial dan ekonomi di Pasuruan. Perlu diketahui juga, arah kebijakan politik juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi hingga hal-hal kecil seperti pola kebiasaan.

Perubahan yang muncul akibat adanya perubahan kebijakan politik seperti penataan wilayah pemukiman berdasarkan ras. Kebijakan ini tentunya membawa pengaruh di bidang sosial, yaitu

buku ini tidak diperjualbelikan

perubahan orientasi standar hidup dengan gaya Indis sebagai "kiblat". Perkembangan ekonomi dan juga perubahan kebijakan politik tersebut kemudian membuat munculnya "orang kaya baru". Terminologi baru di sini bukan hanya status ekonominya saja melainkan juga gaya hidup, status sosial, hingga peran sertanya dalam kehidupan politik. Cerminan "orang kaya baru" tersebut dapat diamati dari hadirnya bangunan-bangunan megah bernuansa Indis sebagai hunian.

F. Referensi

Abubakar, A., Krisdiana, R., Hudiyanto, R. R., Handinoto, Pratiningrum, S. S., Balqis, R. H., & Wibawa, M. A. (2020). *Dari rimba menjadi kota: Bank Indonesia dalam evolusi Malang Raya*. Bank Indonesia Institute.

Basundoro, P. (2016). *Pengantar sejarah kota*. Penerbit Ombak.

Chawari, M. (2002). Perkotaan Pasuruan di era kolonial Belanda pada sekitar abad XVIII s.d. XIX. *Berkala Arkeologi*, *22*(1), 66–80. https://doi.org/10.30883/jba.v22i1.851

De Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (2019). *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa*. Mata Bangsa.

De Vries, E. (1931). *Landbouw En Welvaart in Het Regentschap Pasoeroean*. Veenman & Zonen.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kepariwisataan. (2015). *Cagar budaya Kota Pasuruan*. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kepariwisataan Pasuruan.

Domis, H. J. (2020). *De Residentie Passaroeang*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Hamdy, M. I., & Wishnu. (2021). Kawasan elit masyarakat Eropa di Kota Pasuruan tahun 1918-1942. *Aatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, *10*(2), 1–13.

Handinoto. (1990). Sekilas tentang arsitektur Cina pada akhir abad ke-19 di Pasuruan. *Dimensi*, *15*(7), 1–18.

Handinoto. (2015). *Pengembangan kota di Jawa abad XVIII sampai pertengahan abad XX-Dipandang dari sudut bentuk dan struktur kotanya*. Ombak.

Hudiyanto, R. R. (2011). *Menciptakan masyarakat Kota Malang di bawah tiga penguasa, 1914-1950*. Lilin.

Ismain, K. (2001). Pabrik gula: Mekanisasi, produksi, dan ekspor (1600-1930). *Sejarah: Kajian Sejarah dan Pengajarannya*, *6*(1), 56–66.

buku ini tidak diperjualbelikan

Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Ombak.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.

Lombard, C., & Salmon. (1991). The Han Family of East Java. Enterpreneurship and politics (18th-19th Century). *Archipel*, (41), 53–87.

Nastititi, T. S. (2003). *Pasar di Jawa masa Mataram Kuno abad VIII-X Masehi*. Dunia Pustaka Jaya.

Niel, R. V. (2003). *Sistem tanam paksa di Jawa*. LKiS.

Nurhajarini, D. R. (2010). Gemeente Pasuruan 1918-1942. *Kota dan Pengembangan Wilayah*, *5*(10), 819–830.

Onghokham. (2017). *Riwayat Tionghoa peranakan di Jawa*. Komunitas Bambu.

Reeve, D. (2017). Melihat sejarah Pasuruan di masa kolonial, kapitan Cina dan keluarga Han. *Seminar Nasional Sejarah dan Budaya*, *10*. SMAN 1 Grati.

Rush, J., R. (2000). *Opium to Java: Jawa dalam cengkraman bandar-bandar opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. Mata Bangsa.

Sien, K. H. (2017). The house of Kwee Sik Poo: An Indonesian-Chinese merchant from Pasuruan. *Wacana*, *18*(1), 237–255.

Soekiman, D. (2014). *Kebudayaan indis dari zaman kompeni sampai revolusi*. Komunitas Bambu.

Suprapta, B. (2020). Peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Bondowoso sebagai sumber belajar sejarah lokal dan aset unggulan daerah. *JPSI: Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, *3*(1), 25–42.

Tjiptoatmodjo, F. A. S. (1983). Kota-kota pantai di sekitar Selat Madura (abad XVII sampai medio abad XIX) [*Disertasi*]. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tutuko, P. (2003). Ciri khas arsitektur rumah Belanda. *Jurnal Mentakat*, *2*(1), 1–14.

Widiah, S. (2018). Studi historis Prasasti Cunggrang sebagai sumber sejarah pada masa Mpu Sindok tahun 929–947 M. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 221–237.

buku ini tidak diperjualbelikan

BAB XII

JAWA DALAM PERSILANGAN BUDAYA DAN POTENSI MEMBANGUN KEBUDAYAAN BAHARI NUSANTARA

Deny Yudo Wahyudi, Slamet Sujud Purnawan Jati, & Daya Negri Wijaya

Kebudayaan bahari dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dimiliki oleh komunitas pesisir yang lekat dengan laut. Kebudayaan ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sebuah tradisi yang kemudian dipahami sebagai tradisi bahari Nusantara (Zuhdi, 2020). Hal yang kemudian tidak dapat dilepaskan dengan kebudayaan ini adalah adanya persilangan budayanya. Tidak hanya karena kawasan-kawasan tersebut saling terkoneksi satu sama lain secara ruang, tetapi juga karena adanya interaksi sosial, terutama aktivitas politik dan perdagangan. Uniknya lagi berbagai aktivitas yang pada akhirnya bermuara pada persilangan budaya tersebut tidak hanya meninggalkan jejaknya di kawasan pesisir, tetapi juga pada kawasan pedalaman sehingga secara sederhana buku ini telah memberikan gambaran bahwa aktivitas pesisir atau kebudayaan pesisir tak terlepas

D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya
Universitas Negeri Malang, *e-mail*:deny.yudo.fis@um.ac.id

© 2025 Editor & Penulis

Wahyudi, D. Y., Jati, S. S. P., & Wijaya, D. N. (2025). Jawa dalam Persilangan Budaya dan Potensi Membangun Kebudayaan Bahari Nusantara. Dalam D. Y. Wahyudi, S. S. P. Jati & D .N. Wijaya (Ed.), Jawa dalam Silang Bahari Nusantara (157–161). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1031.c1523, E-ISBN: 978-602-6303-82-0

buku ini tidak diperjualbelikan

kaitannya dengan aktivitas agraris di kawasan pedalaman. Mengingat bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa agraris sekaligus pelaut yang andal sejak berabad-abad silam.

Upaya menilik kembali jejak-jejak kebudayaan bahari di Pulau Jawa memberikan informasi bahwa sejak beberapa abad silam, wilayah pesisir dikenal sebagai titik penting yang diserbu oleh para saudagar dan pedagang asing untuk pundi–pundi keuntungan. Begitu pula beberapa wilayah di pesisir Jawa yang memainkan peran penting dari periode Hindu-Buddha, Peralihan (Islam), hingga Kolonial. Wilayah strategis, kondisi sosial yang mendukung, ditambah rempah-rempah yang tumbuh subur sudah cukup membuat wilayah-wilayah tersebut menjadi destinasi perdagangan yang patut dikunjungi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak terhadap perkembangan ekonomi di wilayah pesisir Jawa yang secara geografis bersinggungan dengan para pedagang yang akan melakukan perniagaan.

Memasuki abad 15 M, aktivitas ekonomi di Nusantara semakin menjanjikan. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara semakin ramai disinggahi oleh para pedagang dari berbagai penjuru negeri. Ledakan perdagangan rempah dan komoditas lainnya semakin masif sehingga hal ini menjadikan kota-kota di wilayah pesisir bertransformasi menjadi pusat-pusat peradaban dan titik temu berbagai etnis dan umat beragama dari berbagai negeri, misalnya Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, dan Gresik (Daldjoeni, 1982).

Geliat perniagaan di Pulau Jawa berpusat di sepanjang daerah pesisir utara, di mana wilayah ini menjadi tempat transit kapal-kapal dagang dari Bangsa Timur Tengah yang membawa budaya Islam. Wilayah pesisir tersebut memicu adanya kontak sosial antar-pedagang dan masyarakat yang berdampak juga dengan semakin pesatnya islamisasi di Pulau Jawa. Perkembangan wilayah pesisir kiranya juga masih terus berlanjut hingga periode kolonial, seperti di Surabaya dan Pasuruan yang ditandai dengan keberadaan jejak-jejak persilangan budaya sebagai hasil interaksi penduduk lokal dengan kebudayaan dari luar yang dibawa oleh pedagang asing, seperti Cina dan Arab.

buku ini tidak diperjualbelikan

Dari masing-masing bab kiranya dapat ditemui beberapa pola sama yang kemudian menjadi *point* atau elemen penting dalam terbentuknya kebudayaan bahari Nusantara. Poin-poin tersebut juga identik dengan persilangan budaya. Meskipun keberadaannya tidak selalu disorot secara sentral dalam setiap bab atau pembahasan, tetapi mampu membangkitkan kembali ingatan kolektif akan kebesaran Jawa sebagai bagian dari pembangun kebudayaan bahari Nusantara, serta menunjukkan kebesaran nenek moyang bangsa Indonesia pada masa lampau sebagai bangsa pelaut yang andal.

Dari ke-12 bab dalam buku ini kemudian terbagi menjadi dua bagian, poin pertama yang dapat disepakati bersama adalah kebudayaan pesisir lekat dengan tradisi bahari berupa pengetahuan dan teknologi pelayaran serta perkapalan. Poin kedua, pelabuhan atau bandar dagang yang secara signifikan bertumbuh menjadi kota dagang selalu memainkan peran penting dalam sistem ekonomi pesisir, yakni sebagai emporium utama dalam sistem ekonomi, misalnya pelabuhan atau bandar dagang Canggu di era Majapahit; disusul dengan Tuban, Gresik, dan Arosbaya (Surabaya); hingga bandar dagang Tanjung Perak di Surabaya yang berkembang pada masa kolonial.

Poin berikutnya terletak pada hubungan kawasan pesisir dan kawasan pedalaman. Melihat bahwa kota pelabuhan akan menjadi ramai apabila terhubung dengan daerah pedalaman, baik melalui sungai, kanal, maupun jalan darat. Hubungan dua kawasan tersebut juga mempertegas adanya interaksi sosial yang terjalin antara komunitas pesisir dan pedalaman. Sistem ini juga berpengaruh pada munculnya hierarki atau level kota pelabuhan di setiap kawasan (Evers, 1988), misalnya sebagai (1) *Feeder points* atau titik pengumpul; (2) *Collecting centres* atau bandar menengah; dan (3) *Entrepots* atau bandar utama. Pola ini dapat ditemui pada pembahasan jaringan perdagangan era Majapahit yang menempatkan sungai sebagai penghubung antara desa-desa pelabuhan di pedalaman (dikenal sebagai *nadirita pradeca*) dengan Canggu sebagai bandar dagang utama yang terletak di muara sungai atau pesisir. Pola yang masih berlanjut hingga masa peralihan dengan ditemuinya bandar-bandar dagang sepanjang pesisir utara

buku ini tidak diperjualbelikan

jawa seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban yang terhubung dengan masing-masing *collecting center* dan *feeder port*-nya.

Poin terakhir yang menjadi cikal bakal munculnya persilangan budaya adalah adanya jejaring sosial antara komunitas-komunitas pesisir maupun pedalaman. Ataupun antara pedagang lokal, regional, maupun global (pedagang asing). Hubungan antara satu pasar dan pasar lainnya dapat dilihat sebagai sistem pasar. Jika dilihat dari aspek lokal, perdagangan di suatu bandar terhubung dengan jaringan perdagangan di wilayah yang lebih luas. Begitu pula sebaliknya, jika dilihat dari aspek global pelabuhan kecil sering kali berada dalam sistem global, di mana hubungan perdagangan mereka berasal dari lintas budaya dan bangsa, misalnya jaringan perdagangan pesisir dan desa-desa di Majapahit dan jaringan ekonomi politik Jawa yang terekam dalam catatan Ordorico de Pordenone.

Pola di atas menjadi penanda bagaimana sistem ekonomi politik pesisir Nusantara dalam lintas sejarah dan menjadi ingatan bersama masyarakat pesisir yang menjadi pendukung kebudayaan bahari. Selain dari adanya pola yang terbentuk dan tampak pada sistem yang ada, memori kolektif akan budaya bahari Nusantara juga dapat terbentuk melalui tinjauan kembali jejak-jejak kebudayaan bahari yang tersebar baik di kawasan pesisir maupun kawasan pedalaman. Bagian kedua pada buku ini telah membantu dalam upaya meninjau kembali tinggalan jejak kebudayaan tersebut, mulai dari masa kuno (Hindu-Buddha), peralihan (Islam), pra kolonial, hingga pemerintahan kolonial.

Pola-pola sistem ekonomi politik pesisir dan jejak kebudayaan bahari yang telah dibahas pada bagian-bagian dan bab-bab pada buku ini diharapkan menjadi pelengkap kajian tentang sejarah kawasan pesisir Nusantara dari segi ekonomi politik, khususnya di pesisir Pulau Jawa. Serta juga sebagai penegas sejarah bahari Nusantara dan penanaman kembali memori kolektif akan kebesaran bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Diangkatnya tema kebudayaan bahari dalam buku ini diharapkan mampu memantik penulisan narasi-narasi sejarah mengenai kebudayaan bahari Nusantara lainnya. Mengingat

buku ini tidak diperjualbelikan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis terpanjang kedua di dunia. Tentu narasi sejarah pesisir dan kebudayaan bahari yang ada saat ini dapat diibaratkan sebuah gunung es, di mana masih banyak potensi-potensi temuan jejak kebudayaan bahari yang kiranya belum diangkat atau dikaji oleh kacamata sejarawan dan budayawan.

A. REFERENSI

Daldjoeni, N. (1982). *Geografi kesejarahan 1: Peradaban dunia* (vol. 1). Penerbit Alumni.

Evers, H.-D. (1988). Traditional trading networks of Southeast Asia. Dalam *Asian Trade Routes*, *35*, 89–100.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

Polonia, A. (2006). Northwest Portuguese Seaport System in the early modern age: Results of a research project. *XIV International Economic History Congress, Helsinki, Session, 58*, 1–27.

Zuhdi, S. (2020). Budaya bahari sebagai modal membangun negara maritim Indonesia. *Jurnal Maritik Indonesia*, *8*(2), 127–142.

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

GLOSARIUM

Bathara Sapta Prabu	:	Sebuah jabatan penasihat raja yang beranggotakan keluarga raja yang berkuasa, umumnya berjumlah tujuh orang
Buat Haji	:	Kegiatan kerja bakti yang dilakukan penduduk pada masa kuno (Hindu-Buddha)
Collecting Centres	:	Bandar menengah yang bertugas sebagai pengumpul skala sedang yang letaknya berada di daerah *vassal*
Drwya Haji	:	Hak memilih raja berupa hasil pajak yang ditarik oleh para petugas pajak
Entrepots	:	Bandar utama yang berperan sebagai titik utama bagi pedagang lokal maupun asing berinteraksi
Feeder Points	:	*Feeder port* atau *feeder points* adalah titik pengumpulan atau pelabuhan yang bertugas mengirim komoditas dari pedalaman ke bandar yang lebih besar

buku ini tidak diperjualbelikan

Manggilala Drwya Haji	:	Petugas pemungut pajak pada masa Kerajaan Medang atau Mataram Kuno
Mitra Satata	:	Politik luar negeri Kerajaan Majapahit untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan asing yang ada di Asia Tenggara dan di luar Asia Tenggara
Naditira Pradeca	:	Desa-desa di tepian sungai yang tumbuh menjadi pelabuhan sungai dan berperan dalam lalu lintas penyeberangan
Pasek-pasek	:	Hadiah yang digunakan dalam upacara penetapan sima, biasanya dalam bentuk uang, barang, atau binatang
Pendharmaan	:	Istilah dalam arkeologi Hindu-Buddha Indonesia untuk menyebutkan suatu bangunan suci umumnya candi yang didirikan untuk memuliakan seorang tokoh yang telah meninggal
Sima	:	Sebidang tanah produktif yang dibebaskan dari status pajak dan dihadiah oleh penguasa setempat untuk penduduk sekitar wilayah tersebut
Wanua	:	Sistem pemerintahan dengan tingkatan paling bawah pada masa Hindu-Buddha, setingkat desa dan dipimpin oleh seorang rama atau karaman
Watak I Jro	:	Sebutan untuk warga keraton pada masa Kerajaan Medang atau Mataram Kuno

buku ini tidak diperjualbelikan

DAFTAR SINGKATAN

Bakosurtanal	:	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BE	:	Buddis Era
BKSP	:	Badan Kerja Sama Pembangunan
BPCB	:	Balai Pelestarian Cagar Budaya
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
KTT G20	:	Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty
P3GI	:	Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia
THHK	:	Tionghoa Hwee Kwan
VOC	:	Vereenigde Oostindische Compagnie

buku ini tidak diperjualbelikan

buku ini tidak diperjualbelikan

INDEKS

Airlangga, 32, 41, 45, 46, 53, 79, 124
Ambon, 47, 168, 169
Arab, 47, 52, 60, 63, 67, 73, 75, 76, 78, 79, 93, 97, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 140, 141, 145, 151, 158
Banda, 5
Belanda, 5, 7, 76, 77, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 155, 156
Bengawan Solo, 25, 29, 34, 36, 40, 116
Blitar, 22, 27, 169, 175
Buat Haji, 163
Bubat, 36
Cambay, 111
Campa, 30, 68, 72, 73, 97, 99, 117
Candi Panataran, ix, 15, 16, 22, 23
Canggu, 17, 23, 25, 27, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 51, 54, 67, 116, 159
Cina, x, 5, 6, 7, 44, 46, 47, 52, 58, 60, 63, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 128, 129, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149,

buku ini tidak diperjualbelikan

150, 152, 153, 155, 156, 158
Demak, x, 45, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 70, 74, 87, 120, 124, 125, 158
gemeente, 138
Gresik, 5, 14, 36, 37, 38, 44, 48, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 77, 87, 125, 158, 159, 160
Gula, xi, 125, 126, 143, 165
Hayam Wuruk, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 100, 110, 124
Hujung Galuh, 46
India, 7
Indis, vi, 7, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 151, 153, 154, 155
Inggris, 126, 169
Jayakatwang, 29, 103
Jember, 108, 121
Kadiri, 12, 29, 66, 103, 123
Kahuripan, 45, 46
Kedah, 25
Kertanegara, 87, 103
Khmer, 26, 97
Kwee Sik Poo, x, 131, 132, 146, 151, 152, 156
Kwee Tjong Hook, 131
Lamongan, 5, 36, 37, 45, 46, 69, 74
Lampung, 25
Lasem, 70, 71, 100, 105, 130
Lumajang, 121, 123, 126
Madura, 60, 71, 85, 87, 90, 91, 125, 130, 132, 133, 138, 140, 141, 156
Majapahit, v, vi, ix, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 79, 83, 87, 88, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 159, 160, 164
Makam Troloyo, vi, x, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 120
Malaka, 5, 47, 57, 58, 60, 62, 76
Malang, xx, 1, 11, 29, 43, 55, 65, 83, 97, 107, 121, 123, 126, 131, 137, 155, 157, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178
Maluku, 5, 48, 59, 60, 169
Mapanji Garasakan, 22, 25
Mataram Kuno, 27, 156, 163, 164
Mdang, 12, 13, 163, 164
Mitra Satata, 164
Museum Trowulan, 15, 16, 17, 21, 116
Naditira Pradeca, vi, x, xi, 29, 35, 37, 44, 164

buku ini tidak diperjualbelikan

Ordorico de Pordenone, 160
Pasek-pasek, 164
Pasuruan, vi, xi, 7, 87, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 171, 177
Persia, 67, 73, 76, 78, 98, 99, 116
Portugis, 5, 97, 123, 169
Prasasti Balawi, ix, 13, 14, 17, 18, 44, 45, 97, 103
Prasasti Harinjing, 32
Prasasti Kalasan, 13
Prasasti Kamalagyan, 32, 41
Prasasti Kambang Putih, 22, 45, 46
Prasasti Karang Bogem, 14
Prasasti Palungan, 14, 21
Prasasti Pamintihan, ix, 17, 18
Prasasti Tuhanaru, 14, 21
Prasasti Warunggahan, 14
Probolinggo, 121, 123, 126, 130
Pu Sindok, 110, 123, 139
Raden Wijaya, 13, 29, 100, 103
Residen, 122, 126, 144
Semenanjung Melayu, 116
Sidayu, 125
Sidoarjo, 5, 37, 38, 40, 54, 92
Sima, 164
Singhasari, 12, 29, 103, 123, 124
Situbondo, 121
Sriwijaya, 25, 26, 27, 43
Sumenep, 125, 126
Sungai Brangkal, 31, 32
Sungai Brantas, 11, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 48, 53, 85, 87, 88, 91, 92, 116
Sungai Gunting, 31, 32
Surabaya, vi, x, 5, 6, 37, 44, 48, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 67, 69, 73, 74, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 119, 120, 125, 126, 127, 130, 140, 158, 159, 160
Sutasoma, 108
Ternate, 47
Tionghoa, 7, 26, 104, 105, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 156, 165
Tiongkok, 116, 130, 131
Tome Pires, 48, 53, 64, 76
Troloyo, vi, x, 6, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 168, 169
Trowulan, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 51, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120,

buku ini tidak diperjualbelikan

168, 169
Trunajaya, 125
Trung, 36, 38, 116
Tuban, vi, x, 5, 6, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 158, 159, 160, 172, 173
Turki, 60, 98, 116
Uang Gobog, ix, 24
VOC, 87, 88, 125, 126, 128, 129, 137, 165
Wanua, 164
Watak I Jro, 164

buku ini tidak diperjualbelikan

TENTANG EDITOR

Deny Yudo Wahyudi Staf pengajar di Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Sejarah dari IKIP Malang pada 1998, Magister Humaniora Bidang Ilmu Arkeologi dari Universitas Indonesia pada 2005, dan Doktor Ilmu Arkeologi dari Universitas Indonesia pada 2021. Selain menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, beliau juga aktif melakukan penelitian dalam bidang kajian arkeologi-sejarah. Dalam perjalanan kariernya, beliau telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, beberapa di antaranya *Hibriditas Kultural Ambon abad 15–17* (2022); *Tuha Kalang: Orang Kalang dalam Budaya Jawa* (2019); *The Ancient Grave of Troloyo in Trowulan* (2016), dan *Architectural and Religious Study on Signifier of Shiva Buddhist in Jago Temple* (2016). Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, seperti Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI), dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Beliau dapat dihubungi via *e-mail*: deny.yudo.fis@um.ac.id

buku ini tidak diperjualbelikan

Slamet Sujud Purnawan Jati, Staf pengajar di Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Arkeologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1991 dan Magister Humaniora Bidang Ilmu Arkeologi dari Universitas Indonesia pada 1999. Selain itu, Beliau juga aktif melakukan penelitian dalam bidang kajian arkeologi-sejarah. Dalam perjalanan kariernya, Beliau telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, beberapa di antaranya *Hibriditas Kultural Ambon abad 15–17* (2022); *The Ancient Grave of Troloyo in Trowulan* (2016); dan *Architectural and Religious Study on Signifier of Shiva Buddhist in Jago Temple* (2016). Beliau dapat dihubungi via *e-mail*: slamet.sujud.fis@um.ac.id

Daya Negri Wijaya, Lahir di Blitar, pada 22 April 1989. Sejak 2014 menjadi staf pengajar di Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang. Dia mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Malang pada 2011; Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Brawijaya pada 2016; Magister Ilmu Sejarah (Master of Arts in History) dari The University of Sunderland, United Kingdom, pada 2013; dan Doktor Ilmu Sejarah (Doutor em Historia) di Universidade do Porto, Portugal, pada 2022. Selain menjabat sebagai Ketua Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang (2022–2027), beliau juga aktif melakukan penelitian dalam bidang sejarah kolonial, khususnya sejarah ekspansi Portugis ke Nusantara. Salah satu karya terbarunya ialah "The 1629 Acehnese Invasion of Malacca" yang dipublikasikan pada tahun 2022 di *Jurnal Paramita* dan film dokumenter bertajuk *Hula-Keta: Bukan Maluku Tanpa Sagu* yang diluncurkan pada 18 Maret 2023. Beliau dapat dihubungi via *e-mail*: daya.negri.fis@um.ac.id

buku ini tidak diperjualbelikan

TENTANG PENULIS

Labuda Shofiya Ananda Lahir di Batu pada 5 Maret 2001. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2013 menempuh pendidikan jenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Batu dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Batu jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan tamat pada tahun 2019. Setelah lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Sejarah pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan telah aktif mengikuti kegiatan penelitian, seminar, dan lomba karya tulis ilmiah yang relevan dengan kajian pendidikan sejarah. Beberapa kajiannya adalah "Revitalisasi Padasan sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Desa Nguling, Kabupaten Pasuruan" sebagai *best topic issues* pada LKTIN 2021 yang diselenggarakan oleh Departemen Sejarah UM dan "Kontemplasi Sunan Bonang terhadap Pendidikan Karakter: Membumikan Nilai Luhur melalui Edutainment" yang meraih juara ketiga dalam kegiatan LKTIE BEM UM 2022. Alamat *e-mail*: labudaaa1415@gmail.com

buku ini tidak diperjualbelikan

Vita Sabrina Azda Laili Lahir di Tuban pada 24 September 2000. Penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tuban dan lulus pada 2016. Kemudian menempuh jenjang menengah atas jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMA Negeri 1 Tuban. Pascalulus dari jenjang menengah atas pada 2019, penulis melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang dengan mengambil Prodi Pendidikan Sejarah. Selama masa studi, penulis terlibat aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, editorial jurnal ilmiah, relawan, kompetisi (karya ilmiah), serta penelitian fundamental maupun pengembangan. Beberapa kajian yang dilaksanakan dan mendapatkan predikat juara selama masa perkuliahan, antara lain "Impresi Modernisasi terhadap Kesadaran Budaya Lokal: NugalHudog di Tengah Laju Pembangunan Ibu Kota Negara" yang mendapatkan predikat *best papper* sekaligus juara kedua pada ajang National Economic Competition 2022 yang diselenggarakan oleh BEM FEB Universitas Negeri Malang. Karya yang lain berjudul "Kontemplasi Sunan Bonang terhadap Pendidikan Karakter: Membumikan Nilai Luhur melalui Edutainment" yang mendapatkan predikat juara ketiga dalam kegiatan LKTIE BEM UM 2022. Karya selanjutnya berjudul "Penyelewengan Produksi dan Distribusi Obat Tahun 1977-1989: Peran Pers terhadap Ketahanan Informasi Kesehatan Masyarakat Era Orde Baru" meraih juara kedua pada gelaran History Fair 2022 yang dilaksanakan oleh Studi Klub Sejarah, Universitas Indonesia. Penulis juga aktif memublikasikan karya melalui jurnal ilmiah. Alamat *e-mail*: vitasabrina228@gmail.com

Vinda Regita Cahyani Lahir di Malang pada 5 Oktober 2000. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pada tahun 2013 menempuh pendidikan jenjang menengah pertama di SMPN 1 Kromengan dan tamat pada 2016. Kemudian

buku ini tidak diperjualbelikan

melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Sumberpucung Jurusan Bahasa dan tamat pada 2019. Setelah lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Sejarah pada 2019. Selama masa perkuliahan dia telah aktif mengikuti kegiatan lomba poster dan karya tulis ilmiah nasional, kepenulisan artikel di jurnal nasional, serta aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gempita. Alamat *e-mail*: vinda.regita.c@gmail.com

Muhammad 'Afwan Mufti, Lahir di Tuban pada 7 Februari 2001. Anak kedua dari dua bersaudara. Pada 2013, mengampu pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tuban dan sempat memiliki karya dengan judul "Kajian Ajaran Sunan Bonang yang Diabadikan dalam Kalpataru" dan meraih juara 1 pada LKTI Festival Sejarah Se-Jawa Bali. Mengampu Pendidikan bangku kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan Sejarah pada 2019 dan telah menyelesaikan masa studi pada tahun 2023. Selama mengampu Pendidikan di Malang, dia telah mengikuti berbagai ajang perlombaan di bidang akademik yaitu Juara 3 LKTIN Sejarah pada tahun 2021 dengan judul "Merekonstruksi nilai budaya yang terkandung dalam upacara petik laut sebagai bentuk pemberdayaan potensi laut di palang tuban tahun 1900-an–2003". Selain itu, dia juga menjadi delegasi UM dalam kegiatan P2MW (salah satu kegiatan Belmawa) dengan mengangkat usahanya "*ECa Rabbit Farm easy choise one stop solution*". Dia juga memiliki berbagai tulisan yang telah diterbitkan, yaitu "Dampak Keluarnya NU dari Masyumi terhadap Politik Indonesia, 1952-1960" dan "Analisis Potensi Sejarah Perjuangan Ronggolawe sebagai Pembelajaran Siswa SMA: Nilai Perjuangan dan Kepahlawanan". Alamat *e-mail:* afwanmufti66@gmail.com

buku ini tidak diperjualbelikan

Isa Al Fadani Ahmad Lahir di Malang pada 13 Oktober 2000. Merupakan Anak Pertama dari empat bersaudara. Riwayat pendidikan dimulai pada jenjang sekolah dasar di SDN Talok 3. Kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama MTS Negeri 2 Malang. Jenjang pendidikan berikutnya yaitu sekolah menengah kejuruan di SMK Widya Dharma Turen mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Kemudian mengampu pendidikan tinggi Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang pada tahun 2020. Penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian seperti himpunan mahasiswa, badan eksekutif, dan juga turut serta sebagai tim pengelola jurnal Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Alamat *e-mail*: isa.alfadanii54@gmail.com

Anisa Musyaroful Ikhrom Lahir di Malang pada 1 Oktober 2000. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 5 Jatiguwi, SMP Negeri 2 Sumberpucung, SMA Negeri 1 Kepanjen. Melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang dan tahun 2024 masih aktif menjadi mahasiswa magister Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang. Kajian utamanya mengenai sejarah bencana periode Hindu-Buddha. Selama kuliah, aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, *internship*, dan mengikuti program mentoring.

buku ini tidak diperjualbelikan

Vega Andika Kusuma Lahir di Blitar pada 21 Juli 2003. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Pada tahun 2016 menempuh pendidikan jenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Gandusari dan tamat pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Garum jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan tamat pada tahun 2022. Setelah lulus jenjang sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Sejarah pada tahun 2022. Selama perkuliahan, ia aktif dalam mengikuti seminar dan organisasi. Organisasi yang ia ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Departemen Sejarah. Beberapa kegiatan yang pernah ia ikuti adalah 'Geschiedenis Fest' dimana acara tersebut adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional untuk mahasiswa dan Olimpiade Sejarah tingkat Nasional untuk SMA yang dislenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Sejarah. Alamat *e-mail*: vega.andika.22073316@students.um.ac.id

Nenci Aprilia Nabela Lahir pada 20 April 2003 di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Menempuh pendidikan jenjang pertama pada tahun 2015 dan lulus tahun 2018 di SMP Veteran Ngantang. Setelah lulus, melanjutkan sekolah menengah atas pada tahun 2018 kemudian lulus pada tahun 2021 di SMA Negeri 1 Ngantang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian ia melanjutkan ke perguruan tinggi pada tahun 2021 di Universitas Negeri Malang pada Fakultas Ilmu Sosial dengan program studi Pendidikan Sejarah. Dalam masa perkuliahan, ia aktif dalam mengikuti seminar dan ikut serta dalam international exhibition yang diselenggarakan oleh departemen sejarah dengan mendapatkan juara 3. Alamat *e-mail*: nenci.aprilia.2107315@students.um.ac.id

buku ini tidak diperjualbelikan

Anis Fitri Rachmawati, Lahir di Mojokerto pada 25 Desember 2000. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Puri pada 2019 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Sejarah. Selama melangsungkan perkuliahan, penulis lebih fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan) agar dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. Penulis juga mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar (AM) di SMKN 8 Malang Kecamatan Blimbing Kota Malang. Asistensi merupakan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Selain itu, penulis juga pernah menerbitkan sebuah artikel dengan judul "Analisis Muatan Karakter Bab Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara dalam Buku Teks Sejarah Kelas XI Kurikulum 2013 Revisi 2016" yang diterbitkan oleh jurnal *Historiography*: *Journal of Indonesian History and Education* pada tahun 2021. Alamat *e-mail*: afirarachmawati@gmail.com

Erza Sahrul Mubarok Lahir di Pasuruan pada 25 April 1989. Sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru karena terlahir dalam keluarga yang ayah dan ibunya seorang guru. Untuk mewujudkan cita-citanya, menempuh kuliah Sarjana pada Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Sejarah. Setelah lulus tahun 2012, melanjutkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat pada SMA Negeri 1 Grati. Saat ini aktif tergabung dalam organisasi MGMP Sejarah Kabupaten Pasuruan. Untuk mengembangkan kemampuan menulisnya, saat ini tergabung dalam tim pembina penulisan karya ilmiah remaja. Selain aktif sebagai pengajar, juga berusaha untuk terlibat dalam pelestarian Cagar Budaya di daerahnya dengan bergabung dalam organisasi pelestarian sejarah dan Cagar Budaya. Alamat *e-mail*: erzad3@gmail.com

buku ini tidak diperjualbelikan

Alfan Fikril Hakim Lahir di Pasuruan pada 27 Oktober 1997. Merupakan lulusan dari Program Studi S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang tahun 2019. Saat ini, dia sedang menempuh program Magister Pendidikan Sejarah di Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang. Selain mengikuti program Magister, dia juga mengikuti program PPG Prajabatan sejak tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Alamat *e-mail*: alfanfikril@gmail.com

buku ini tidak diperjualbelikan

Istilah bahari selalu digunakan dan dipertukarkan dengan maritim. Walaupun memiliki makna yang sama, yakni laut, kedua istilah ini seharusnya digunakan dalam konteks yang berbeda. Istilah bahari biasanya berhubungan dengan kebudayaan pesisir, sedangkan konsep maritim digunakan ketika membahas geopolitik kepulauan tertentu. Dalam konteks Nusantara, ribuan pulau yang terkoneksi satu sama lain memungkinkan hadirnya interaksi sosial terutama aktivitas perdagangan yang bermuara pada persilangan budaya.

Buku Jawa dalam Silang Bahari Nusantara membahas persilangan kebudayaan di kawasan pesisir dan pengaruhnya pada daerah pedalaman, terkhusus di wilayah Pulau Jawa. Unsur kebudayaan yang akan dibahas buku ini meliputi sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup (teknologi), sistem ekonomi (mata pencaharian), sistem politik, bahasa, kesenian, dan religi. Tidak hanya itu, pembahasan dalam buku ini juga diperluas lewat ulasan tradisi bahari berupa teknologi pelayaran, sistem ekonomi politik di kawasan pesisiran, dan jejak-jejak persilangan bahari Nusantara. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya, khususnya dalam menambah dan memperkuat memori kolektif kebudayaan bahari melalui rekam jejak kebudayaan pesisir Nusantara yang lebih segar, kaya, dan kronologis

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.1031

ISBN 978-602-6303-82-0

9 786026 303820